



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2015. LKjIP Kabupaten Rembang disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2015, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menginformasikan kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan maupun melaksanakan pembangunan selama Tahun 2015. Laporan ini sekaligus sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menciptakan transparansi informasi guna terciptanya tata pemerintahan yang baik sebagai upaya mewujudkan visi "**Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera**". Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah mulai dari perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam proses pembangunan selama Tahun 2015 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Rembang Tahun 2015.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Rembang, Maret 2016

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ

DAFTAR ISI

	Halaman
<i>Kata Pengantar</i>	i
<i>Daftar Isi</i>	ii
<i>Ikhtisar Eksekutif</i>	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....	2
C. Bidang Kewenangan	2
D. Gambaran Umum Daerah	4
E. Kelembagaan Perangkat Daerah	10
F. Aparatur Pemerintah Daerah	12
G. Permasalahan / Isu Pembangunan Daerah	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. Visi dan Misi	26
B. Tujuan	27
C. Sasaran	28
D. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	31
E. Prioritas Daerah	32
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang.....	53
B. Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	64
C. Akuntabilitas Keuangan.....	127
BAB IV PENUTUP	136
LAMPIRAN	
1. Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015	
2. Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Rembang	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Penyusunan RPJM memerlukan landasan pembangunan yang memiliki cakupan luas sehingga dapat ditetapkan sebagai dasar bagi daerah untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan di Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Penetapan RPJM merupakan acuan dalam penyusunan rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

“Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut diatas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-Front City.
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

Sesuai dengan penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015 yang telah ditetapkan, capaian kinerja sasaran yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
1	Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.	192,59
2	Promosi peluang investasi.	237,11
3	Terjaminnya keamanan berusaha.	162,81
4	Tersedianya infrastruktur yang memadai.	84,80
5	Tersedianya dukungan SDM yang memadai.	100,86
6	Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.	226,71
7	Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.	95,71
8	Jaminan keamanan oleh Pemda.	114,48
9	Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.	101,03
10	Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.	104,79
11	Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	92,25
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.	72,02
13	Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	110,30
14	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	111,07
15	Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.	109,20
16	Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.	79,78
17	Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	93,25
18	Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.	93,29
19	Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.	-113,61
20	Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.	74,13
21	Tersedianya tenaga medis yang memadai.	27,5

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
22	Tersedianya obat-obatan yang memadai.	100
23	Tersedianya peralatan medis yang memadai.	63
24	Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	88,58
25	Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.	150,28
26	Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	102,42
27	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.	100
28	Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.	0
29	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.	89,09
30	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.	100
31	Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.	101,53
32	Meningkatnya kualitas saluran irigasi.	0
33	Meningkatnya kualitas saluran drainase.	70
34	Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya <i>sea front city</i> .	94,26
35	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	100
36	Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.	310,53
37	Terwujudnya kawasan wisata bahari	138,44
38	Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta <i>good and clean governance</i> .	94
39	Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.	91,95
40	Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.	100
41	Responsif terhadap perkembangan situasi.	94,29
42	Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.	100

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA
43	Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan / perubahan lingkungan strategis	191.67
	Rata-rata	108,73

Prosentase capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015 secara keseluruhan 108,73 (kategori sangat baik). Dari 43 (empat puluh tiga) sasaran strategis yang mempunyai kinerja sangat baik sebesar 31 sasaran, berkinerja tinggi sebanyak 4 sasaran, berkinerja sedang sejumlah 3 sasaran berkinerja rendah sebanyak 1 sasaran, dan berkinerja sangat rendah sebanyak 4 sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan secara otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah diberi kesempatan yang luas untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengakomodir kebutuhan, karakteristik, dan ciri khas yang bersifat kedaerahan untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Rembang didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2015 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2015.

B. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Kabupaten Rembang Tahun 2015 didasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015.

C. Bidang Kewenangan

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12, Pemerintah Kabupaten Rembang

melaksanakan Urusan Pemerintahan baik Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Adapun urusan pemerintahan pilihan yang ada di Kabupaten Rembang meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;

7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

D. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah, pada garis koordinat 111°00' - 111°30' Bujur Timur dan 6°30'-7°6' Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tuban (Jawa Timur)
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Blora
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah 101.408 ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan. Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN REMBANG

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (ha)
1	Sumber	7.673
2	Bulu	10.240
3	Gunem	8.020
4	Sale	10.714
5	Sarang	9.133
6	Sedan	7.964
7	Pamotan	8.156
8	Sulang	8.454
9	Kaliori	6.150
10	Rembang	5.881
11	Pancur	4.594
12	Kragan	6.166
13	Sluke	3.759
14	Lasem	4.504
	Jumlah	101.408

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka Tahun 2015

a. Topografi

Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi, meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Rembang, 8,34% terletak pada ketinggian 1–7 meter dpl, ketinggian 7-25 m dpl sebesar 12,41% , ketinggian 25-100 m dpl sebesar 42,82 %, ketinggian 100-500 m dpl sebesar 28,08%, dan ketinggian diatas 500 m dpl sebesar 8,34%. Luas lahan yang relatif datar mencapai 82.713 hektar, sedangkan sisanya berupa lahan curam sampai dengan sangat curam. Kelerengan yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari kelerengan 0-2 % seluas 45.205 Ha (46,58%), kelerengan 2-15% seluas 33.233 Ha (43,18%), kelerengan 15-40 % seluas 13.980 Ha (14,38 %), dan sisanya 4,86% merupakan kelerengan daerah dengan kelerengan > 40%.

b. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahan bukan sawah 72.313 ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 ha. Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 2.210 ha (7,58%), pengairan 1/2 teknis 3.594 ha (12,32%), pengairan sederhana 2.569 ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722 ha (71,29%). Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang cukup berpotensi, kecuali di daerah pegunungan di sebelah timur yang termasuk pegunungan tandus. Berbagai jenis tanah yang ada di Kabupaten Rembang diantaranya adalah tanah *aluvial* meliputi sekitar 10%, tanah regosol meliputi area seluas 5%, tanah *andosol* meliputi area seluas 8%, tanah *grumosol* sebesar 32%, dan tanah *mediteran* merah kuning seluas 45 % dari seluruh wilayah kabupaten.

c. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum 33 ° C dan suhu rata-rata 23 ° C. Dengan bulan basah 4 sampai 5 bulan, sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Terdapat hujan selama 1 tahun yang tidak menentu, sehingga implikasinya sering terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk melakukan konservasi sumber daya air dan pengembangan embung-embung kecil untuk menahan air hujan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan sumber daya air

terutama pada musim kemarau baik untuk kebutuhan pengairan sawah maupun untuk kebutuhan lainnya.

d. Hidrologi

Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 bendungan dan 25 daerah irigasi, tetapi tidak sepanjang tahun dialiri air.

e. Kondisi Geologi

Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan laut Jawa bagian utara dan pegunungan bagian timur, memiliki beberapa macam kondisi geologi. Dari beberapa macam kondisi geologi tersebut, wilayah Kabupaten Rembang mempunyai kandungan mineral yang kaya akan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan yang terbesar adalah jenis *Alluvium* yang meliputi luas 45.470.783 ha atau 44,84 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang, kemudian potensi lain adalah *miosen fasiessedimen* yaitu seluas 32.125.000 ha atau 31,68%.

Sedangkan bahan galian golongan C yang ada berupa: *andesit* (di Kecamatan Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, dan Lasem), pasir kuarsa (di Kecamatan Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, dan Sluke), kapur (di Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, dan Sedan), trass (di Kecamatan Pancur, Kragan, dan Sluke), *phospat* (di Kecamatan Gunem, Sale, dan Pamotan), *ball clay* (di Kecamatan Bulu, Gunem, Sarang, dan Sedan), batu bara (di Kecamatan Gunem dan Sale), serta gipsum (di Kecamatan Gunem, Sarang, Sedan, dan Lasem).

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Rembang sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 619.091 jiwa yang terdiri dari 313.235 orang laki-laki dan 305.856 orang perempuan. Perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN REMBANG

Jenis data	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	666.225	688.308	617.067	612.334	619.091
- Laki-laki	336.004	346.873	322.902	309.724	313.235
- Perempuan	330.221	341.435	304.165	302.610	305.856

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan wilayah pantai Kabupaten Rembang sepanjang ± 62,5 Km yang banyak terkandung berbagai potensi hasil laut yang melimpah seperti ikan layang, tambang, kembung, selar, tongkol, cumi-cumi, kurisi, teri, manyung, layur, kakap dan rajungan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh keberadaan sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang pantai sebagai nelayan. Di Kabupaten Rembang terdapat 6 Kecamatan yang memiliki wilayah pantai yaitu : Kecamatan Kaliori, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang.

Dengan berbagai upaya secara maksimal, telah dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan dan potensi laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah produksi hasil tangkapan ikan yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan ini dimungkinkan karena disamping bertambahnya sarana dan prasarana penangkapan ikan juga dipengaruhi oleh penerapan metode penangkapan ikan yang dilaksanakan.

Disamping perikanan laut, Kabupaten Rembang juga memiliki potensi perikanan darat yang cukup besar diantaranya :

- a) Lahan pertambakan dengan luas potensi 2.625 ha dan luas produksi 2.396 ha dengan komoditas udang dan bandeng.
- b) Kolam ikan air tawar, yang tersebar di Kecamatan Pamotan, Sale, Rembang, Bulu dan Sulang dengan luas potensi 35,64 Ha. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini ditandai dengan luas

produksi yang masih dibawah kapasitasnya yaitu sebesar 27,40 Ha. Komoditas perikanan air tawar antara lain lele, nila dan tawes.

c) Terumbu karang, yang tersebar dalam 19 gugusan terumbu karang dengan total luas 227,7 km²

d) Komunitas mangrove seluas 221,54 Ha

Kegiatan budidaya perikanan di Kabupaten Rembang dilaksanakan melalui kegiatan budidaya ikan kolam dan budidaya ikan tambak serta budidaya rumput laut sebagai upaya dari rasionalisasi penangkapan ikan yang sudah mulai kecenderungan menurun untuk di daerah pantai. Disamping itu, di Kabupaten Rembang mempunyai potensi budidaya air payau, seperti komoditas udang, bandeng, kepiting dan lain-lain.

2) **Pertanian**

Komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Rembang umumnya berupa tanaman padi, sayur -sayuran, buah mangga, buah siwalan, buah duku woro, buah kawis. Sedangkan untuk peternakan berupa sapi potong, kambing dan domba, itik petelur, ayam kampung.

3) **Pertambangan**

Sebagian wilayah Kabupaten Rembang terdiri dari gunung kapur yang di dalamnya banyak mengandung berbagai galian tambang. Dari berbagai potensi galian tambang tersebut, sampai saat ini belum dapat diupayakan penambangannya secara maksimal, oleh karena itu dalam jangka kedepan apabila galian tambang dapat dimanfaatkan secara optimal, tentunya akan memberikan kontribusi khususnya terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Potensi galian tambang potensial yang terkandung di wilayah Kabupaten Rembang, antara lain: Pasir Kwarsa (Si O₂), Phospat (P₂ O₅), Ball Clay (Al₂ O₃), Batu Gamping (Ca CO₃), Batubara, Trass, Andesit, Tanah Liat / Lempung, Gypsum, Kalsit, Dolomit dan Lignit.

4) **Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat**

Kabupaten Rembang memiliki berbagai jenis potensi industri kecil dan kerajinan yang sangat unik dan menarik untuk dapat dikembangkan sehingga dapat dijadikan obyek yang dapat menarik investor untuk dapat masuk di Kabupaten Rembang. Banyak potensi industri yang berbasis pada sumber daya alam yang dapat dikembangkan sehingga dapat dijadikan keunggulan komperatif yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Industri tersebut antara lain : garam rakyat, pengolahan ikan, mebel antik, batik, bordir, kuningan, kerajinan kerang, terasi, genteng, pembuatan tas, dompet, sabuk dan lain-lain.

5) **Pariwisata dan seni budaya**

Beberapa lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Rembang, letaknya tersebar di berbagai lokasi, antara lain :

- a) Wisata Peninggalan Pra Sejarah : Situs Plawangan, Megalitikum Terjan
- b) Wisata Kartini : Museum Kartini, Makam Kartini
- c) Wisata Pantai & Pulau : Taman Rekreasi Pantai Dampo Awang, Pantai Karangjahe, Pantai Caruban, Pantai Binangun, Pantai Pasir Putih, Pantai Soka Pulau Gede dan Pulau Marongan
- d) Wisata Agama : Masjid Agung Rembang, Makam Sunan Bonang Petilasan Sunan Bonang Klentheng Tjoe Hwei Kiong, Klentheng Dasun Vihara Ratanavana Arama
- e) Wisata Hutan & Gua : Gua Pasucen Embung "Banyu Kuwung", Hutan Wisata Sumber Semen Hutan Wisata Mantingan.

Masyarakat di Kabupaten Rembang memiliki beraneka ragam budaya daerah, mulai dari budaya daerah yang bernuansa keagamaan hingga budaya daerah yang bernuansa adat-istiadat, Budaya masyarakat banyak dipengaruhi nuansa keagamaan/kepercayaan dan adat-istiadat setempat.

Event-event budaya di Kabupaten Rembang, antara lain:

- a) Acara Syawalan / Lomban

Acara ini diselenggarakan setiap tanggal 5,6,7 dan 8 Syawal bertempat dilokasi obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Dampo Awang, yang dimeriahkan dengan hiburan musik, hiburan anak-anak, dan kesenian tradisional.

- b) Penjamasan Bende Becak

Benda pusaka Sunan Bonang berupa "bende" yang diberi nama "Bende Becak" berukuran garis tengah 10 cm. Zaman dahulu bende ini berfungsi sebagai alat mengumpulkan para wali atau sebagai tanda pemberitahuan akan terjadinya sesuatu peperangan/musibah. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah (Hari Raya Idul Adha) pukul 09.00 WIB diadakan upacara penjamasan di rumah juru kunci makam Sunan Bonang. Pada upacara ini dibagi-bagikan ketan kuning serta memperebutkan air bekas penjamasan Bende Becak.

Kabupaten Rembang juga memiliki berbagai makanan khas (kuliner) yang mungkin tidak terdapat di daerah lain, yang secara umum bahan bakunya berasal dari hasil produksi lingkungan alam setempat. Beberapa contoh makanan khas dari Rembang adalah sate sarepeh, mangut, sayur merica, lontong tuyuhan, dumbeg, kaoya dudul, gula semut.

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rembang selama 3 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.3
PDRB KABUPATEN REMBANG SERI 2010
ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA
(dalam jutaan rupiah)

Kategori	URAIAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013*	TAHUN 2014**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.042.784,22	3.171.162,16	2.992.144,79
	1. Pertanian, peternakan, Perburuan dan jasa Pertanian	2.352.539,65	2.444.806,58	2.260.717,90
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	88.453,00	92.396,27	91.725,58
	3. Perikanan	601.791,57	633.959,31	639.701,30
B	Pertambangan dan Penggalian	276.355,61	291.765,56	310.767,69
C	Industri Pengolahan	1.693.226,77	1.863.045,88	2.143.284,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.924,66	8.733,72	9.201,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.448,74	5.438,49	5.546,09
F	Konstruksi	708.583,25	677.377,74	776.630,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.310.768,41	1.351.957,53	1.406.724,91
H	Transportasi dan Pergudangan	339.533,66	375.320,78	414.922,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	284.037,18	302.419,11	336.231,73
J	Informasi dan Komunikasi	112.696,95	124.069,69	145.366,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	362.871,11	383.294,92	407.251,89
L	Real Estate	94.742,88	99.192,48	105.520,70
M,N	Jasa Perusahaan	22.547,27	26.308,16	28.188,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	380.889,43	384.053,41	386.621,53
P	Jasa Pendidikan	365.528,95	423.906,11	486.880,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94.360,92	102.304,22	120.619,36
R,S,T,U	Jasa Lainnya	174.863,25	188.600,44	206.282,10
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.277.163,23	9.778.950,39	10.282.184,04

Sumber : BPS Kabupaten Rembang

E. Kelembagaan Perangkat Daerah

Bersandar pada prinsip – prinsip otonomi daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mendukung tugas – tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas – tugas pembantuan lainnya maka sebagai implementasinya ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 serta dilengkapi pula

dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Adapun perangkat daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD.

3. Dinas Daerah.

Dinas Daerah di Kabupaten Rembang terdiri-dari :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Pekerjaan Umum
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
8. Dinas Pertanian dan Kehutanan
9. Dinas Kelautan dan Perikanan
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Inspektorat
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip
10. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno
11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
12. Satuan Polisi Pamong Praja
13. Kecamatan
14. Kelurahan

F. Aparatur Pemerintah Daerah

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak terlepas dari dukungan personil aparat pemerintahan. Untuk itu, Kabupaten Rembang memiliki 8.247 Pegawai Negeri Sipil yang siap mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Adapun kualifikasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang per Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel I.4
Strata Pendidikan PNS Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015

No	Golongan	Jumlah
1	SD	153
2	SLTP	335
3	SLTA	1.722
4	Diploma	1.646
	S1	4.164
	S2	227
Jumlah		8.247

Tabel I.5
Jumlah PNS Per Golongan
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015

No	Golongan	Jumlah
	Golongan I	222
	Golongan II	1.730
	Golongan III	3.586
	Golongan IV	2.709
Jumlah		8.247

Adapun untuk pendidikan pejabat yang ada di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.6
Strata Pendidikan Pejabat Struktural
Pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II.a	-
2	Eselon II.b	22
3	Eselon III.a	47
4	Eselon III.b	82
5	Eselon IV.a	358
6	Eselon IV.b	80
8	Eselon V.a	42
Jumlah		631

G. Permasalahan/Isu Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dalam masing-masing prioritas pembangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB

URUSAN PENDIDIKAN

- 1) Faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa yang masih rendah sehingga tidak bisa mempertahankan anaknya untuk bersekolah.
- 2) Pembinaan pendidikan inklusi belum optimal.
- 3) Penanganan anak kebutuhan khusus belum optimal.
- 4) Pembinaan SDM Pendidikan belum optimal.
- 5) Menurunnya minat baca siswa dan generasi muda.
- 6) Masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua.
- 7) Belum ada standar/acuan bagi sekolah dalam penyusunan RAPBS.

URUSAN KESEHATAN

- 1) Derajat kesehatan masih berada dibawah rata-rata provinsi. Untuk itulah Pemkab Rembang perlu mewaspadaai hal yang terkait program kesehatan yang akan memiliki tantangan tersendiri mengingat permasalahan kesehatan semakin variatif dan kompleks dari tahun ke tahun. Selain itu, terdapat kecenderungan stagnasi perbaikan dalam pencapaian indikator baik indikator AKI, AKB maupun AKABA.
- 2) Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja karena permasalahan kesehatan banyak dipengaruhi

dari berbagai masalah di luar kesehatan, sehingga perlu dukungan dari berbagai sektor di luar kesehatan. Peran sektor swasta dan sektor pemerintah di luar kesehatan dalam pembangunan berwawasan kesehatan, masih belum optimal.

- 3) Masih terdapat prevalensi gizi buruk di Rembang. Hal tersebut sejalan dengan realita bahwa kemiskinan di Rembang masih cukup tinggi. Selain itu terjadi kecenderungan meningkatnya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih.
- 4) Implementasi Pola Hidup Bersih dan Sehat untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman risiko penyakit masih belum sepenuhnya baik. Implementasi tersebut melibatkan beberapa aspek diantaranya pola makan keluarga, kesehatan lingkungan (sanitasi dan akses air bersih), pencegahan penyakit menular, aktifitas fisik, penggunaan obat, jaminan kesehatan dan lain sebagainya yang perlu ditingkatkan
- 5) Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rembang memerlukan dukungan dari berbagai pihak.
- 6) Sistem rujukan kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan kasus rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit semakin meningkat.
- 7) Kemampuan anggaran yang belum merata berpengaruh pencapaian target pembangunan kesehatan.
- 8) Selisih klaim Jamkesda / Jampersal pasien yang bermasalah sehingga mengakibatkan piutang rumah sakit tidak tertagih.
- 9) Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang masalah kesehatan jiwa dan deteksi dini-nya. Masyarakat baru memahami masalah kesehatan jiwa terbatas pada masalah gangguan jiwa (psikotik).

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan memperbesar ongkos produksi sehingga memperkecil keuntungan atau menghambat investasi. Pemahaman yang seperti ini merupakan tantangan dalam upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 2) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kesadaran dan keterlibatan berbagai pihak, lintas pelaku, lintas wilayah administrasi serta lintas kepentingan. Tanpa adanya keterlibatan aktif dan keterpaduan secara luas dari berbagai pihak, maka tingkat keberhasilannya relatif kecil.

- 3) Pola pikir, sikap dan perilaku sebagian besar warga kita yang masih belum berorientasi kuat dan mengedepankan aspek lingkungan. Kondisi ini menyebabkan program pengelolaan lingkungan hidup tidak cepat mendapat respon positif dan berkembang di masyarakat.

URUSAN PEKERJAAN UMUM

- 1) Adanya keterbatasan sumber air baku air minum di Kabupaten Rembang khususnya yang selama ini menggantung pada sumber mata air Semen dan sumber air baku permukaan (embung dan sungai).
- 2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta keterbatasan kapasitas keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pengembangan cakupan pelayanan air limbah terpusat.
- 3) Manajemen jasa pengujian belum optimal.
- 4) Belum optimalnya pemahaman pihak-pihak terkait terhadap regulasi jasa konstruksi.
- 5) Belum optimalnya penyediaan data dan updating terbaru terkait informasi permukiman dan bahan bangunan.

URUSAN PENATAAN RUANG

- 1) Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- 2) Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 1) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan karena masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD.
- 4) Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral.

- 5) Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
- 6) Belum optimalnya evaluasi perencanaan pembangunan terhadap perencanaan pembangunan kabupaten.
- 7) Belum adanya tenaga fungsional perencana di Bappeda.

URUSAN PERUMAHAN

- 1) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- 2) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung.
- 3) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 1) Belum adanya bantuan permodalan untuk pemuda sebagai tindak lanjut pelatihan kewirausahaan.
- 2) Sarana latihan para atlet semakin berkurang.
- 3) Pembibitan atlet masih memerlukan optimalisasi;

URUSAN PENANAMAN MODAL

- 1) Identifikasi potensi investasi sektor unggulan di Kabupaten Rembang masih memerlukan telaah lebih lanjut.
- 2) Peluang-peluang investasi yang sudah ada belum detail dan jelas.
- 3) Permasalahan lahan, di mana umumnya masalah klasik yang dihadapi oleh investor adalah minimnya ketersediaan tanah/lahan terkait dengan luas wilayah dan harga tanah di Rembang yang cenderung semakin mahal.
- 4) Belum adanya aturan khusus terkait peningkatan iklim investasi di Kabupaten Rembang

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- 1) Pengurus dan pengelola koperasi rata-rata masih belum profesional dalam pengelolaan kegiatan usaha dan kurang memahami kewirausahaan.
- 2) Belum semua koperasi melaksanakan kemitraan usaha antar koperasi yang sebenarnya potensinya cukup besar.

- 3) Pengurus koperasi rata-rata belum mampu memanfaatkan dan menangkap peluang usaha serta belum mampu mencari terobosan usaha baru.
- 4) Terbatasnya kemampuan, ketrampilan, pengetahuan UMKM untuk mengelola usahanya.
- 5) Lemahnya UMKM untuk mengakses Permodalan ke Lembaga Keuangan Bank/Non Bank karena terbatasnya Pengetahuan dan Pemenuhan persyaratan yang harus di penuhi oleh UMKM.
- 6) Belum semua UMKM memahami pentingnya HAKI dan sertifikasi halal.
- 7) Lemahnya pengetahuan terhadap proses ekspor produk UMKM ke luar negeri/ kerjasama dengan buyer dan terkendalanya bahasa asing yang dikuasainya.

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 1) Masih terjadi keterlambatan pencatatan dan pelaporan perkawinan pemeluk agama non Islam.
- 2) Aplikasi SIAK yang merupakan sistem program yang bersifat nasional sering menemui berbagai kendala.
- 3) Jaringan komunikasi database kependudukan khususnya di wilayah kecamatan yang memiliki topografi pegunungan belum terkoneksi dengan baik.
- 4) Masih terbatasnya pemahaman pelaksana administrasi kependudukan mengenai SIAK secara on line dan jaringan komunikasi database kependudukan bagi petugas kecamatan.

URUSAN KETENAGAKERJAAN

- 1) Data pengangguran yang tidak berdasar nama (by name) atau kurang akurat, serta sistem informasi pendukung yang kurang menyebabkan sulitnya mendata calon peserta kegiatan.
- 2) Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja, sehingga sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, daerah, maupun luar negeri, dan menyebabkan sulitnya penempatan.
- 3) Kurangnya semangat dan inovasi kewirausahaan para pencari kerja maupun buruh atau pengusaha kecil, sehingga perluasan kesempatan kerja belum dapat maksimal, sementara penempatan kerja masih tergantung pada investor yang masuk.
- 4) Produktivitas tenaga kerja yang masih relatif rendah membuat banyak kesempatan kerja lokal justru diisi tenaga kerja luar daerah.
- 5) Masih adanya pengusaha dan pekerja yang kurang bisa memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja.

- 6) Kurangnya fungsi pemberdayaan masyarakat (community development) maupun tanggung jawab sosial (social responsibility) dari perusahaan, sehingga penerimaan magang di perusahaan belum dapat maksimal.

URUSAN KETAHANAN PANGAN

- 1) Perlunya pemantapan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan para pihak.
- 2) Masih munculnya kesulitan dalam pendataan keluar masuk bahan pangan dari dan ke Rembang karena data yang diperoleh dari jembatan timbang masih sangat terbatas baik komoditas maupun keakuratan datanya.
- 3) Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman (3BA).
- 4) Masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu.
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengkonsumsi/memproduksi makanan yang aman, bermutu dan halal.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal.
- 2) Pemahaman aparat tentang penyelenggaraan Data Pilah Gender dan Anak sebagai data pembuka wawasan dalam penyusunan PPRG masih rendah.
- 3) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani P2TPA dari tahun ke tahun semakin meningkat.
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak (UUPA, UUPKDRT, UUPTPPO).

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

- 1) Rendahnya partisipasi pria terhadap program KB dan Kesehatan Reproduksi, serta masih dominannya pemakaian kontrasepsi dengan metode sederhana misalnya melalui Pil dan Suntik.
- 2) Rendahnya tingkat pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi, hal ini dapat dilihat dari hasil survei perilaku BPMPKB bahwa 84,20% remaja menyatakan perlu pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah.
- 3) Program penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan BKB mengalami penurunan akibat kurang tersosialisasikannya secara merata, rutin dan berkesinambungan.

URUSAN PERHUBUNGAN

- 1) Ketersediaan moda angkutan umum yang dapat menjangkau kawasan pedesaan dan perbatasan.
- 2) Rendahnya ketaatan terhadap batas maksimal muatan (tonase).
- 3) Minimnya kesadaran pengguna kendaraan dalam disiplin berlalulintas.

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Belum terintegrasinya aplikasi online di setiap SKPD.
- 2) Kondisi jaringan masih lemah dikarenakan masih sangat tergantung dengan pihak lain.
- 3) SDM yang memiliki kemampuan TI relatif sedikit.

URUSAN PERTANAHAN

- 1) Masih banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, belum semua permasalahan yang masuk bisa ditangani.
- 2) Masih ada kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, serta masih ditemuinya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonannya.

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

- 1) Belum adanya keterpaduan antar daerah dalam rangka melakukan koordinasi dan saling tukar menukar informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaan orang asing didaerahnya masing-masing.
- 2) Kasus pencurian kendaraan bermotor masih merupakan kasus yang menonjol. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal diantaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial.
- 3) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 4) Terdapat Perda yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda.
- 5) Permasalahan dengan Kabupaten yang berbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

- 1) Substansi PP 38 Tahun 2007 belum implementatif masih menimbulkan multitafsir karena bahasa antara bidang urusan satu dengan bidang yang lain berbeda-beda ada yang menggunakan bahasa program dan ada yang menggunakan bahasa kegiatan. Juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh sektor atau kementerian masih ada yang tidak sinkron dengan PP 38 Tahun 2007 sehingga menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Petunjuk operasional PP 38 Tahun 2007 seperti NSPK dan SPM sangat terlambat keluarnya, bila ada/telah keluar tidak disosialisasikan ke daerah-daerah.

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan beban kerja urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang belum secara optimal.
- 2) Masih banyak program kegiatan dari Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri yang dibebankan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat belum dapat tertangani secara keseluruhan.
- 3) Koordinasi program dan kegiatan dengan kabupaten/kota belum optimal, dikarenakan SKPD kabupaten/kota yang mengampu urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masih tersebar di beberapa SKPD.

URUSAN SOSIAL

- 1) Program Pengentasan kemiskinan melalui Pola Konsentrasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 2) Penanganan masalah kemiskinan melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) maupun Kelompok Usaha Bersama (KUBE) belum mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait.
- 3) Pendampingan PMKS belum dilakukan secara berkesinambungan dan belum optimal, sedangkan penanganan PMKS harus dilakukan pendampingan yang berkelanjutan.
- 4) Data monitoring dan evaluasi hasil penanganan program dan kegiatan yang dilakukan, belum terpetakan tingkat perkembangan, keberhasilan atau kegagalannya.

- 5) Keberadaan UPTD belum dikembangkan secara optimal untuk memberikan pelayanan kepada klien maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial.

URUSAN KEBUDAYAAN

- 1) Belum tersusunnya Draft Review Master Plan Museum dengan pengelolaan berstandar internasional yakni Museum Kartini sehingga pedoman untuk menuju berstandar internasional belum ada.
- 2) Belum ditetapkannya cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang oleh Kementrian Terkait BCB walaupun inventarisasi mengenai cagar budaya telah tersedia.

URUSAN STATISTIK

- 1) Urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sehingga dalam rangka pertanggungjawaban produk data, sering terjadi perbedaan angka atau data.
- 2) Sifat data statistik yang dinamis, berakibat pada sulitnya penentuan data akhir secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Beberapa data statistik dalam pengadaannya sangat komprehensif, sehingga dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan angka akhir dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini berakibat pada beberapa data penting belum dapat diwujudkan.
- 4) Sering terjadi tuntutan peraturan perundang-undangan tentang kebutuhan data guna berbagai kepentingan saling tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hal ini berakibat munculnya ragam data yang sangat banyak, dan menyulitkan dinas, instansi, lembaga terkait penanggung jawab data dalam penyediaannya.

URUSAN KEARSIPAN

- 1) Sampai dengan akhir tahun 2013 kapasitas gedung depo penyimpanan arsip dinamis dan arsip statis belum memadai. Saat ini penyimpanan arsip dilakukan di Ruang Hall (terbuka) akibatnya memperpendek umur arsip.

URUSAN PERPUSTAKAAN

- 1) Minimnya jumlah tenaga fungsional tertentu (pustakawan dan arsiparis) yang tersedia. Akibat dari kekurangan tenaga fungsional, maka pengelolaan kearsipan dan pelayanan perpustakaan kurang maksimal.

- 2) Pengembangan perpustakaan oleh Pemda Rembang masih kurang menyentuh sampai ke tingkat desa/kelurahan, sehingga pertumbuhan perpustakaan desa/kelurahan masih tersendat-sendat.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

URUSAN PARIWISATA

- 1) Persaingan antar wilayah di Indonesia dalam bidang kepariwisataan.
- 2) Tingkat kejenuhan wisatawan terhadap ODTW yang ada di Rembang, sebagai akibat kurangnya diversifikasi ODTW yang ada.
- 3) Strategi promosi yang kurang efektif.
- 4) Sarana, prasarana dan akomodasi yang belum maksimal, misal kurangnya sarana transportasi ke dan dari ODTW di malam hari.
- 5) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Sadar Wisata dan Sapta Pesona.

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Produksi dan produktivitas masih rendah.
- 2) Overfishing penangkapan di jalur I atau perikanan pantai, berpotensi menimbulkan konflik antara pelaku usaha penangkapan.
- 3) Terbatasnya kemampuan nelayan dan pembudidaya ikan dalam tingkat pendidikan serta penguasaan teknik tangkap dan budidaya, serta ketidakmampuan mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi maju, khususnya di bidang aqua bisnis, sehingga mengalami hambatan dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain.
- 4) Masih lemahnya kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan yang menyebabkan terhambatnya upaya meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf hidup.
- 5) Sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti terbatasnya pelabuhan perikanan, kapal serta alat tangkap bagi nelayan, sehingga nelayan belum mampu menjangkau jalur yang lebih jauh yang memiliki potensi ikan yang masih banyak.
- 6) Perubahan iklim global yang sangat mempengaruhi produksi penangkapan di laut.
- 7) Terbatasnya akses modal nelayan dan pembudidaya ikan.

URUSAN PERTANIAN

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian SDM pertanian meliputi petani dan petugas. Sebagian besar petani di Kabupaten Rembang berusia lanjut dengan pendidikan relatif rendah. Minat generasi muda untuk bekerja di sektor

pertanian rendah, terutama pada sisi on-farm (budidaya). Selain itu, jumlah petugas Penyuluh dan Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) makin terbatas, dengan angka pensiun yang tidak berimbang dengan perekrutan petugas baru sehubungan dengan moratorium rekrutmen PNS. Akibatnya, rasio antara petugas dan petani/kelompok tani jauh dari ideal yaitu satu desa satu petugas.

- 2) Adopsi teknologi budidaya dan teknologi pascapanen/pengolahan Petani pada umumnya masih menggunakan cara-cara yang sudah terbiasa dilakukan secara turun-temurun. Petani akan mengadopsi teknologi terbaru apabila sudah meyakini benar dan sudah terbukti bahwa teknologi baru tersebut benar-benar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan teknologi yang sudah diyakini selama bertahun-tahun. Temuan teknologi terbaru belum secara cepat dapat diinformasikan ke tingkat lapang.
- 3) Akses terhadap permodalan Sumber utama pembiayaan usahatani sebagian besar berasal dari modal sendiri. Sementara itu pemerintah telah menyediakan beberapa skema pembiayaan/SKIM kredit bagi petani/peternak dengan bunga yang relatif rendah dibanding skim kredit komersial. Skema pembiayaan usahatani antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Perbibitan Sapi (KUPS). Namun demikian, penyerapan skema kredit tersebut belum maksimal karena bank-bank penyalur mensyaratkan agunan ataupun penjaminan kepada petani/peternak, sehingga petani/peternak belum dapat secara maksimal memanfaatkan kredit dimaksud.
- 4) Jaringan Irigasi Jaringan irigasi tersier pada saat ini sebagian besar merupakan jaringan irigasi yang dibangun pada beberapa puluh tahun yang lalu, atau merupakan jaringan irigasi sangat sederhana yang dibangun secara swakarsa oleh masyarakat. Saat ini cukup banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi secara optimal, karena mengalami kerusakan. Di sisi lain kondisi jaringan irigasi tersier masih banyak yang belum permanen atau terbuat dari tanah sehingga memperlambat aliran air bahkan menyebabkan kebocoran di sepanjang saluran yang mengakibatkan ketidakmerataannya pembagian air sejak hulu hingga hilir.
- 5) Jalan Pertanian di sebagian besar wilayah perdesaan jalan pertanian belum memadai sehingga terjadi inefisiensi dalam pengelolaan usahatani maupun dalam pemasaran hasil pertanian.
- 6) Penggunaan pupuk anorganik dan pestisida kimiawi. Ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik maupun pestisida kimiawi masih cukup tinggi dalam budidaya, bahkan untuk komoditas tertentu penggunaannya melampaui jumlah yang direkomendasikan, sehingga menyebabkan biaya produksi tinggi dan kerusakan ekosistem.

URUSAN KEHUTANAN

- 1) Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang dan masih terjadi pencurian kayu hutan.
- 2) SDM dan kelembagaan petani hutan dan kebun masih belum sepenuhnya melaksanakan pengelolaan hutan sesuai fungsi dan agribisnis perkebunan secara utuh.
- 3) Produksi dan produktifitas tanaman perkebunan secara keseluruhan belum sesuai standar teknis.
- 4) Produk primer dan atau produk olahan perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi standar mutu.
- 5) Daya dukung lahan, air dan hutan masih belum optimal sesuai yang diharapkan sehingga perlu terus ditingkatkan.

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 1) Masih terdapat dusun yang sebagian besar KK nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang, karena pembangunan jaringan listrik di wilayah-wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar.
- 2) Masih terjadinya ketidaklancaran distribusi LPG tabung 3 Kg di beberapa wilayah terpencil yang disebabkan karena belum optimalnya pengawasan dan belum meratanya sebaran penyalur/agen dan sub penyalur/pangkalan.
- 3) Kegiatan usaha pertambangan belum dilaksanakan secara optimal.
- 4) Rehabilitasi lahan bekas tambang kurang optimal.

URUSAN INDUSTRI

- 1) Terbatasnya kemampuan SDM pembina industri dalam penguasaan manajemen bisnis.
- 2) Pengusaha IKM lebih memprioritaskan pada aspek produksi.
- 3) Umumnya IKM masih lemah dalam desain, inovasi dan kreativitas produk.
- 4) Dalam berproduksi sebagian besar pengusaha hanya berdasarkan Job Order/Buyer Minded.
- 5) Kemitraan Usaha pemasaran masih minim sehingga jaringan pasar masih terbatas.
- 6) Kemampuan promosi IKM masih terbatas, disebabkan biaya promosi dianggap relatif mahal.
- 7) Program pengembangan HAKI masih kurang optimal karena manfaat HAKI belum begitu dirasakan oleh perajin, terbatasnya dukungan dengan bantuan

pendaftaran merk, sosialisasi HAKI serta operasional klinik HAKI juga kurang optimal.

URUSAN PERDAGANGAN

- 1) Gejolak harga bahan pokok yang terjadi setiap tahun cukup menjadi permasalahan yang harus di minimalkan meskipun hal tersebut tidak bisa dihindari terkait pada setiap adanya menjelang hari-hari besar agama, pergantian tahun, permintaan yang meningkat dan persediaan barang yang kurang memadai. Pengaruh cuaca yang mengakibatkan produksi bahan pokok menurun juga mengakibatkan terjadi gejolak harga.
- 2) Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif, sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah, disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi dan fluktuasi harga belum terkendali.
- 3) Sarana dan Prasarana khususnya pergudangan keberadaannya belum merata ke semua kecamatan, khususnya untuk pergudangan komoditi primer seperti hasil pertanian.
- 4) Pembinaan dan pengawasan sistem penjualan langsung belum optimal.
- 5) Pengembangan pasar tradisional cukup dipengaruhi oleh adanya persaingan dengan munculnya pasar modern/toko modern yang cukup banyak, mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional.
- 6) Keberadaan sektor informal yang bergerak di usaha perdagangan belum sepenuhnya menerima pembinaan yang semestinya, karena keterbatasan anggaran dan besarnya unit usaha yang harus dibina.

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

- 1) Kondisi di lokasi transmigrasi kadang masih dijumpai tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan, sehingga tidak sesuai dengan azas 2C (Clear and Clean) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha). Hal ini mendorong terjadi keresahan transmigran.
- 2) Persiapan lokasi permukiman dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini menyebabkan penumpukan kegiatan pengerahan dan pemindahan calon transmigran di akhir tahun anggaran. Hal ini mengakibatkan penyerapan anggaran dan pertanggungjawaban menumpuk pada akhir tahun anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 merupakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif berwawasan 5 tahunan, yang digunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Rembang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 2010-2015. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahun.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Agenda Pembangunan dan Prioritas Program Pembangunan Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2010. Di samping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan serta prioritas program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud, adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

A. VISI DAN MISI

Dengan memperhatikan kondisi umum daerah Kabupaten Rembang, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah lima tahun kedepan telah dirumuskan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : "**Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera**". Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. **Rembang yang Maju**, Kabupaten Rembang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan tingkat pelayanan publik yang memuaskan, didukung oleh sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan demokratis, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi.
2. **Rembang yang Mandiri**, adalah Kabupaten Rembang memiliki proporsi PAD yang semakin besar dalam pendapatan daerah dan surplus bahan pangan khususnya palawija dan produk peternakan dengan tetap mempertahankan swasembada padi dan jagung serta produk perikanan yang telah dicapai. Dari sektor industri ditunjukkan oleh pemakaian bahan baku lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku impor dalam proses produksinya.

3. **Rembang yang Dinamis**, adalah Kabupaten Rembang mampu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.
4. **Rembang yang Sejahtera**, adalah kondisi Kabupaten Rembang dengan masyarakat yang bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan lahir ditunjukkan oleh tingginya derajat kesehatan, tingginya tingkat pendapatan per kapita, kecukupan sandang, pangan dan papan (perumahan). Sedangkan kebahagiaan batin yang dimaksudkan adalah tingginya religiusitas atau penghayatan terhadap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber-sumber pendapatan non konvensional dan tidak membebani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-front City .
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

B. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang.
2. Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM

3. Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam rangka pengembangan wilayah pesisir.
5. Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
6. Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan.
8. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh
10. Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah
11. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai

C. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada.

Tujuan-1: Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Rembang. Sasarannya adalah :

1. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.
2. Promosi peluang investasi.
3. Terjaminnya keamanan berusaha.
4. Tersedianya infrastruktur yang memadai.
5. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.

Tujuan-2: Meningkatkan penyaluran modal bagi pelaku UMKM. Sasarannya adalah :

1. Penyediaan informasi ketersediaan dana pada perbankan dan pelayanan non bank serta persyaratan pengajuan pinjaman.

2. Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.
3. Ketersediaan skim kredit sesuai dengan perilaku jenis usaha.
4. Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.
5. Dimilikinya legalitas asset pelaku usaha sebagai jaminan kredit.

Tujuan-3: Meningkatkan Iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Sasarannya adalah :

1. Jaminan keamanan oleh Pemda.
2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai.
3. Penyebaran sarana perbankan.

Tujuan-4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sasarannya adalah:

1. Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertaniandan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
2. Meningkatnya kemampuan petenai dalam pengelolaan usaha.
3. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Tujuan-5: Mengoptimalkan intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Meningkatnya efisiensi dalam penarikan pendapatan asli daerah.
3. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membanjiri masyarakat

Tujuan-6: Mengoptimalkan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan sarana penunjang pembelajaran, penyediaan beasiswa dan kerjasama dengan pengguna pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal. Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.
2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.
4. Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.

5. Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.

Tujuan-7: Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan. Sasarannya adalah :

1. Tersedianya tenaga medis yang memadai.
2. Tersedianya obat-obatan yang memadai.
3. Tersedianya peralatan medis yang memadai.
4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.
5. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.
6. Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Tujuan-8: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompeten, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.
2. Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.

Tujuan-9: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrasturktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas saluran irigasi.
3. Meningkatnya kualitas saluran drainase.
4. Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan.

Tujuan-10: Mengembangkan tata kelola wilayah pesisir yang mampu menjadi pemicu pergerakan ekonomi daerah. Sasarannya adalah :

1. Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *seafront city*.
2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.
3. Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.
4. Terwujudnya kawasan wisata bahari.

Tujuan-11: Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan proaktif dalam mengantisipasi

perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai. Sasarannya adalah :

1. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.
2. Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.
3. Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.
4. Responsif terhadap perkembangan situasi.
5. Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.
6. Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, bahwa dalam rangka mencapai visi "Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera", telah ditetapkan 11 (sebelas) rumusan tujuan yang merupakan rincian atas visi sebagai *ultimate goal*. Untuk itu dalam pencapaian tujuan tersebut telah dirumuskan pentahapan pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sasaran antara (*milestone*) dalam pencapaian visi pembangunan Kabupaten Rembang.

Penyusunan tahapan pembangunan tersebut merupakan perumusan prioritas pencapaian tujuan, yang memiliki arti bahwa tujuan tersebut diupayakan dapat diselesaikan pada tahap yang bersangkutan, serta untuk menunjukkan pemusatan perhatian pembangunan daerah, agar mendapatkan dukungan segenap stakeholder pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan yang lain.

Sesuai pentahapan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, pada tahun 2015 adalah tahun kelima memasuki tahap ketiga bagi upaya terwujudnya masyarakat Rembang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia di segala bidang kompetensi, profesional, mandiri dan bermanfaat dengan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangan tatakelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan serta proaktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi komunikasi dan informasi yang memadai.

Sedangkan untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2014 sebagai berikut :

E. PRIORITAS DAERAH

1. PRORITAS I

Prioritas I merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja Kepala Daerah pada aspek kebijakan sesuai prioritas tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015, meliputi :

1 Pendidikan

- 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 3 Program Pendidikan Menengah.
- 4 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2 Kesehatan

- 1 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- 2 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan.
- 3 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
- 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Soetrasno.

3 Pekerjaan Umum

- 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- 3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- 4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

4 Perumahan

- 1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

5 Perencanaan Pembangunan

- 1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- 2 Program Kerjasama Pembangunan.
- 3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
- 4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- 5 Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

6 Perhubungan

- 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

- 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

7 Lingkungan Hidup

- 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH.
- 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- 3 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
- 4 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana.
- 5 Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik.
- 6 Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

8 Ketenagakerjaan

- 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

9 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- 2 Program Peningkatan Pelayanan Publik.
- 3 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- 4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
- 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- 7 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi
- 8 Program Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru
- 9 Program Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen.
- 10 Program Pengembangan Sistem Distribusi.
- 11 Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri.

10 Penanaman Modal

- 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- 3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

- 4 Program Pengendalian Penanaman Modal.
 - 5 Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - 6 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - 7 Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Publik.
- 11 **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**
- 1 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
 - 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 12 **Ketahanan Pangan**
- 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 13 **Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- 1 Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan.
 - 2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
 - 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa
- 14 **Pertanian**
- 1 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian/ Perkebunan.
 - 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
 - 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - 4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
 - 5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
 - 6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
 - 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit dan Tanaman.
 - 8 Program Pengembangan Pertanian Unggulan.
 - 9 Program Perencanaan Pembangunan Pertanian.
 - 10 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - 11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
 - 12 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan
 - 13 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah
- 15 **Energi dan Sumber Daya Mineral**
- 1 Program Pengelolaan Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 2 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

16 Pariwisata

- 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- 2 Program Pengembangan Kemitraan.

17 Kelautan dan Perikanan

- 1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- 2 Program Pengembangan Perikanan Budidaya
- 3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- 4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

- 5 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
- 6 Program Kelestarian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.

18 Perdagangan

- 1 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.
- 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.

19 Industri

- 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- 2 Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi.
- 3 Program Penataan Struktur Industri dan kawasan Industri.

2. PRORITAS II

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Program-program prioritas II meliputi :

1 Pendidikan

- 1 Program Pendidikan Non Formal.
- 2 Program Pendidikan Luar Biasa.

2 Kesehatan

- 1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

- 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- 8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 9 Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- 10 Program Peningkatan Kesehatan Lansia.

3 Pekerjaan Umum

- 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- 2 Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong.
- 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong.
- 4 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- 5 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- 6 Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

4 Penataan Ruang

- 1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5 Perencanaan Pembangunan

- 1 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan.
- 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 3 Program Perencanaan Sosial dan Budaya.
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

6 Perhubungan

- 1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- 2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
- 3 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- 4 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas.
- 5 Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.

7 Lingkungan Hidup

- 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- 2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

- Alam dan Lingkungan Hidup.
- 3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
 - 4 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Hutan.
 - 5 Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - 6 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
 - 7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 8. Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama Informasi dan Media Massa.

8 Kependudukan Catatan Sipil

- 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan.

10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Berbagai Bidang Pembangunan.
- 2 Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak Kekerasan.
- 3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring Serta Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak.

11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- 2 Program Sarana dan Prasarana Pendukung KB.
- 3 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

12 Sosial

- 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- 3 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya).
- 4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
- 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

13 Kebudayaan

- 1 Program Pembinaan Tradisi, Pengembangan Nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya.
- 2 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

- 3 Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

14 Kepemudaan dan Olahraga

- 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
- 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- 3 Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- 4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah raga.
- 5 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah raga.
- 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga.

15 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
- 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
- 4 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).
- 5 Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 6 Program Penegakan Peraturan Daerah.

16 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

- 1 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.
- 2 Program Pemberdayaan dan Peningkatan sarana Prasarana Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya.
- 3 Program Penguatan Lembaga Agama.
- 4 Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan sosial Kemasyarakatan.
- 5 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan.
- 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia
- 7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 8 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana
- 9 Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan .
- 10 Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur.
- 11 Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik.
- 12 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- 13 Program Pengembangan Data / Informasi Perencanaan.
- 14 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan.

- 15 Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Desa.
- 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 17 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- 18 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah Dan Pelayanan Umum
- 19 Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa
- 20 Program Peningkatan Sarana Pemerintahan
- 21 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum
- 22 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 23 Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 24 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 25 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah.
- 26 Program Pengembangan Iklim Investasi dan Dunia Usaha.
- 27 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
- 28 Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.
- 29 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
- 30 Program Penegakan Peraturan Daerah
- 31 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 32 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan
- 33 Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 34 Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- 35 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 36 Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah
- 37 Program Peningkatan Pengadaan & Pemanfaatan Barang Daerah
- 38 Program Peningkatan Penyelenggaraan Adm. Pengelolaan Barang Daerah
- 39 Program Pembinaan dan Pengembangan Tata Laksana
- 40 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- 41 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - 42 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan
 - 43 Program Pendidikan Kedinasan
 - 44 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 45 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 17 **Pemberdayaan Masyarakat Desa**
- 1 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
 - 2 Program Penanggulangan Kemiskinan.
 - 3 Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa.
 - 4 Program Pengelolaan Lingkungan Sosial.
 - 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
- 18 **Statistik**
- 1 Program Pengembangan Data/Informasi.
- 19 **Kearsipan**
- 1 Program Pengkajian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan.
 - 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen arsip Daerah.
- 20 **Komunikasi dan Informatika**
- 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - 2 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - 3 Program Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
- 21 **Keperpustakaan**
- 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- 22 **Pertanian**
- 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- 23 **Kehutanan**
- 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
 - 2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- 24 **Energi dan Sumber Daya Mineral**
- 1 Program Pembinaan dan Pengawasan Air tanah.
 - 2 Program Inventarisasi Air Tanah dan Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah
 - 3 Program Pengembangan Air Tanah
 - 4 Program Peningkatan Pelayanan Pemanfaatan Air Tanah

- 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
- 6 Program Peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan
- 7 Program Pengembangan Bidang Minyak dan Gas
- 8 Program Pengelolaan Geologi Teknik dan Lingkungan
- 9 Program Pengelolaan Bencana Geologi
- 10 Pengelolaan Sistem Informasi Geografi (SIG) ESDM

25 **Pariwisata**

- 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

26 **Kelautan dan Perikanan**

- 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
- 2 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat.
- 3 Program Peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan.
- 4 Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan.
- 5 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- 6 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya.
- 7 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- 8 Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan.
- 9 Program Pengembangan Sarana Statistik Perikanan.
- 10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- 11 Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

27 **Perdagangan**

- 1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- 3 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan.
- 4 Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan.
- 5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi.
- 6 Program Program Promosi Produk Unggulan Daerah.
- 7 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Swasta Maupun Masyarakat Untuk Pembiayaan Pembangunan Sarana Perdagangan.

28 Industri

- 1 Program Peningkatan Kemampuan Tehnologi Industri.
- 2 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
- 3 Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif.

29 Ketranasmigrasian

- 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

3. PRORITAS III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga.

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Untuk mewujudkan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah ditetapkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati Rembang pada awal Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.	Tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	100
	Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	9
	Prosentase sistem informasi penanaman modal	100
Promosi peluang investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA	192.409.200.000
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	560.153.734.941
	Jumlah pameran investasi yang diikuti	3
	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di luar daerah	15

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di dalam daerah	170
Terjaminnya keamanan berusaha.	Jumlah Industri Skala Besar	6
	Jumlah usaha perdagangan	400
	Jumlah usaha industri	11.950
	Jumlah fasilitasi pengurusan HAKI produk industri	5
Tersedianya infrastruktur yang memadai.	Jumlah klaster industri	9 buah
	Jumlah pembangunan sarana perdagangan	2 lokasi
	Jumlah sentra industri	18 buah
	Prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	16,00%
	Prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	2,50%
Tersedianya dukungan SDM yang memadai.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70
	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	5
	Jumlah Pengangguran Terbuka	-3
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5
	Penempatan Tenaga Kerja	
	a. AKL	103
	b. AKAD	182
	c. AKAN	61
Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.	Jumlah BUMDes yang Terbentuk	7
	Jumlah Lembaga Perbankan	27
Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.	Jumlah Koperasi	559
	Prosentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi	18
	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	45.860
	Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	16,5
	Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	99,8
	Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	15,5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah	31.500.000
	Jumlah ekspor Kabupaten Rembang	20.000.000
Jaminan keamanan oleh Pemda.	Jumlah Perda yang disusun	6
	Jumlah Perbub yang disusun	20
	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	1000
	Jumlah Anggota Linmas terlatih	324 org
	Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%
Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton)	
	a. Padi	249.267
	b. Jagung	157.816
	c. Kedelai	4.270
	Produksi Tanaman Hortikultura Utama (Ton):	
	a. Bawang Merah	684
	b. Cabe	6.950
	c. Mangga	62.172
	Produksi tanaman perkebunan utama (Ton)	
	a. Kelapa	4.450
	b. Tembakau	3.300
	c. Tebu	620.693
	Produksi hasil peternakan utama (Kg)	
	a. Daging sapi	1.300.000
	b. Daging Ayam	586.211
	c. Telur Ayam	650.000
	d. Telur Itik	960.000
	Peningkatan populasi ternak unggulan (ekor):	
	a. Sapi potong	128.100
	b. Kambing	159.000
	c. Ayam buras	709.000
	d. Itik	129.500

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	Produksi Perikanan (ton)	
	a. Jumlah Produksi Budidaya Air Payau	2.769
	b. Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar	1.649
	c. Jumlah Produksi Perikanan Laut di	64.419
Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.	Peningkatan jumlah pelaku usaha (%)	
	a. Tanaman Pangan dan hortikultura	5
	b. Perkebunan	5
	c. Peternakan	5
	d. Kehutanan	5
Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura (%)	5
	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan (%)	5
	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani peternakan (%)	5
	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan (%)	5
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi	20
	Pembangunan embung pertanian	7
Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	Jumlah PAD	182.191.199.000
Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.	Angka kelulusan ujian nasional SMP/MTs	97,00%
	Kelulusan UN SMA/MA/SMK	90,92%
	TK/RA/SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100,00%
	SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik	100,00%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	
Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.	% Guru SD yang tersertifikasi	70,51%	
	Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	95,50%	
	Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	49,18%	
	Guru SD/MI layak mengajar	67,37%	
	Guru SMP/MTs yang sertifikasi	80,46%	
	Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	65,49%	
	Guru SMA/SMK/MA layak mengajar	97,78%	
Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	44,00%	
	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	100,00%	
	TK/RA menetapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	70,00%	
	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	73,95%	
	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	54,04%	
	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	66,95%	
	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	16,84%	
	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	90,46%	
	Lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	70,36%	
	Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	87,08%	
	Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah	97,50%	
	Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	66,77%	
Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.	APK PAUD	90%	
	APK SD/MI	105%	
	APK SMP/MTs	98,46%	
	APK SMA/SMK/MA	70%	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	APM SMP/MTs	76.%
	APM SMA/SMK/MA	55%
	Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	100%
	Angka melek huruf	100%
	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/Kejuruan	85%
Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.	Angka Putus Sekolah SD	0,01%
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.05%
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0.15%
	Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/kelompok belajar usaha/magang (%)	40%
Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.	Lulusan SMK diterima didunia kerja sesuai dengan keahliannya	50%
	Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	45%
	Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	50%
Tersedianya tenaga medis yang memadai.	Rasio dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6 per 100 rb penddk
	Rasio dokter per 100.000 per penduduk	40 per 100 rb penddk
	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11 per 100 rb penddk
Tersedianya obat-obatan yang memadai.	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%
	Pengadaan obat esensial	100%
	Ketersediaan obat sesuai standar	100%
Tersedianya peralatan medis yang memadai.	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100%
Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	Kasus Kematian Bayi (AKB)	%105 ks
	Kasus Kematian Ibu (AKI)	7 ks

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%
	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	95%
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%
	Cakupan pelayanan nifas	100%
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%
	Cakupan kunjungan bayi	90%
	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
	Cakupan peserta KB aktif	80%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%
	Cakupan pelayanan anak balita	85%
Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	2 RS
	Cakupan rawat jalan	15%
	Cakupan rawat inap	1,50%
Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%
	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100%
	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%
	Cakupan Desa Siaga Aktif	100%
Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.	Jumlah Posyantek aktif	4 posyantek

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.	Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	267 unit
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.	Jumlah peserta diklat struktural	42 org
	Jumlah peserta diklat fungsional	154 org
	Jumlah PNS yang ikut diklat bendaharawan	40
	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	154
	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	3
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.	Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket
	Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok
	Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader
	Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku
	Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit
	Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1
	Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/55 org
	Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg
	Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1 keg
	Jumlah desa lokasi penerima program P2M-BG	2 desa
	Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket
	Jumlah pelaku usaha industri yang dibina atau dilatih	525 orang
Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%
	prosentase jembatan dalam kondisi baik	50%
Meningkatnya kualitas saluran irigasi.	prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis	20%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas saluran drainase.	Prosentase wilayah yang memiliki drainase	50%
	Prosentase RTH Kawasan Perkotaan	30%
Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya <i>sea front city</i>	Jumlah hasil tangkapan ikan	64.419.005
	Jumlah unit Pengelolaan ikan	225.525.000.
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	Jumlah kelompok Pokwasmas	4
	Jumlah Pelatihan Peningkatkan SDM masyarakat di daerah pesisir dan sekitarnya	60
Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.	Peningkatan Produksi Garam	192.437.000
	Jumlah Produksi Benih ikan	53.550.000
	Jumlah hasil produksi olahan	220.525.
Terwujudnya kawasan wisata bahari	Meningkatnya jml kunjungan wisata (org) 5% per thn)	403,078
	Meningkatnya jml pendapat-an daerah dari obyek wisata (10% per thn)	1,289,771,100
	Meningkatnya jml obyek wisata yg memiliki kelengkapan bahan promosi (bh)	5
	Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah dalam setahun (kali).	4
	Meningkatnya jml obyek pari wisata & daya tarik wisata yg memiliki sarana prasarana penunjang lengkap (unit)	5
	Meningkatnya rata2 lama tinggal wisatawan (hr) 5%/th	2.12
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta <i>good and clean governance</i> .	Opini penilaian BPK	WTP
	Prosentase SKPD yang menyusun Penetapan kinerja	100%
	Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%
Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.	Nilai IKM	82
	Jumlah sertifikasi ISO	10 unit

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
	Cakupan penerbitan KTP/KK	100%
	Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%
	Jumlah Arsiparis	2 orang
Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.	Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	7000 exp
	Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	100%
	Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	100%
Responsif terhadap perkembangan situasi.	Prosentase terbentuknya masyarakat sadar bencana	100%
	Prosentase pelatihan penanggulangan Bencana	100%
	Prosentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik	100%
	Prosentase jumlah korban yang mendapat bantuan	100%
	Prosentase jumlah sasaran dan prosentase penanggulangan bencana	100%
Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.	Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec
Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis	Jm dokumen kajian penelitian dan pengembangan	2 dokumen
	Jumlah BTS	138 buah
	Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran	14 buah

Total Anggaran Rp. 1.481.899.399.672, 00 (Satu trilyun empat ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015, berdasarkan pada hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang mencakup penetapan kinerja tahun 2015, pengukuran pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 – 2015.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media perjanjian kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang. Pengukuran yang dimaksud tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2014 .

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcome dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015. Indikator tersebut diperoleh melalui dua sumber yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi / pelaporan dari masing – masing SKPD

di Kabupaten Rembang dan data eksternal yang berasal dari luar instansi / lintas sektoral.

2. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran. Adapun untuk penghitungan capaian kinerja digunakan rumus sebagai berikut ;

- 1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja Indikator}}{\text{Rencana Kinerja Indikator}} \times 100\%$$

- 2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- $\geq 90,1$ = Sangat Baik
- $75,1 \leq 90$ = Tinggi
- $65,1 \leq 75$ = Sedang
- $50,1 \leq 65$ = Rendah
- ≤ 50 = Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2015 adalah sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
1	2	3	4	5
Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi.	Tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	100	100	100,00%
	Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	9	34	377,78%
	Prosentase sistem informasi penanaman modal	100	100	100,00%
Promosi peluang investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA	192.409.200.000	165.685.052.800	86,11%
	Nilai Realisasi Investasi PMDN	560.153.734.941	3.507.216.363.082	626,12%
	Jumlah pameran investasi yang diikuti	3	4	133,33%
	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di luar daerah	15	30	200,00%
	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di dalam daerah	170	238	140,00%
Terjaminnya keamanan berusaha.	Jumlah Industri Skala Besar	6	20	333,33%
	Jumlah usaha perdagangan	400	549	137,25%
	Jumlah usaha industri	11.950	12.030	100,67%
	Jumlah fasilitasi pengurusan HAKI produk industri	5	4	80,00%
	Jumlah klaster industri	9 buah	9 buah	100%
Tersedianya infrastruktur yang memadai.	Jumlah pembangunan sarana perdagangan	2 lokasi	4 lokasi	200%
	Jumlah sentra industri	18 buah	33 buah	183,33%
	Prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	16,00%	10,92%	68,25%
	Prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	2,50%	1,86%	74,40%
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70	70	100
Tersedianya dukungan SDM yang memadai.	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	5	4	80

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
	Jumlah Pengangguran Terbuka	-3	-2	150
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5	4,5	100
	Penempatan Tenaga Kerja			
	a. AKL	103	131	127%
	b. AKAD	182	35	19,23
	c. AKAN	61	47	77
Penyebaran sarana pelayanan bank dan lembaga keuangan non bank ke pelosok daerah.	Jumlah BUMDes yang Terbentuk	7	25	357,14%
	Jumlah Lembaga Perbankan	27	26	96,29%
Adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik.	Jumlah Koperasi	559	567	101,43%
	Prosentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi	18	17,89	99,34%
	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	45.860	39.363	85,83%
	Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	16,5	16,11	97,64%
	Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	99,8	99,85	100,05%
	Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	15,5	11,61	74,90%
	Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah	31.500.000	30.276.500	96,12%
	Jumlah ekspor Kabupaten Rembang	20.000.000	22.080.000	110,40%
Jaminan keamanan oleh Pemda.	Jumlah Perda yang disusun	6	6	100%
	Jumlah Perbub yang disusun	20	34	170%
	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	1000	1074	107%
	Jumlah Anggota Linmas terlatih	324 org	324 Org	100%
	Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%	100%	100%
Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura,	Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton)			
	a. Padi	249.267	256.211	102,79
	b. Jagung	157.816	111.145	70,43

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
perkebunan, peternakan dan perikanan.				
	c. Kedelai	4.270	3.544	83
	Produksi Tanaman Hortikultura Utama (Ton):			
	a. Bawang Merah	684	368	53,8
	b. Cabe	6.950	2.228	32,06
	c. Mangga	62.172	62.303	100,21
	Produksi tanaman perkebunan utama (Ton)			
	a. Kelapa	4.450	4.038	90,74
	b. Tembakau	3.300	2.804	84,97
	c. Tebu	620.693	586.040	94,42
	Produksi hasil peternakan utama (Kg)			
	a. Daging sapi	1.300.000	936.811	72,06
	b. Daging Ayam	586.211	638.253	108,88
	c. Telur Ayam	650.000	1.464.296	225,28
	d. Telur Itik	960.000	874.518	91,1
	Peningkatan populasi ternak unggulan (ekor):			
	a. Sapi potong	128.100	128.123	100,02
	b. Kambing	159.000	158.990	99,99
	c. Ayam buras	709.000	709.051	100,01
	d. Itik	129.500	129.422	99,94
	Produksi Perikanan (ton)			
	a. Jumlah Produksi Budidaya Air Payau	2.769	5.585	201,64
	b. Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar	1.649	1.892	114,72
	c. Jumlah Produksi Perikanan Laut di	64.419	60.894	94,49
Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.	Peningkatan jumlah pelaku usaha (%)			
	a. Tanaman Pangan dan hortikultura	5	6,72	134,49
	b. Perkebunan	5	4,13	82,6
	c. Peternakan	5	6,48	129,69
	d. Kehutanan	5	3,62	72,4

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura (%)	5	4,94	98,8
	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan (%)	5	3,97	79,4
	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani peternakan (%)	5	4,63	92,6
	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan (%)	5	4,91	98,2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi	20	25,95	129,75
	Pembangunan embung pertanian	7	1	14,29
Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.	Jumlah PAD	182.191.199.000	200.953.096.299,80	110,30%
Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4.447.116.445,00	1111,07%
Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.	Angka kelulusan ujian nasional SMP/MTs	97,00%	100%	103.09
	Kelulusan UN SMA/MA/SMK	90,92%	100%	108.70
	TK/RA/SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100,00%	100%	125.00
	SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik	100,00%	100%	100
Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi.	% Guru SD yang tersertifikasi	70,51%	54.83%	68.54
	Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	95,50%	92.33%	92.33
	Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	49,18%	49.18%	89.42
	Guru SD/MI layak mengajar	67,37%	87.25%	116.33
	Guru SMP/MTs yang sertifikasi	80,46%	48.48%	53.87
	Guru SMA/SMK/MA yang sertifikasi	65,49%	34.63%	43.29

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
	Guru SMA/SMK/MA layak mengajar	97,78%	94.65%	94.65
Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan.	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	44,00%	33,17%	66.34
	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	100,00%	113.24%	113.24
	TK/RA menetapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	70,00%	100%	125.00
	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	73,95%	92.59%	121.83
	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	54,04%	83.73%	139,55
	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	66,95%	46.81%	66,87
	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	16,84%	24.40%	122.00
	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	90,46%	77.70%	81.79
	Lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	70,36%	66,70%	88.93
	Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	87,08%	81,81%	90.90
	Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah	97,50%	100%	100
	Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	66,77%	40,74%	54.32
Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan.	APK PAUD	90%	93.73%	104.14
	APK SD/MI	105%	100160%	95.3
	APK SMP/MTs	98,46%	101,12%	102,7
	APK SMA/SMK/MA	70%	77.36%	110.51
	APM SMP/MTs	76.%	76,50%	100,66
	APM SMA/SMK/MA	55%	48.12%	87,49

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
	Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	100%	35.1%	35,1
	Angka melek huruf	100%	99,65%	99,65
	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/Kejuruan	85%	88.46%	104.07
Tersedianya beasiswa bagi penduduk miskin.	Angka Putus Sekolah SD	0,01%	0.02%	-200
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.05%	0.19%	-180
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0.15%	0,38%	-53.33
	Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/kelompok belajar usaha/magang (%)	40%	37%	92.50
Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan.	Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya	50%	30%	64,28
	Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	45%	37.95%	84.33
	Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	50%	33,40%	73,78
Tersedianya tenaga medis yang memadai.	Rasio dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6 per 100 rb penddk	2,59 per 100 rb penddk	43,2
	Rasio dokter per 100.000 per penduduk	40 per 100 rb penddk	9,24 per 100 rb penddk	23,1
	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11 per 100 rb penddk	1,78 per 100 rb penddk	16,2
Tersedianya obat-obatan yang memadai.	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%	100%	100
	Pengadaan obat esensial	100%	100%	100
	Ketersediaan obat sesuai standar	100%	100%	100
Tersedianya peralatan medis yang memadai.	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100%	63%	63
Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.	Kasus Kematian Bayi (AKB)	%105 ks	134 ks	72,38
	Kasus Kematian Ibu (AKI)	7 ks	8 ks	85,7
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan	100%	100%	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
	epidemiologi < 24 jam			
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	100%	100
	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	95%	88,97%	93,6
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	100%	100
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	99,96%	100
	Cakupan pelayanan nifas	100%	98,37%	109,3
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	100%	100
	Cakupan kunjungan bayi	90%	93,85%	104,3
	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100
	Cakupan peserta KB aktif	80%	82,75%	103,4
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	64%	75,3
	Cakupan pelayanan anak balita	85%	90,30%	106,2
Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	2 RS	2 RS	100
	Cakupan rawat jalan	15%	28,19%	187,9
	Cakupan rawat inap	1,50%	2,47%	164,66%
Tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100
	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100%	80,27%	80,27
	Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	100%	100
	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100
	Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100%	100

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.	Jumlah Posyantek aktif	4 posyantek	4 posyantekdes	100
Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama.	Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	267 unit	0	0%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.	Jumlah peserta diklat struktural	42 org	42 org	100%
	Jumlah peserta diklat fungsional	154 org	112 org	72,73%
	Jumlah PNS yang ikut diklat bendaharawan	40	40	100,00%
	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	154	112 org	72,73%
	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	3	3	100,00%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat.	Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok	6 kelompok	100%
	Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader	112 kader	100%
	Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku	1 buku	100%
	Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit	30 unit	100%
	Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang	100 orang	100%
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1	1	100%
	Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/55 org	1	100%
	Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg	1	100%
	Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1 keg	1	100%
	Jumlah desa lokasi penerima program P2M-BG	2 desa	2 desa	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
	Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah pelaku usaha industri yang dibina atau dilatih	525 orang	526 orang	100%
Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan.	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	49.82%	58.61%
	prosentase jembatan dalam kondisi baik	50%	72.22%	144.44%
Meningkatnya kualitas saluran irigasi.	prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis	20%	0%	0%
Meningkatnya kualitas saluran drainase.	Prosentase wilayah yang memiliki drainase	50%	70%	141.00%
	Prosentase RTH Kawasan Perkotaan	30%	0%	0%
Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya <i>sea front city</i>	Jumlah hasil tangkapan ikan	64.419.005	60.894.207	94,49%
	Jumlah unit Pengelolaan ikan	225.525.000.	212.035.000	94,02%
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.	Jumlah kelompok Pokwasmas	4	4	100
	Jumlah Pelatihan Peningkatkan SDM masyarakat di daerah pesisir dan sekitarnya	60	60	100
Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan.	Peningkatan Produksi Garam	192.437.000	219.477.500	114,05
	Jumlah Produksi Benih ikan	53.550.000	387.457.146	723,54
	Jumlah hasil produksi olahan	220.525.	212.035.	94,02
Terwujudnya kawasan wisata bahari	Meningkatnya jml kunjungan wisata (org) 5% per thn)	403,078	1,321,411	
				327.83%
	Meningkatnya jml pendapatan daerah dari obyek wisata (10% per thn)	1,289,771,100	1,325,738,920	
				102.79%
	Meningkatnya jml obyek wisata yg memiliki kelengkapan bahan promosi	5	5	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
	(bh)			
	Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah dalam setahun (kali).	4	4	100%
	Meningkatnya jml obyek pariwisata & daya tarik wisata yg memiliki sarana prasarana penunjang lengkap (unit)	5	5	100%
	Meningkatnya rata2 lama tinggal wisatawan (hr) 5%/th	2.12	2.12	100%
Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta <i>good and clean governance</i> .	Opini penilaian BPK	WTP	WDP	82,00%
	Prosentase SKPD yang menyusun Penetapan kinerja	100%	100%	100,00%
	Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%	100%	100,00%
Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.	Nilai IKM	82	73,58	89,73%
	Jumlah sertifikasi ISO	10 unit	7	70,00%
	Cakupan penerbitan KTP/KK	100%	100%	100,00%
	Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%	100%	100,00%
	Jumlah Arsiparis	2 orang	2 orang	100,00%
Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.	Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	7000 exp	7000 exp	100,00%
	Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	100%	100%	100,00%
	Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	100%	100%	100,00%
Responsif terhadap perkembangan situasi.	Prosentase terbentuknya masyarakat sadar bencana	100%	99,69%	99,69%
	Prosentase pelatihan penanggulangan Bencana	100%	97,24%	97,24%
	Prosentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik	100%	97,53%	97,53%
	Prosentase jumlah korban yang mendapat bantuan	100%	82,28%	82,28%
	Prosentase jumlah sasaran dan prosentase penanggulangan bencana	100%	94,70%	94,70%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	realisasi	%
Responsif terhadap perubahan perubahan dinamika kebijakan nasional.	Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec	14 kec	100,00%
Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis	Jm dokumen kajian penelitian dan pengembangan	2 dokumen	1 dokumen	100,00%
	Jumlah BTS	138 buah	138 buah	100,00%
	Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran	14 buah	14 buah	100,00%

B. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Sasaran 1 : Penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memasuki era globalisasi Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Kondisi sumber daya alam dan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Rembang cukup potensial untuk dikembangkan seperti pertambangan, perikanan, pertanian dan peternakan, dan beberapa potensi lain yang juga berpotensi adalah investasi dibidang pariwisata, industri, kerajinan dan jasa. Pengelolaan kondisi alam dan kondisi daerah tersebut, perlu ditumbuhkembangkan secara profesional dan berkelanjutan, sehingga secara ekonomi menyentuh dan meningkatkan perkonomian rakyat / masyarakat Rembang dan memberi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, dan secara makro memberi kontribusi yang besar untuk PAD di Kabupaten Rembang.

Penumbuhan minat investasi harus didukung dengan sebuah layanan investasi yang handal, yaitu salah satunya dengan melayani calon investor maupun investor di dalam melakukan kegiatan investasinya di Kabupaten Rembang, yaitu yang salah satunya dengan melayani calon investor maupun investor dibidang pelayanan perijinan dengan standar pelayanan prima yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), dengan visi yaitu 'Unggul dalam Kualitas Layanan dan Profesional'.

KPPT Kabupaten Rembang dalam melayani para pemohon atau calon investor dalam pengajuan ijin usaha, ada beberapa langkah-langkah yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada dilingkungan KPPT khususnya di *front office* maupun *back office* sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan pelayanan perijinan.
2. Menyusun sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data dalam penerbitan perijinan sehingga lebih memudahkan dalam pelayanan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan perijinan untuk mempercepat proses pelayanan.
4. Mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam rangka memfasilitasi pelayanan perijinan untuk memberikan kepastian kesesuaian tata ruang.
5. Melaksanakan program PATEN sehingga akan memudahkan dan mempercepat pelayanan perijinan ditingkat kecamatan.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III.2
Capaian Penyederhanaan Prosedur Pelayanan dan Perijinan Investasi

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan	%	100	100	100,00 %
2.	Rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang	buah	9	34	377,78 %
3.	Prosentase sistem informasi penanaman modal	%	100	100	100,00 %
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					192,59 %

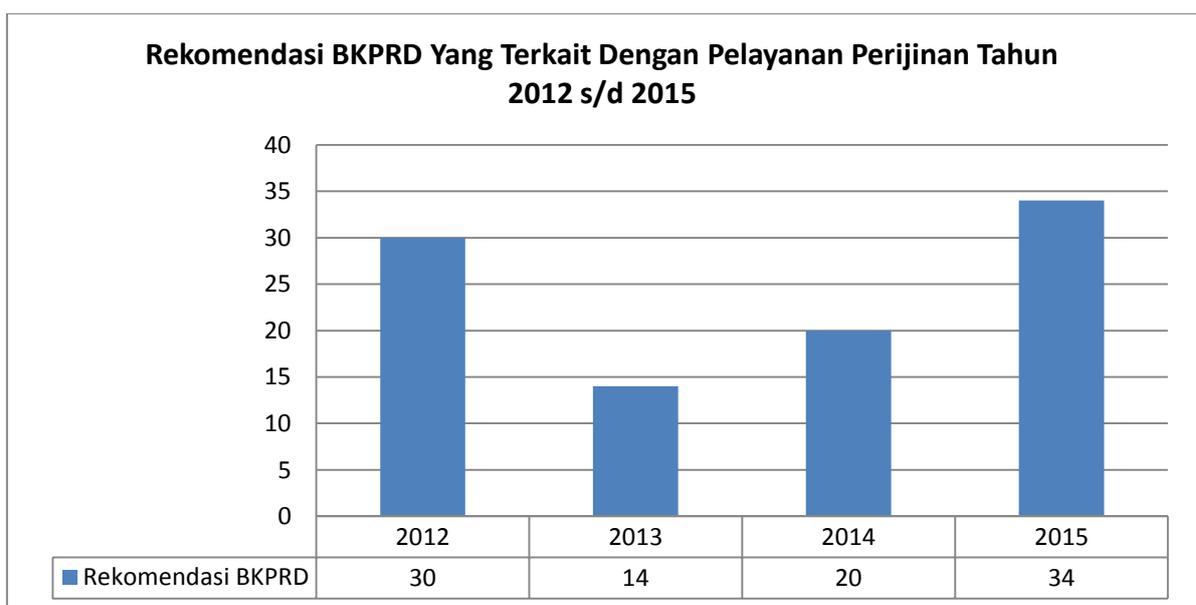
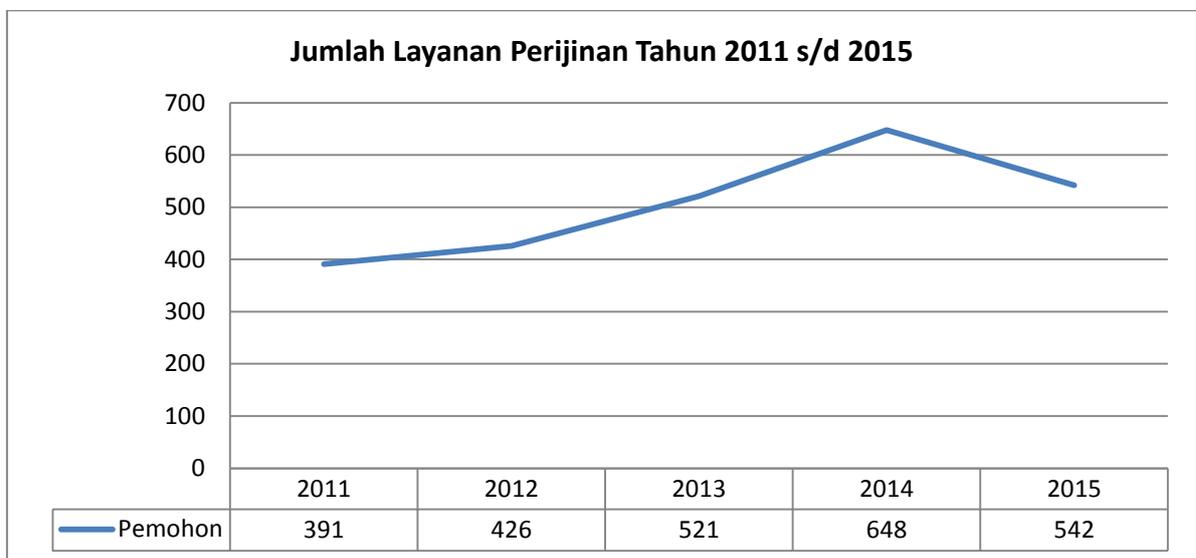
Capaian kinerja sasaran rata-rata penyederhanaan prosedur pelayanan dan perijinan investasi sebesar 192,59% tersebut diatas capaian pada tingkat penyelesaian perijinan terhadap waktu yang ditentukan sebesar 100%, rekomendasi BKPRD terhadap perizinan pemanfaatan ruang sebesar 377,78% dan prosentase sistem informasi penanaman modal sebesar 100%.

Capaian sebagaimana tersebut diatas didasarkan atas data layanan perijinan khususnya yang menyangkut perijinan usaha sebagaimana berikut :

1. Dari pengajuan pada Tahun 2015 terdapat pengajuan ijin sebanyak 542 pemohon yang semuanya telah diproses dan disetujui pada tahun itu sejumlah 542 pemohon.

2. Rata-rata jumlah pemohon perijinan dari tahun 2011 s/d 2015 adalah sebesar 506, dengan jumlah pemohon terbanyak pada tahun 2014 yaitu sejumlah 648 pemohon, sedangkan pada tahun 2015 ini terdapat permohonan sebanyak 542 pemohon.
3. Pada Tahun 2015, mengalami penurunan jumlah layanan khususnya pelayanan perijinan karena disebabkan pada penarikan kewenangan didalam melayani perijinan di sektor pertambangan, yang semula pelayanan perijinan sektor pertambangan berada di Kabupaten sekarang berada di Provinsi.

Berikut dibawah ini adalah grafik jumlah pemohon dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan rekomendasi BKPRD yang terkait dengan pelayanan perijinan :



Sasaran 2 : Promosi peluang investasi

Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, karena dengan adanya investasi akan berujung pada penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya kegiatan ekonomi di daerah akan berkembang sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dituntut untuk aktif menggali potensi daerahnya dan berupaya untuk dapat menginformasikannya kepada publik melalui berbagai media. Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat dan mutakhir akan membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan investasi.

Ada beberapa langkah dan upaya Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015 untuk mengenalkan potensi investasi dan fasilitasi dalam rangka menarik calon investor melalui beberapa SKPD, diantaranya adalah :

1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada tahun 2015, telah mengikuti pameran investasi sebanyak 3 kali dan 1 kali temu bisnis serta 1 kali fasilitasi kerjasama UMKM dengan UMB, yaitu :
 - a. Pameran Invesda Expo, pada tanggal 27 s/d 31 Mei 2015 di Yogyakarta
 - b. Pameran Investment, Trade and Tourism, pada tanggal 11 s/d 15 November 2015 di Surabaya, Jawa Timur.
 - c. Pameran Investment, Trade and Tourism, pada tanggal 11 s/d 15 November 2015 di Malang, Jawa Timur.
 - d. Fasilitasi Kerjasama UMKM dengan UMB, pada tanggal 10 Desember 2015 di Rembang.
2. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM melaksanakan pameran investasi di daerah, yaitu dengan menggelar pelaksanaan Rembang Expo Tahun 2015 yang diikuti oleh sebagian besar UMKM yang ada di Kabupaten Rembang.
3. Selain itu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Bagian Perekonomian Setda Rembang juga ikut mengenalkan potensi dan peluang investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada calon investor agar lebih dikenal dan tertarik untuk berinvestasi melalui program promosi yang ada pada instansi tersebut.
4. Mengikuti Pameran Investasi dan Temu Bisnis berskala Nasional yang diselenggarakan oleh BPMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu melalui kegiatan CJIBF dan CJIBE pada tanggal 20 & 21 Oktober 2015 di Solo.

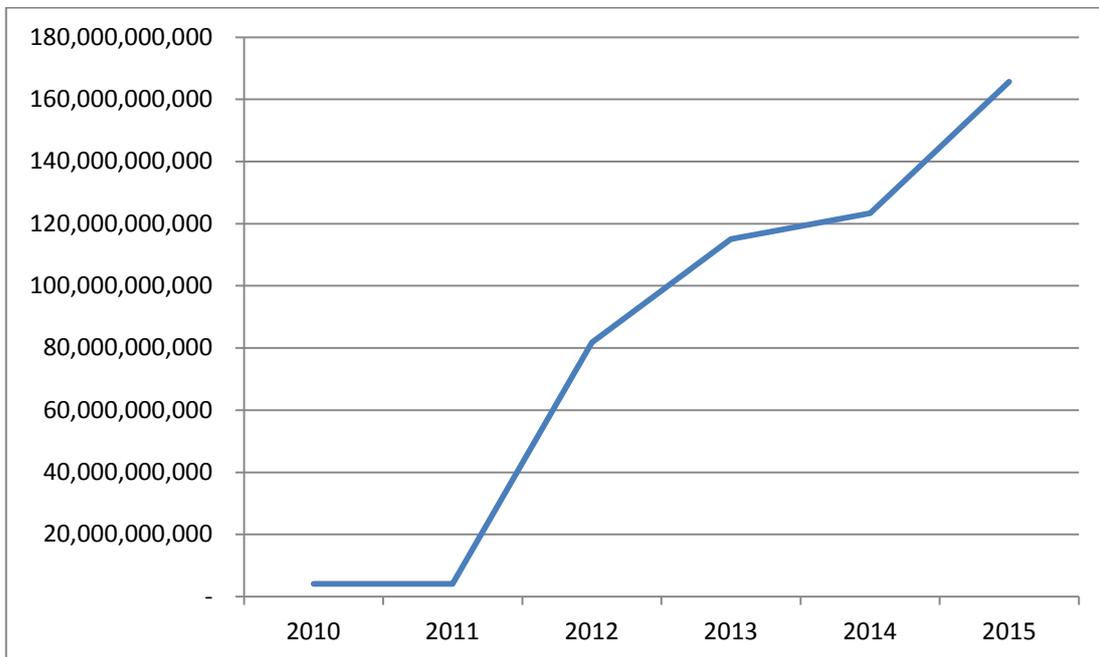
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

Tabel III. 3
Capaian Kinerja Promosi peluang investasi

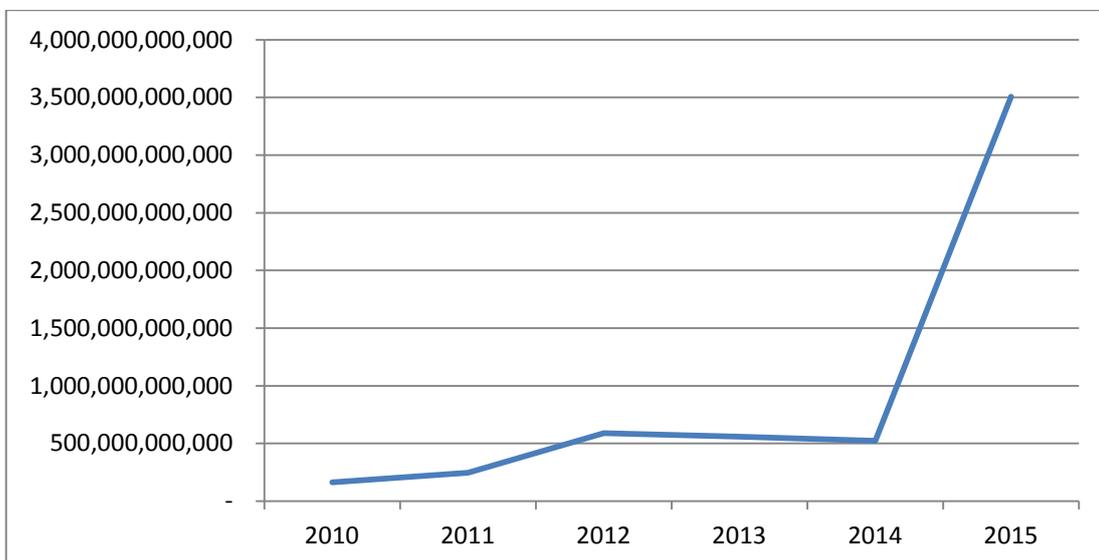
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp.	192.409.200.000	165.685.052.800	86,11 %
2.	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp.	560.153.734.941	3.507.216.363.082	626,12 %
3.	Jumlah pameran investasi yang diikuti	Kali	3	4	133,33 %
4.	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di luar daerah	UMKM	15	30	200,00 %
5.	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terfasilitasi dalam kegiatan promosi perdagangan di dalam daerah	UMKM	170	238	140,00 %
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					237,11 %

Dari capaian kinerja sasaran rata-rata 237,11% tersebut diatas diantaranya disebabkan adanya peningkatan realisasi investasi pada tahun 2015 yang sangat tinggi, hal ini disebabkan adanya realisasi investasi pada pembangunan PT. Semen Gresik Tbk. yang sangat tinggi, yaitu PT. Semen Gresik Tbk. pada semester II dan III telah mendatangkan mesin dan peralatan yang nilainya sangat besar sekali. Adapun perkembangan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang ada di Kabupaten Rembang ditunjukkan oleh grafik perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Rembang tahun 2010 s/d 2015 sebagai berikut :

**Grafik Perkembangan Realisasi Investasi PMA
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010 s/d 2015**



**Grafik Perkembangan Realisasi Investasi PMDN
Di Kabupaten Rembang Tahun 2010 s/d 2015**



Di Kabupaten Rembang pada tahun-tahun yang akan datang, realisasi investasi diproyeksikan akan terus meningkat tajam karena Kabupaten Rembang berada dilokasi yang strategis dan mempunyai daya tarik tersendiri hal ini karena telah tersedianya

Pelabuhan Umum yang berada di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang sebagai pintu masuk maupun keluar yang diharapkan akan mampu menarik investor ke Kabupaten Rembang, selain itu Kabupaten Rembang berada di jalur pantura yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Surabaya dengan Semarang atau Jakarta dengan dukungan potensi sumberdaya alamnya yang melimpah, yaitu potensi perikanan, pertambangan dan pariwisata.

Sasaran 3 : Terjaminnya keamanan berusaha

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta memasuki era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya terus untuk meningkatkan kemampuan bersaing dengan menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat. Dalam menjamin keamanan berusaha di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengambil langkah agar para calon investor dalam mendirikan usahanya mendapatkan keamanan dalam menjalankan usahanya, yaitu :

1. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang didalamnya mengatur bagaimana pelaksanaan penanaman modal yang ada di Kabupaten Rembang yang salah satunya memuat tentang kepastian hukum bagi pelaku usaha dan usahanya .
2. Menetapkan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRW) Kabupaten Rembang sehingga memudahkan calon investor menentukan pilihan lokasi usaha yang sesuai dengan yang diharapkan.
3. Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Rembang yang bertujuan memfasilitasi calon investor dalam menentukan lokasi usaha agar sesuai dengan peruntukannya.

Untuk melihat pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel pengukuran pencapaian sasaran berikut dibawah ini :

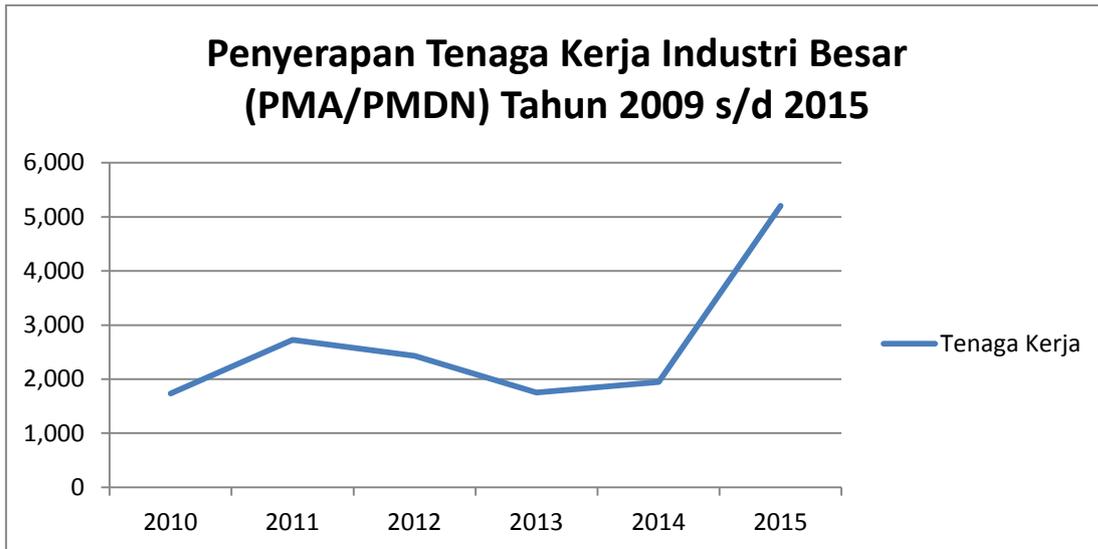
Tabel III.4

Capaian Indikator kinerja terjaminnya keamanan berusaha

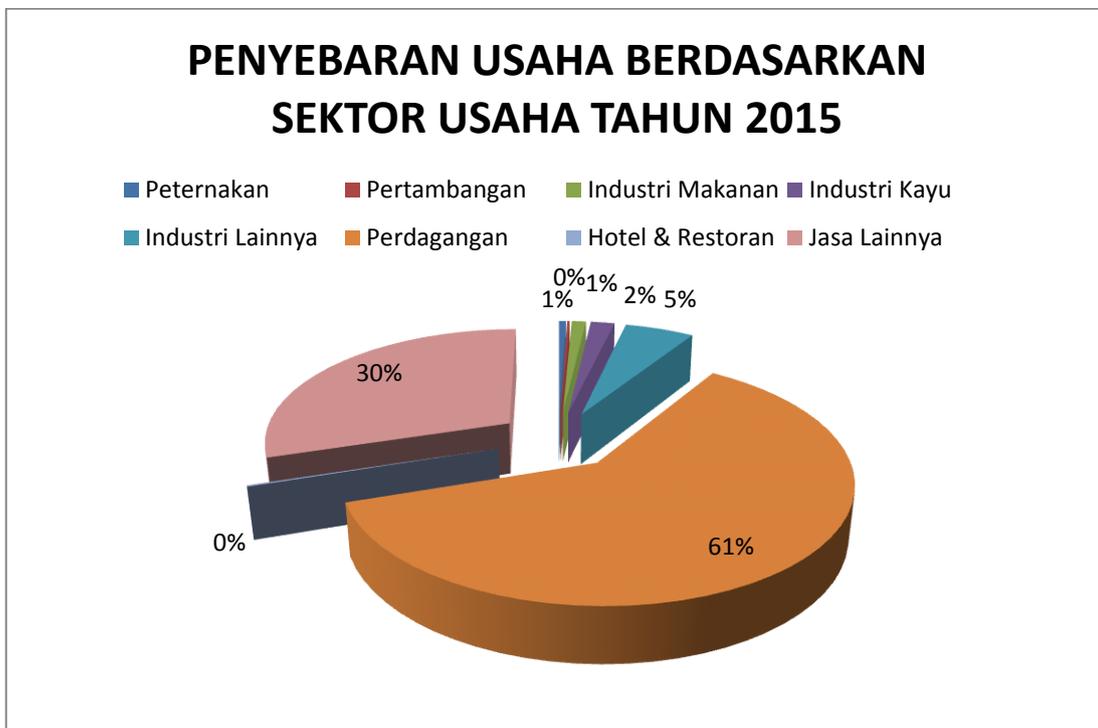
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Industri Skala Besar	Buah	6	20	333,33 %
2.	Jumlah usaha perdagangan	Usaha	400	549	137,25 %
3.	Jumlah usaha industri	Usaha	11.950	12.030	100,67 %
4.	Jumlah fasilitasi pengurusan HAKI produk industri	Haki	5	4	80,00 %
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					162,81 %

Melihat pada hasil capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 162,81%, ini menunjukkan bahwa adanya perhatian yang besar Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap sebuah investasi, hal ini didasarkan pada capaian indikator jumlah usaha perdagangan adalah sebesar 137,25 % dengan jumlah 549 perusahaan, jumlah usaha industri sebesar 100,67 % dengan jumlah 12.030 perusahaan dan jumlah fasilitasi pengurusan HaKI sebesar 80,00 % dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 105 %.

Kurun waktu sampai dengan tahun 2015 ini di Kabupaten Rembang, telah ada 20 perusahaan besar PMA dan PMDN yang telah merealisasikan investasi, hal ini didasarkan pada Ijin Prinsip Penanaman Modal yang telah dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.205 orang. Berikut ini adalah perkembangan penyerapan tenaga kerja yang ada pada industri besar (PMA/PMDN) dari tahun 2009 s/d 2015 :



Selain itu, terkait dengan keamanan berusaha dapat ditunjukkan dengan adanya usaha baru yang ada di Tahun 2015 berdasarkan sektor usaha di Kabupaten Rembang sebagaimana yang disajikan di dalam tabel berikut ini :



Sasaran 4 : Tersedianya infrastruktur investasi yang memadai

Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menciptakan dan meningkatkan akses perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan bahkan menciptakan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan penciptaan investasi di Kabupaten Rembang, dalam rangka mempercepat pertumbuhan kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III 5

Capaian kinerja tersedianya infrastruktur yang memadai

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
1.	Jumlah klaster industri	9 buah	9 buah	100%	88,89%
2.	Jumlah pembangunan sarana perdagangan	2 lokasi	4 lokasi	200%	108,11%
3.	Jumlah sentra industri	18 buah	33 buah	183,33 %	166,67%
4.	Prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	16,00 %	10,92%	68,25%	102,17%
5.	Prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar	2,5 %	1,86%	74,40%	87,2%
	Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata			84,80%	143%

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah klaster industri sebesar 100% dengan jumlah 9 klaster. Indikator jumlah sentra industri sebesar 183,33% dengan jumlah 33 sentra, indikator prosentase jumlah kios pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar sebesar 68,25%, indikator prosentase jumlah los pasar dibandingkan jumlah pedagang pasar sebesar 74,40%.

Melihat capaian kinerja masing-masing indikator, maka capaian kinerja sasaranCapaian kinerja tersedianya infrastruktur yang memadai rata-rata sebesar 84,80%.

Sasaran 5 : Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

Sasaran Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, dimaksudkan untuk memecahkan isu strategis yaitu masih banyaknya penduduk dibawah garis kemiskinan, terbatasnya akses masyarakat khususnya di perdesaan terhadap

sumber – sumber modal yang dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja yang berpendidikan, berketrampilan dan berdaya saing relatif rendah dan belum sepenuhnya didukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk mencapai Sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan, jumlah pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka dan penempatan tenaga kerja.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tersedianya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian %
			2015	2015	2015	2014
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70	70	100	100
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	5	4	80	140
3	Jumlah Pengangguran Terbuka	%	-3	-2	150	100
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	4,5	100	100
5	Penempatan Tenaga Kerja					
	a. AKL	Orang	103	131	127%	174
	b. AKAD	Orang	182	35	19,23	93
	c. AKAN	Orang	61	47	77	100
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					100,86	115,28

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja 100%, pencari kerja yang ditempatkan 140%, jumlah pengangguran terbuka 100% dan penempatan tenaga kerja rata-rata yang terdiri dari AKL 174 %, AKAD 93%, dan AKAN 100%. Melihat dari capaian masing-masing indikator, maka didapat capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 115,28% (sangat berhasil). Capaian yang melebihi 100% ini didukung oleh adanya capaian pada indikator Prosentase pencari kerja yang ditempatkan yang capaiannya 140 % dan indikator Penempatan Tenaga Kerja yang melebihi 100%.

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja). Jumlah pengangguran terbuka Kabupaten Rembang di targetkan turun sebesar 3 % dan ini telah sesuai dengan realisasi. Informasi jumlah pengangguran terbuka ini berguna sebagai acuan bagi pemerintah untuk

membuka lapangan kerja baru dan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya sarana prasarana Informasi Pasar Kerja (IPK) / Bursa Kerja Online (BKO) secara maksimal.
- b. Minimnya anggaran untuk penempatan dan kurangnya dukungan manajemen dibidang transmigrasi
- c. Terbatasnya kuota untuk penempatan transmigrasi dari Provinsi.
- d. Belum terpenuhinya SDM baik kualitas maupun kuantitas yang memadai.
- e. Belum optimalnya pendayagunaan PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Adapun Strategi Peningkatan Kinerja antara lain :

1. Perlu adanya dukungan sistem manajemen yang profesional dan sumber dana yang memadai serta fasilitas sarana prasarana sebagai penunjang peningkatan kinerja
2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi baik internal maupun eksternal
3. Pendayagunaan potensi sumber Dinsosnakertrans baik internal maupun eksternal (peran *stakeholder*).

Langkah – langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran yaitu :

- a. Mengajukan anggaran yang lebih banyak baik untuk transmigrasi maupun penempatan tenaga kerja serta koordinasi dengan kab lain dalam hal penempatan tenaga kerja
- b. Kerjasama dengan radio swasta di Kab. Rembang ditingkatkan dalam hal informasi tenaga kerja
- c. Menambah petugas pengantar kerja.
- d. Kerja sama dan koordinasi ke Dinas Provinsi di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu ditingkatkan.

Sasaran 6 : Penyebaran Sarana Pelayanan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku usaha adalah permodalan, karena dengan adanya modal yang cukup pelaku usaha akan mampu dan dapat mengembangkan usahanya apabila kondisi pasar sangat menguntungkan pelaku usaha.

Pentingnya lembaga keuangan, Bank maupun Non-Bank, bagi pelaku usaha khususnya UMKM adalah dengan diberikannya bantuan modal oleh Bank maupun lembaga keuangan Non-Bank berupa kredit bagi UMKM, karena modal yang diberikan digunakan untuk mengembangkan usaha UMKM sehingga keberadaannya akan dapat bersaing dengan pelaku usaha yang lain khususnya diluar Kabupaten Rembang.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III 7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Penyebaran Sarana Pelayanan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank ke Pelosok Daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015
1.	Jumlah BUMDes yang Terpentuk	Unit	7	25	357,14 %
2.	Jumlah Lembaga Perbankan	Unit	27	26	96,29 %
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					226,71 %

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian indikator jumlah BUMDes yang terbentuk sebesar 357,14 % dan jumlah lembaga perbankan sebesar 96,29 %. Berdasarkan indikator sasaran tersebut capaian kinerja sasaran rata-rata nya adalah sebesar 226,71 %.

Perbankan adalah suatu badan usaha yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk meminjam kredit dengan suatu jaminan maupun menabung. Jumlah Lembaga Perbankan yang tersedia di Kabupaten Rembang sebanyak 26 unit dari target sebanyak 27 unit. Lembaga perbankan yang terdapat di Kabupaten Rembang diantaranya adalah :

1. Milik Pemerintah : BRI, BNI, Mandiri
2. Swasta Nasional : BTPN, BCA, Danamon, Mega Syariah, Bank Muamalat
3. Swasta Asing : Rabobank
4. Milik Pemda : BPD, BPR BKK Lasem, BPR Bank Pasar

Sasaran 7 : Adanya Kemampuan UMKM untuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah di Daerah dikatakan berhasil adalah salah satunya dapat dilihat dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat salah satunya dengan indikator menurunnya tingkat pengangguran di Masyarakat,

hal ini disebabkan karena terbukanya lapangan kerja yang cukup besar di Daerah. Salah satu faktor dalam penciptaan lapangan kerja tersebut selain perusahaan besar adalah pelaku usaha UMKM, peran UMKM sangatlah besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan karena jumlahnya yang cukup besar di Daerah, hal ini sudah dibuktikan keberadaannya sangat mendukung dalam perekonomian Daerah maupun Nasional pada saat krisis yang melanda bangsa kita pada Tahun 1998.

Pentingnya UMKM bagi perekonomian Daerah, haruslah perlu dukungan dari Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pemberdayaan UMKM agar mampu bertahan, bersaing dan berkembang sehingga keberadaannya mampu mendukung Perekonomian Daerah.

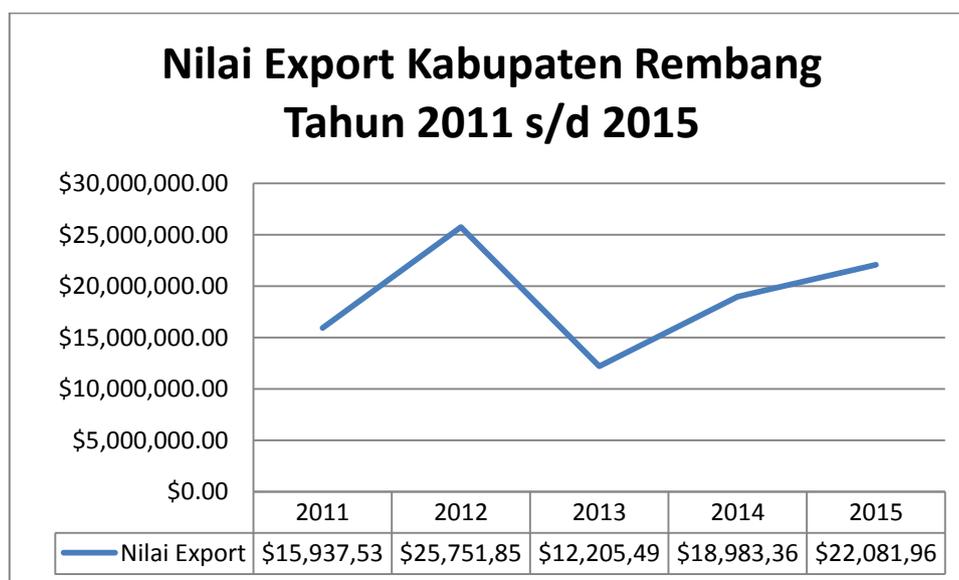
Untuk mengukur sejauhmana pencapaian sasaran tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel III.8
Capaian Indikator Kinerja Adanya Kemampuan UMKM
untuk Menyusun Rencana Bisnis Yang Baik

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2015	Realiasi 2015	Capaian % 2015
1.	Jumlah Koperasi	Unit	559	567	101,43 %
2.	Prosentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi	%	18,00	17,89	99,34 %
3.	Jumlah usaha mikro kecil dan menengah	UMKM	45.860	39.363	85,83 %
4.	Prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah	%	16,50	16,11	97,64 %
5.	Prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha	%	99,80	99,85	100,05 %
6.	Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk	%	15,50	11,61	74,90 %
7.	Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah	Rp.	31.500.000	30.276.500	96,12 %
8.	Jumlah ekspor Kabupaten Rembang	US\$	20.000.000	22.080.000	110,40 %
Capaian Kinerja Sasaran Rata-Rata					95,71 %

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa pencapaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 95,71 %, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan UMKM dalam menyusun rencana bisnis sudah baik hal ini ditunjukkan dengan adanya capaian indikator jumlah koperasi sebesar 101,45%, indikator prosentase jumlah koperasi sehat dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi sebesar 99,34%, indikator jumlah usaha mikro kecil dan menengah 85,83%, indikator prosentase peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebesar 97,64%, indikator prosentase usaha mikro kecil dan menengah dibandingkan seluruh unit usaha 100,05%, indikator Prosentase penyerapan tenaga kerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah dibanding jumlah penduduk sebesar 74,90%, indikator Jumlah omzet usaha mikro kecil dan menengah sebesar 96,12% dan indikator Jumlah ekspor Kabupaten Rembang sebesar 110,40%.

Berkaitan dengan indikator jumlah ekspor Kabupaten Rembang, berikut ini adalah data nilai ekspor Kabupaten Rembang dari tahun 2011 s/d 2015 dan nama-nama Perusahaan Kabupaten Rembang yang berorientasi ekspor.



Tabel III.9

Perusahaan Kabupaten Rembang yang Berorientasi Ekpor Tahun 2015

No.	Nama Perusahaan	Jenis Barang	Negara Tujuan
1.	CV. Karya Mina Putra Dk. Matalan Ds. Purworejo Kec. Kaliori	Ikan Beku	China, Jepang, Hongkong, Korea
2.	UD. Sasana Antik Ds. Krikilan Kec. Sumber	Meja, Lemari	Belanda, Perancis, Jerman
3.	CV. Natural Ds. Mondoteko Kec. Rembang	Meja, Lemari	Belanda

No.	Nama Perusahaan	Jenis Barang	Negara Tujuan
4.	CV. Sabha Ds. Kemadu Kec. SUlang	Meja, Lemari	Jerman, Perancis, Belanda, Korea, Malaysia
5.	PT. Holi Mina Jaya Jl. Raya Sluke - Rembang	Frozen, Surimi	China, Malaysia, Jepang, Singapura, Eropa, Taiwan, Kanada
6.	PT. SMB, Kecamatan Kragan Kragan	Crab	Amerika dan Eropa
7.	PT. Pan Putra Samudra, Kecamatan Kragan	Crab	Amerika dan Eropa
8.	PT. Dharma Cipta Karya, Ds. Soditan Kecamatan Lasem	Meubel	Eropa, China dan Taiwam

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran adanya kemampuan UMKM untuk menyusun rencana bisnis yang baik adalah, diantaranya :

1. Kesadaran masyarakat akan peranan koperasi masih kurang.
2. Masih banyaknya koperasi tidak aktif maupun koperasi tidak sehat.
3. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pelaku UKM.
4. Kurangnya akses permodalan penunjang kegiatan UMKM.
5. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis kewirausahaan
6. Kurangnya promosi produk unggulan daerah melalui pameran di luar daerah.
7. Lemahnya daya saing produk.
8. Terbatasnya sarana pendukung promosi.

Sedangkan untuk meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Aparatur Bidang koperasi.
2. Melakukan pembinaan dan pelatihan manajemen koperasi.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis kewirausahaan
4. Adanya bantuan modal untuk menunjang kegiatan UMKM
5. Meningkatkan kegiatan promosi keluar daerah.
6. Mengadakan pelatihan dan pembinaan IKM.
7. Menambah sarana dan fasilitas pendukung promosi.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan target capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan koperasi melalui pembinaan, pelatihan dan penilaian koperasi.
2. Pemasyarakatan koperasi agar lebih dikenal masyarakat.
3. Mendorong upaya pengembangan investasi yang memberikan jaminan kepastian usaha

4. Mengembangkan ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja melalui Koperasi dan pengembangan UMKM
5. Mengikuti kegiatan pameran baik di luar maupun di dalam daerah.
6. Peningkatan kualitas produk.

Sasaran 8 : Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah

Jaminan keamaan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III. 10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
1	Jumlah Perda yang disusun	6	6	100%	171 %
2	Jumlah Perbub yang disusun	20	34	170%	180 %
3	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun	1000	1074	107%	190%
4	Jumlah Anggota Linmas terlatih	324 org	324 Org	100%	100 %
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibum di Kab. Rembang	100%	100 %	100%	100 %
Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata				114,48%	148%

Untuk melihat hasil capaian sasaran Jaminan Keamanan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, dapat dilihat dari 5 (lima indikator) dengan hasil pencapaian 114,48 % (sangat berhasil). Capaian terbesar adalah Indikator Jumlah Peraturan Bupati yang disusun dari target 20 keputusan telah berhasil disusun 34 Peraturan Bupati, sehingga capaiannya adalah 170% . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran rata-rata tahun lalu, tahun 2015 ini mengalami sedikit mengalami penurunan, dari capaian rata-rata sebesar 148% tahun 2014, pada tahun 2015 menjadi 114,48%. Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan adanya Peraturan/ Perundangan yang telah ditetapkan sebagai Dasar Hukum pelaksanaan Pemerintahan diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pemerintah Kabupaten Rembang.

Sasaran 9. Mudah nya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan masih rendahnya penerapan teknologi pertanian mulai dari teknik budidaya sampai teknik pengolahan hasil,

yang berdampak pada belum optimalnya kualitas dan kuantitas komoditas pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran tersebut ditempuh melalui beberapa indikator sasaran antara lain peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian serta peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Selengkapnya pencapaian indikator kinerja sasaran ini tersajikan pada tabel berikut :

Tabel III. 11

Capaian Kinerja Sasaran Mudahnya akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan

NO.	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2015		CAPAIAN (%) 2015
		TARGET	REALISASI	
1.	Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton)			
	a. Padi	249.267	256.211	102,79
	b. Jagung	157.816	111.145	70,43
	c. Kedelai	4.270	3.544	83,00
2.	Produksi Tanaman Hortikultura Utama (Ton):			
	a. Bawang Merah	684	368	53,80
	b. Cabe	6.950	2.228	32,06
	c. Mangga	62.172	62.303	100,21
3.	Produksi tanaman perkebunan utama (Ton)			
	a. Kelapa	4.450	4.038	90,74
	b. Tembakau	3.300	2.804	84,97
	c. Tebu	620.693	586.040	94,42
4.	Produksi hasil peternakan utama (Kg)			
	a. Daging sapi	1.300.000	936.811	72,06
	b. Daging Ayam	586.211	638.253	108,88
	c. Telur Ayam	650.000	1.464.296	225,28
	d. Telur Itik	960.000	874.518	91,10
5.	Peningkatan populasi ternak unggulan (ekor):			
	a. Sapi potong	128.100	128.123	100,02
	b. Kambing	159.000	158.990	99,99
	c. Ayam buras	709.000	709.051	100,01
	d. Itik	129.500	129.422	99,94
6.	Produksi Perikanan (ton)			

NO.	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2015		CAPAIAN
a.	Jumlah Produksi Budidaya Air Payau	2.769	5.585	201,64
b.	Jumlah Produksi Budidaya Air Tawar	1.649	1.892	114,72
c.	Jumlah Produksi Perikanan Laut di	64.419	60.894	94,49
Rata-rata				101,03

Pencapaian target ini kurang optimal karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala pada masih rancunya penafsiran UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana ada kewajiban untuk berbadan hukum bagi penerima hibah serta masih rancunya penafsiran UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana ada beberapa kegiatan yang masuk kewenangan lokal berskala desa yaitu : Pengelolaan jaringan irigasi, Pengelolaan embung desa, dan Pembuatan jalan pertanian. Sehingga beberapa kegiatan yang sumber dananya dari APBD Kabupaten tidak dapat dilaksanakan karena sebagian besar kelompok tani calon penerima hibah sebagian besar belum berbadan hukum.

Namun beberapa program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditargetkan baik melalui dana APBN, maupun DAK, diantaranya Pengembangan Jaringan Irigasi seluas 5.500 Ha, pembangunan embung sebanyak 1 unit dan irigasi tanah dangkal sebanyak 12 unit, Dam Parit 10 Unit; Optimasi Lahan Pertanian 1.640 Ha; peningkatan ketersediaan alat mesin pertanian dan perkebunan berupa fasilitasi bantuan berupa Traktor roda empat 8 unit, handtraktor sebanyak 135 unit, transplanter sebanyak 17 unit dan pompa air sebanyak 60 unit.

Dengan adanya Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai (UPSUS PAJALE) yang melibatkan TNI dan perguruan tinggi, mampu mengungkit produksi padi pada tahun 2015 dengan kenaikan 40,00 % dibanding tahun 2014, yaitu dari 183.002 ton naik menjadi 256.211 ton, sehingga kondisi ketersediaan beras di Kabupaten Rembang tidak mengalami kendala karena dalam kondisi Surplus hingga 76.564,5 ton dari kebutuhan konsumsi penduduk 51.776,5 ton dengan ketersediaan 128.340,85 ton dengan tingkat konsumsi 100,19 kg/Kap/Th.

Untuk bidang peternakan peningkatan populasi ternak didukung dengan keberhasilan kegiatan inseminasi buatan yang dilakukan oleh petugas inseminator dan kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak sehingga mampu menekan angka kasus kematian dan kesakitan ternak hingga 13,51 % dari 3.500 kasus tahun 2014 menjadi 3.027 pada tahun 2015.

Di sektor perkebunan, tanaman tebu meskipun tidak ada tambahan perluasan areal namun secara produktivitas mengalami peningkatan dari 63 ton per hektar menjadi 65 ton per hektar; beberapa dukungan kegiatan untuk pengembangan tebu adalah rawat

ratoon yang luasannya mencapai 1.383 Ha. Kondisi dilapangan juga menunjukkan kondisi yang lebih baik, bahwa luas serangan hama terjadi penurunan pada tahun 2015 ini, khususnya serangan hama penggerek pucuk/ batang, luas serangannya sebesar 277 Ha dari tahun sebelumnya menjadi 260 Ha, karena adanya upaya pengendalian yang sudah dilaksanakan mencakup luasan 178 Ha. Pada komoditas Kelapa masih tingginya serangan hama menyebabkan penurunan jumlah populasi tanaman, selain usia tanaman juga mempengaruhi produktivitas tanaman. Upaya peremajaan telah dilaksanakan setiap tahun dan pada tahun 2015 telah dilaksanakan peremajaan kelapa seluas 142 ha. Sedangkan produksi tembakau tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena tidak ada penambahan areal tanam namun produktivitasnya agak lebih baik dari tahun sebelumnya.

Selain hal tersebut diatas, pada tahun 2015 kondisi iklim sedikit kurang menguntungkan untuk kegiatan pertanian, meskipun rata-rata curah hujan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2014 namun tidak signifikan dan tidak merata sebarannya, yaitu data curah hujan rata-rata tercatat dari 1.165 mm mm menjadi 1.186 mm namun waktu musim hujan sangat sulit diprediksi. Hal ini sangat berpengaruh pada pola tanam padi dan palawija sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas tanaman. Sementara serangan hama penyakit tanaman pertanian meskipun tidak sampai terjadi puso namun masih ditemukan serangan ringan akibat Hama Putih Palsu, kresak dan hama penggerek batang.

Untuk mengatasi beberapa hambatan di atas, telah dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan produktivitas dengan memfasilitasi kepada para petani untuk menggunakan bibit varietas unggul/hibrida baik untuk tanaman maupun ternak.
- Memfasilitasi penerapan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu.
- Mengedepankan metode pengendalian secara PHT (Pengendalian Hama Terpadu), agar supaya tanaman bisa aman tetapi lingkungan juga aman dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang kurang bijak.

Tidak tercapainya target produksi kayu rakyat dikarenakan produksi kayu bulat hutan rakyat tidak dapat terdata keseluruhan. Peredaran kayu rakyat setelah terbitnya peraturan menteri kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak yang mana penerbitan SKAU dilaksanakan oleh Kepala Desa / Perangkat yang telah memenuhi kualifikasi sebagai penerbit sementara belum semua kepala desa menyampaikan hasil penerbitan SKAU sebagai dasar pelaporan produksi kayu rakyat. Sehingga salah satu upaya untuk penertiban tata usaha kayu rakyat pada tahun 2015 telah dilaksanakan sosialisasi peraturan industri primer hasil hutan

dengan peserta kepala desa atau perangkat desa yang ada di Kabupaten Rembang meskipun belum secara menyeluruh.

Di sektor perikanan, hasil produksi perikanan laut sudah mendekati capaian kinerja sudah mendekati apa yang telah ditargetkan, beberapa faktor yang menghambat adalah adanya fluktuasi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan dan disamping itu juga diberlakukannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang larangan penggunaan alat tangkap tertentu. Hal ini menyebabkan selama beberapa waktu para nelayan tidak melakukan aktivitasnya untuk menangkap ikan di laut.

Sedangkan kegiatan perikanan budidaya mengalami peningkatan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya program pemberdayaan usaha mina pedesaan yang memicu berkembangnya kelompok-kelompok pembudidaya ikan, di samping dengan adanya bantuan sarana prasarana perikanan budidaya kepada kelompok pembudidaya ikan.

Sasaran 10. Meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha.

Sasaran meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha dimaksudkan untuk menjawab permasalahan masih lemahnya jaringan pemasaran produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan, yang ditandai dengan masih lemahnya daya tawar produk.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan hortikultura, peningkatan pelaku usaha sektor perkebunan, peningkatan pelaku usaha sektor peternakan dan peningkatan kelompok usaha sektor kehutanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.12
Capaian Indikator Kinerja meningkatnya kemampuan petani dalam pengelolaan usaha

NO.	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2015		CAPAIAN (%) 2015
		TARGET	REALISASI	
	Peningkatan jumlah pelaku usaha (%)			
	a. Tanaman Pangan dan hortikultura	5	6,72	134,49
	b. Perkebunan	5	4,13	82,60
	c. Peternakan	5	6,48	129,69
	d. Kehutanan	5	3,62	72,40
	Rata-rata			104,79

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan kegiatan diantaranya promosi atas hasil produksi unggulan daerah melalui event pameran dan promosi agro soropadan expo, selain itu juga pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi pertanian yang totalnya mencapai 28 Km dari dana DAK dan APBD Kabupaten Rembang dalam rangka memberikan kemudahan angkutan saprodi maupun hasil panen bagi usaha sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

Keberhasilan sasaran ini juga karena adanya peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan melihat peluang dan potensi usaha pada sektor pertanian dan kehutanan terlebih pada sektor peternakan terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pelaku usaha baik tingkat kelompok, perorangan maupun badan usaha, tercatat peningkatan pelaku usaha sektor tanaman pangan dan hortikultura dari 461 unit menjadi 492 unit, sektor peternakan dari 293 unit menjadi 312 unit, sektor perkebunan dari 218 unit menjadi 227 unit dan sektor kehutanan dari 331 unit menjadi 343 unit. Sementara yang melakukan ijin usaha pada kantor KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu) pada tahun 2014 tercatat sejumlah 159 pelaku usaha yang melakukan ijin usaha baru dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 227 usaha baru di sektor pertanian dan kehutanan.

Selain itu juga adanya dukungan program agribisnis melalui kegiatan pengembangan agribisnis peternakan dan pengembangan agribisnis perkebunan serta program pengembangan pertanian unggulan melalui kegiatan pengembangan sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga sangat membantu pengembangan kawasan unggulan.

Dari indikator capaian tersebut peningkatan pelaku usaha sektor kehutanan yang paling rendah (72,40 %). Hal ini dimungkinkan karena pada sektor kehutanan adanya penurunan permintaan akan pasar luar negeri, juga persediaan bahan baku kayu rakyat yang mulai berkurang. Dari data potensi hutan rakyat yang ada, luas hutan rakyat yang mencapai 12.000 hektar hampir 70 % nya adalah kelas umur I dan II (yaitu antara 1 – 10 tahun). Sehingga untuk meningkatkan usaha di sektor kehutanan perlu adanya terobosan peluang pasar, dan peningkatan kualitas produksi hasil hutan dan Supervisi para pelaku usaha kehutanan khususnya industri penggajian IUIPHHK

Sasaran 11. Tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha

Sasaran tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha dimaksudkan untuk menjawab isu strategis rendahnya investasi dan jalinan kemitraan di daerah. Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; peningkatan stimulan untuk kelompok tani tanaman pangan dan

hortikultura, kelompok tani perkebunan, kelompok tani peternakan dan kelompok tani kehutanan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.13

Capaian Indikator Kinerja tersedianya akses permodalan untuk pengembangan usaha

NO.	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2015		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	2015
1.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Pangan dan Hortikultura (%)	5	4,94	98,80
2.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani perkebunan (%)	5	3,97	79,40
3.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani peternakan (%)	5	4,63	92,60
4.	Peningkatan stimulan untuk kelompok tani Kehutanan (%)	5	4,91	98,20
	Rata-rata			92,25

Pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, pencapaian sasaran ini didukung oleh peningkatan stimulan bantuan subsidi benih dari Kementerian Pertanian dalam kegiatan GP-PTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu), pada tahun 2015 stimulan yang diberikan berupa bantuan subsidi benih padi hibrida beserta saprodi pendukungnya untuk lahan seluas 1.500 hektar, subsidi benih jagung hibrida beserta sarana pendukungnya untuk lahan seluas 500 hektar dan subsidi benih kedelai beserta sarana pendukungnya untuk lahan seluas 1.480 hektar. Juga adanya kegiatan perluasan areal tanam kedelai 500 hektar dan jagung 6572 hektar. Sedangkan pengembangan tanaman hortikultura seluas 52 hektar tanaman cabe dan 25 hektar tanaman bawang merah.

Pada sektor perkebunan, pencapaian sasaran ini didukung oleh peningkatan stimulan bantuan pengembangan bibit unggul perkebunan berupa rawat ratoon tebu seluas 1.383 Ha, pengembangan tanaman perkebunan komoditas kelapa seluas 150 Ha, dan kegiatan optimasi lahan berupa kegiatan pengembangan tanaman kopi seluas 20 ha dan cengkeh 90 Ha.

Pencapaian sasaran sektor peternakan, didukung oleh peningkatan stimulan bantuan ternak pada kelompok ternak yaitu dari sumber dana APBD Kabupaten Rembang yaitu : kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan berupa fasilitasi bantuan pengadaan pakan konsentrat beserta pelatihannya; kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat berupa bantuan 4 ekor sapi dan 30 ekor kambing; kegiatan

pemberdayaan kelompok peternakan berupa bantuan 6 ekor sapi potong; kegiatan pembibitan dan perawatan ternak sebanyak 250 ekor ayam kampung.

Sedangkan tidak tercapainya target kinerja stimulan untuk kelompok tani hutan dikarenakan fasilitasi kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat dari pemerintah pusat mulai dikurangi seiring dengan berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Rembang, yaitu menjadi 5 kelompok pada tahun 2015. Sementara fasilitasi pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi juga mendapatkan Rp. 250.000.000,- untuk 5 kelompok. Beberapa terobosan lain yang sudah dilaksanakan adalah dengan mengenalkan kepada kelompok tani hutan berupa pengembangan hasil hutan bukan kayu diantaranya penanaman empon-empon dibawah tegakan hutan rakyat dan pengembangan porang dikawasan hutan.

Selain itu akses permodalan dari perbankan juga menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam rangka penyediaan kredit untuk pelaku usaha di sektor pertanian, yaitu melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Dari data yang ada di Dinas Pertanian dan Kehutanan tercatat bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah mengucurkan kredit untuk kegiatan kelompok tani dan kelompok peternak sebesar Rp. 11.436.600.000,- untuk 110 kelompok dan ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,09 % karena jika dibandingkan tahun 2014 hanya sebesar Rp. 9.937.000.000,- untuk 83 kelompok.

Sasaran 12. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian.

Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan salah satu sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian untuk menjawab issue strategis mengenai kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan publik yang belum memadai. Pemerintah Kabupaten Rembang mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian melalui kegiatan pembangunan embung, pembangunan Jalan usaha tani, pembangunan jaringan irigasi dll.

Prasarana pertanian yang sangat diperlukan dan diperhatikan keberadaanya adalah jaringan irigasi. Pembangunan waduk dan embung-embung pertanian serta jaringan irigasi yang baru serta memperbaiki jaringan irigasi yang sudah rusak merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut.

Untuk mengetahui tingkat capaian sasaran ini dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator antara lain; bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi, terbangunnya embung atau waduk yang mampu menampung kelebihan air pada musim hujan guna memenuhi kebutuhan air baku serta terciptanya

infrastruktur pertanian (jalan pertanian, jalan produksi, JIDES, JITUT dan dam Parit). Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran ini sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel III.14
Capaian Indikator Kinerja meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
1.	Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri jaringan irigasi	(%)	20	25,95	129,75	47,19%
2.	Pembangunan embungpertanian	unit	7	1	14,29	285,71%
Capaian Kinerja Sasaran Rata-rata					72,02	166,45

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan infrastruktur dasar pertanian khususnya pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

Dari hasil capaian kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pertanian cukup yaitu 72,02%.

Realisasi dari target pembangunan embung kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 14,29%. Pencapaian target ini karena tahun 2015 hampir seluruh kegiatan konstruksi tidak berjalan karena adanya permasalahan hukum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.

Pencapaian sasaran indikator Bertambahnya luas lahan pertanian dan perkebunan yang teraliri oleh jaringan irigasi melebihi target yaitu sebesar 129,75%. Hal tersebut didukung adanya program pengembangan jaringan irigasi pertanian/perkebunan melalui pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang mengaliri luasan sawah sebesar 26693 ha areal teririgasi meningkat 5500 ha dari tahun 2014.

Sasaran 13. Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Optimalisasi intensifikasi, efisiensi dan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Rembang.

Tabel III.15

Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

No	Indikator sasaran	Satuan	TARGET 2015	REALISASI 2015	Capaian % 2015
1	Meningkatnya intensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah.	Rp	182.191.199.000	200.953.096.299,80	110,30

Upaya untuk meningkatkan penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan intensifikasi pemungutan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik itu dari pajak atau retribusi daerah. Dari pajak daerah di Kabupaten Rembang diantaranya bersumber dari pajak restoran/ rumah makan, pajak hiburan, pajak mineral atau yang akrab dikenal dengan pajak gol c, pajak sarang burung, pajak parkir, pajak air tanah, pajak hotel dan pajak reklame serta pajak bumi dan bangunan.

Dengan meningkatnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, mendorong pula pertumbuhan usaha. Salah satunya adalah dengan bertambahnya hotel – hotel baru dan keinginan pihak ketiga untuk berinvestasi di Kabupaten Rembang.

Secara umum Kemandirian suatu daerah biasanya dilihat dari jumlah besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai suatu daerah dalam satu periode. Namun demikian hal tersebut dapat diukur dari kemampuan daerah tersebut untuk mengelola kegiatan pemerintahan daerahnya dan menggali potensi keuangan di wilayahnya secara optimal, meningkat tiap tahunnya dan dapat dikembalikan kembali ke masyarakat sebagai bentuk pembangunan daerah.

Intensifikasi berikut dengan *ekstensifikasi* Pendapatan Daerah merupakan bagian dari optimalisasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian daerah dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di dalamnya. Tujuan dari intensifikasi pajak dan retribusi daerah adalah mengintensifkan peningkatan penerimaan pajak, karena Intensifikasi adalah upaya meningkatkan pungutan atas suatu subyek dan obyek `pendapatan daerah yang potensial baik yang sudah atau belum tergal dengan memperbaiki kinerja pemungutannya. Untuk mencapai target penerimaan PAD yang diharapkan tentunya memerlukan strategi yang jitu mengingat rasio kepedulian dan kesadaran masyarakat

sebagai objek pajak dan retribusi demikian rendah. Malah cenderung untuk menghindari, bahkan tidak jarang melakukan penolakan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pada kurun tahun 2012-2013 telah dilakukan pelimpahan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pusat ke daerah. Namun dengan ketidakjelasan data yang dilimpahkan ke daerah, dimana banyak sekali data – data yang tidak update bahkan secara ekstrim dapat dikatakan tidak akurat, diantaranya ada wajib pajak yang telah membayar pajak, namun dalam data yang terdaftar tercatat belum membayar pajak, sehingga menciptakan opini yang kurang baik.

Lebih buruk menciptakan penolakan dalam sebagian masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak akibat kekecewaan pengelolaan data pajak. Dari kondisi ini perlu adanya langkah – langkah *sistematik yang lebih efisien dan efektif serta lebih humanis. Pertama*, memperluas basis penerimaan (pemetaan wilayah subyek dan obyek pajak/retribusi). *Kedua*, memperkuat proses pemungutan. *Ketiga*, meningkatkan pengawasan. *Keempat*, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. *Kelima*, perencanaan yang lebih baik. *Keenam*, apresiasi pada obyek pajak dan retribusi daerah.

Pemetaan wilayah subyek dan obyek pajak/retribusi dilakukan lebih pada upaya untuk memperluas subyek dan obyek pajak dan retribusi dan meminimalkan kecenderungan bagi wajib pajak/ retribusi yang menghindari atau belum memenuhi kewajiban mereka. Terutama terhadap wajib pajak orang pribadi, mengingat masih banyak subyek pajak yang penghasilannya melebihi *PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)* tetapi belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan kata lain perlu identifikasi obyek – obyek yang dapat dipungut dan menambah pendapatan daerah, serta mengidentifikasi, memperbaiki data dan jumlah wajib pajak/ retribusi potensial. Sekaligus memperbaiki penilaian, atau prediksi prosentase jumlah penerimaan pada tiap jenis pajak dan retribusi daerah.

Memperkuat proses pemungutan diantaranya dengan disusunnya peraturan daerah dan dilakukan perhitungan untuk penyesuaian tarif retribusi dan penetapan nilai pajak. Meningkatkan pengawasan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara rutin atau berkala diantaranya melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah.

Bentuk pendekatan persuasif dan edukatif pada wajib pajak/ retribusi lebih ditekankan pada proses pemungutan pajak dan retribusi terhutang tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu (piutang), atau langsung dengan surat tagihan (khusus untuk piutang yang memiliki kemungkinan bisa tertagih) dimaksudkan agar target penerimaan yang *direncanakan tercapai*. Dan sebagai bentuk pengawasan yang intens

dimungkinkan diberlakukan sanksi pada wajib pajak dan retribusi yang secara nakal menunggak atau sengaja mengabaikan kewajibannya.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan memperbaiki prosedur administrasi pembayaran melalui penyederhanaan administrasi, atau kemudahan dalam proses pembayaran. Adanya *sistem administrasi modern pajak* dengan didukung *SDM yang potensial dan berkualitas* membawa perubahan yang cukup signifikan dari pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi. Karena bagaimanapun *perubahan mekanisme, mutu pelayanan*, membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur. Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi diantaranya *Call Centre, sarana pengaduan, dan kemudahan pembayaran* yang saat ini bisa dilakukan *secara online di seluruh Bank Jateng*. Bentuk kemudahan ini, juga diakomodir secara langsung oleh Bank Jateng di Kabupaten Rembang selaku mitra kerja pemerintah daerah dengan menyediakan *sarana mobil kas keliling* untuk menjangkau kinerjanya di 14 Kecamatan di Kabupaten Rembang, untuk datang secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengingat baru 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pamotan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sulang yang dapat dilakukan pembayaran secara langsung di Bank Jateng.

Dengan kemudahan tersebut diharapkan pula adanya efisiensi sekaligus meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, setidaknya sampai dengan tahun anggaran 2015 target peningkatan atas intensifikasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.182.191.199.000,00 terpenuhi sebesar Rp.200.953.096.299,80 atau 110,30%

Berikut adalah realisasi penerimaan pendapatan daerah atas Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2015 :

Uraian	2015		%	2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	37.023.000.000,00	42.306.265.606,00	114,27	38.643.241.316,00
Pendapatan Retribusi Daerah	29.756.100.500,00	32.273.570.803,00	108,46	41.529.546.666,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.429.911.000,00	4.447.117.385,00	100,39	6.183.205.661,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.747.727.829,00	121.926.142.505,80	107,19	79.174.931.844,27
Jumlah	184.956.739.329,00	200.953.096.299,80	108,65	165.530.925.487,27

Pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas, untuk pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar Rp.42.306.265.606,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.37.023.000.000,00 atau 114,27% meningkat sebesar Rp.3.663.024.290,00 dari realisasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 34.067.851.784,00. Untuk pendapatan

retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.32.273.570.803,00 melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.29.756.100.500,00 atau 108,46% namun menurun sebesar Rp.9.255.975.863,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 41.529.546.666,00.

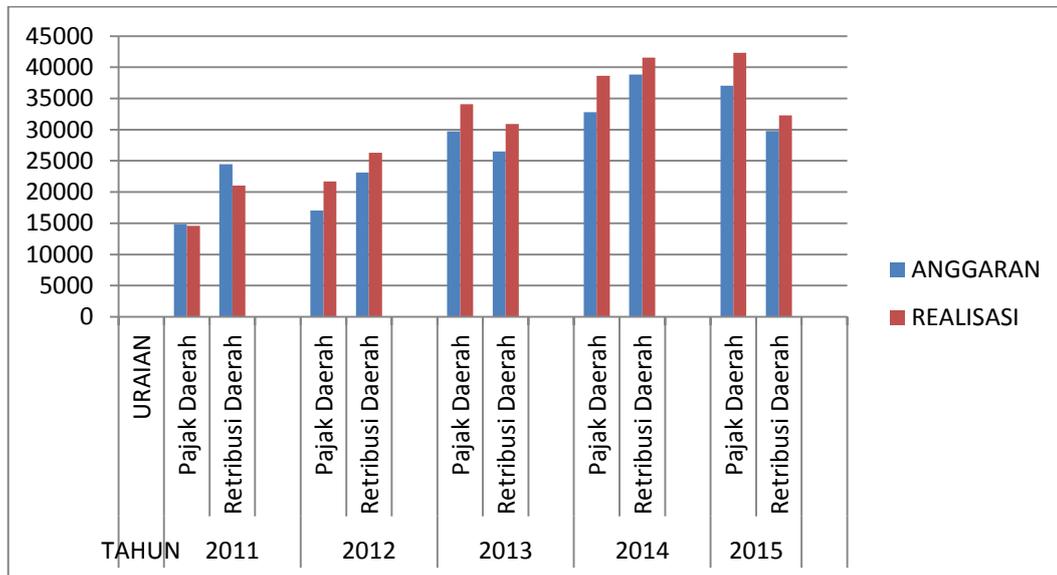
Bila di perbandingkan jumlah penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		Peningkatan Realisasi	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
2011	Pajak Daerah	14.850.000.000,00	14.568.408.017,00	98,10	0,00	0,00
	Retribusi Daerah	24.433.899.000,00	21.051.282.763,00	86,16	0,00	0,00
2012	Pajak Daerah	17.063.722.000,00	21.691.251.109,00	127,12	7.122.843.092,00	48,89
	Retribusi Daerah	23.136.304.700,00	26.290.263.055,00	113,63%	5.238.980.292,00	24,89
2013	Pajak Daerah	29.742.877.000,00	34.067.851.748,00	114,54	12.376.600.639,00	57,06
	Retribusi Daerah	26.481.195.000,00	30.924.102.833,00	116,78	4.633.839.778,00	17,63
2014	Pajak Daerah	32.816.917.000,00	38.643.241.316,00	117,75	4.575.389.568,00	13,43
	Retribusi Daerah	38.845.073.000,00	41.529.546.666,00	106,91	10.605.443.833,00	34,30
2015	Pajak Daerah	37.023.000.000,00	42.306.265.606,00	114,27	3.663.024.290,00	9,48
	Retribusi Daerah	29.756.100.500,00	32.273.570.803,00	108,46	(9.255.975.863,00)	(22,29)

Tabel Target Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

*) data realisasi TA unaudited (sumber data LKPD TA 2015 unaudited)

Grafik Progres Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5 tahunan
 Dalam (1.000.000)



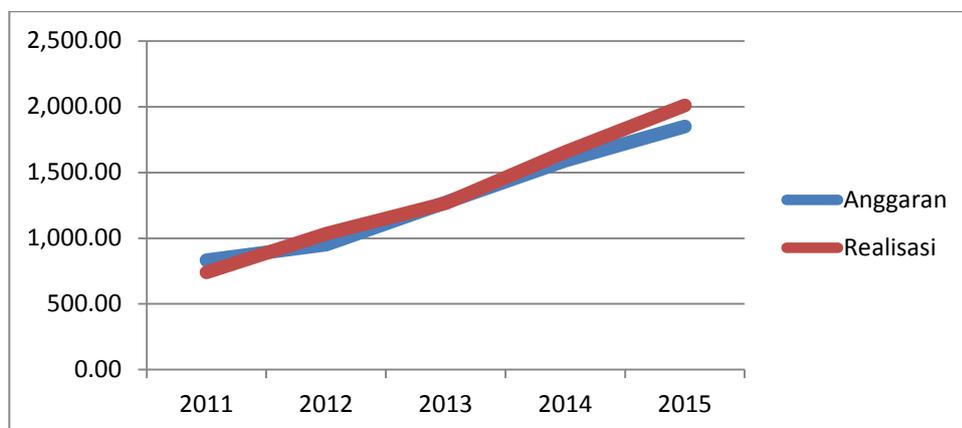
Dari kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, perolehan penerimaan dari pajak daerah tampak cukup sistematis dan signifikan peningkatannya. Dimana dari tiap tahunnya selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Dari perolehannya di tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 38.643.241.316,00 terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.663.024.290,00 atau 9,48% tercapai di tahun anggaran 2015 sebesar Rp.42.306.265.606,00.

Meskipun melebihi target di tahun anggaran 2015 ini, namun dari prosentase kenaikan atau penurunan perolehan dari retribusi daerah bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan 22,29%. Penurunan ini sebenarnya disebabkan adanya perubahan target penerimaan retribusi di tahun anggaran 2015 terkait retribusi menara karena adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-XI/2014 mengabulkan sekaligus menghapus Penjelasan Pasal 124 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal dua persen dari nilai jual objek pajak (NJOP)..

Namun demikian secara makro gambaran umum peningkatan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari peningkatan realisasi PAD dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Grafik peningkatan PAD selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
 Dalam (1.000.000)



Dari grafik di atas tampak adanya trend positif peningkatan kapasitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rembang. Adanya perencanaan yang lebih baik dari tahun ke tahun di harapkan pola intensifikasi penerimaan daerah dapat memberikan kontribusi yang efektif dari sisi pendapatan daerah. Koordinasi antar wilayah secara internal dan eksternal baik vertical atau horizontal dengan perangkat kerjanya (*fiskus*), merupakan bagian yang cukup penting dalam peningkatan pola efisiensi dan efektifitas intensifikasi/ekstensifikasi.

Sebagai cara untuk memperpendek jarak antara wajib pajak/retribusi daerah dengan fiskusnya dibuatlah tim kerja di Kabupaten Rembang yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok rayon yang mencakup 14 (empat belas) Kecamatan. Dengan pembagian tim kerja ini selain dapat meningkatkan koordinasi di masing – masing wilayah, juga diharapkan bisa memperoleh update data untuk pemuktahiran data base. Mengidentifikasi kelompok mana dari wajib pajak/retribusi daerah yang masuk kategori lancar dan tidak bisa tertagih.

Dan apresiasi kepada wajib pajak/ retribusi daerah yang telah rutin atau rajin dalam pemenuhan kewajibannya adalah sebuah pola intensifikasi penerimaan daerah yang paling *humanis*. Karena seperti mata rantai, optimalisasi intensifikasi (ekstensifikasi) yang menciptakan kesadaran membayar pajak/ retribusi di masyarakat akan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang artinya besarnya PAD daerah.

Sasaran 14. Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat

Capaian sasaran Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

Tabel III.16
Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat.

No	Indikator sasaran	Satuan	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN % 2015
1	Terwujudnya sumber PAD baru yang tidak membebani masyarakat	Rp	4.004.000.000,00	4.447.116.445,00	111,07%

Wujud dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mencoba menggali sumber-sumber baru pendapatan daerah yang tidak membebani masyarakat. Dan untuk saat ini bentuk optimalisasi dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah diluar penerimaan dari pajak dan retribusi yang tidak membebani masyarakat adalah dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di kabupaten Rembang ditambah dengan penanaman modal di Bank Jateng Cabang Rembang sebagai bentuk investasi permanen yang merupakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan nilai capaian kinerja yang telah ditetapkan tercapai 111,07%Ini tercermin dari nilai perolehan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk TA 2015 capaian perolehannya sebesar Rp. 4.447.116.445,00 atau 99,37 dari anggaran sebesar Rp. 6.222.204.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.736.089.216,00 dibandingkan realisasi TA 2014 sebesar Rp6.183.205.661,00.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Rembang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PD BPR BKK, dan pembagian deviden PT.Bank Jateng Tahun Buku 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2015		%	2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Deviden PT Bank Jateng	1.850.000.000,00	1.867.205.445,00	100,93%	2.197.258.419,00
Cash in Bank Jateng	0,00	0,00	0,00%	2.254.000.000,00
PD BPR-BKK Lasem	2.208.819.000,00	2.208.819.000,00	100,00%	1.451.631.973,00
PD BPR-BKK Kaliori	371.092.000,00	371.092.000,00	100,00%	280.315.269,00
Jumlah	6.222.204.000,00	4.447.116.445,00	71,47%	6.183.205.661,00

Sasaran 15 : Meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan.

Capaian sasaran meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel III.17

Capaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas proses pembelajaran pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Capaian % 2015
1	Angka kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs	97.00%	100%	103.09
2	Angka kelulusan UN SMA/MA/SMK	92.00%	100%	108.70
3	TK/RA/SD/MI Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	80%	100%	125.00
4	SMP/MTs/SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik	100%	100%	100
	RATA – RATA			109.20

Rata-rata persentase pencapaian target untuk sasaran 18 adalah 109.20 %. Dari empat indikator yang terdapat pada sasaran 18 semua telah mencapai 100% atau lebih. Kalau dibandingkan dengan data pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sampai dengan 2014 berturut-turut mencapai 76,87%; 94,55%; 114,04%. Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 lebih disebabkan karena peningkatan target, sedangkan realisasi tidak mungkin melebihi 100 %. Dengan melihat realisasi masing-masing indikator sudah mencapai 100% Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang berkualitas baik.

Kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran 18 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Ujian SD/SMP/SMA/SMK
2. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di Satuan dikdas
3. Pengembangan Materi Belajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan TIK
4. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK
5. Bantuan fasilitasi penyelenggaraan UN

Sasaran 16 : Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi

Capaian sasaran Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.18

Capaian indikator kinerja sasaran tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikat profesi

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	Capaian
		2015	2015	% 2015
1	Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik	80.00%	54.83%	68.54
2	Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	100%	92.33%	92.33
3	Guru TK/RA yang layak mendidik dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	55%	49.18%	89.42
4	Guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	75%	87.25%	116.33
5	Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik	90%	48.48%	53.87
6	Guru SMA/SMK/MA bersertifikat pendidik	80%	34.63%	43.29
7	Guru SMA/SMK/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan	100%	94.65%	94.65
	RATA – RATA			79.78

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 19 adalah 79,78 %. Dari sisi pencapaian kinerja dengan indikator jumlah atau persentase guru yang layak mengajar atau memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Rembang dapat dilihat telah mendekati dan ada yang melebihi 100%. Hal ini berarti bahwa target untuk memenuhi guru pada semua jenjang pendidikan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan telah dicapai. Keberhasilan ini banyak ditunjang oleh adanya keberhasilan program penyetaraan S1 melalui Universitas Terbuka dan adanya program pemberian subsidi kepada guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

Akan tetapi untuk pencapaian kinerja dengan indikator persentase guru pada semua jenjang pendidikan yang telah bersertifikasi di semua Jenjang masih berada di di bawah 100% dari target yang ada. Bahkan untuk jenjang SD/MI baru 54,83% guru yang memiliki sertifikat pendidik. Masih rendahnya tingkat pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh adanya kuota dari pemerintah pusat untuk pemberian sertifikat

pendidik. Selain itu adanya guru bersertifikat pendidik yang pensiun atau meninggal dunia, sedangkan penggantinya guru yang belum bersertifikat pendidik, hal itu menyebabkan prosentase jumlah guru bersertifikasi menurun kalau dibandingkan dengan tahun lalu..

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ke 17 adalah:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
2. Pembinaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Pendidikan Lanjutan Bagi pendidik untuk memenuhi standart kualifikasi
4. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
5. Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
6. Peningkatan manajerial kepala SD/SMP/SMA/SMK
7. Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan
8. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD
9. Bantuan penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi formal
10. Bantuan pengembangan profesi pendidik formal
11. Bantuan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik

Sasaran 17 : Terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan

Capaian sasaran terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan dapat terlihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.19

Capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya penyedia sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Capaian % 2015
1	TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	50%	33,17%	66.34
2	Meningkatnya jumlah lembaga PAUD dan TK	100%	113.24%	113.24
3	TK/RA menetapkan manajemen sekolah berbasis sekolah	80,%	100%	125.00
4	Ruang kelas SD/MI sesuai standar	76%	92.59%	121.83
5	SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar	60%	83.73%	139,55
6	SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA dan Komputer	70%	46.81%	66,87

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	Capaian
		2015	2015	% 2015
7	SD/MI memiliki Laboratorium IPA dan komputer	20%	24.40%	122.00
8	SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	95%	77.70%	81.79
9	Lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan	75%	66,70%	88.93
10	Meningkatnya tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktik kursus/pelatihan kelompok belajar, usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan	90%	81,81 %	90.90
11	Lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah	100%	100%	100
12	Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi	75%	40,74%	54.32
RATA – RATA				93,25

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 20 adalah 93.252 %. Keberhasilan pencapaian ini ditunjang oleh adanya komitmen penuh dari pemerintah dengan memberikan dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat (melalui DAK bidang pendidikan), pemerintah provinsi (melalui bantuan keuangan provinsi) serta dari Pemerintah Kabupaten Rembang (melalui alokasi anggaran pada APBD) yang cukup untuk penyediaan sarana prasarana bidang pendidikan. Selain itu dukungan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan-kegiatan tersebut juga cukup baik sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi efektif dan efisien.

Secara rata-rata sebenarnya sudah mendekati 100%, tetapi kalau dilihat per indikator masih ada dua indikator yang masih jauh dari target, yaitu indikator keenam, SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan Komputer sesuai standar hanya mencapai 66,87 %. Hal ini disebabkan pembangunan laboratorium IPA di SMP/MTS maupun jenjang lain hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Adapun fokus pemerintah saat ini baru pada memperbaiki ruang kelas yang rusak itu pun untuk tahun 2015 pembangunan yang berasal dari sumber dana DAK tidak dapat berjalan. Indikator lain yang masih jauh dari target adalah indikator kedua belas yaitu Lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi, hanya tercapai 54.32 %.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ketiga adalah:

1. Pembangunan sarana dan prasarana bermain
2. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

3. Pembangunan perpustakaan sekolah
4. Bantuan Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal
5. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Luar
6. Bantuan Pengadaan alat Bermain di Dalam
7. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB
8. Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB
9. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB
10. Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan
11. Penyelenggaraan Akreditasi lembaga PNF
12. Penyediaan sarana pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun.

Sasaran 18 : Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan

Capaian sasaran Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.20

Capaian indikator kinerja sasaran Terwujudnya Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi pada semua jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Capaian % 2015
1	APK PAUD	90%	93.73%	104.14
2	APK SD/MI	105%	100.160%	95.3
3	APK SMP/MTs	98,46%	101,12%	102,70
4	APK SMA/SMK/MA	70%	77.36%	110.51
5	APM SMP/MTs	76.%	76,50%	100,66
6	APM SMA/SMK/MA	55%	48.12%	87,49
7	Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C	100%	35.1%	35,10
8	Angka melek huruf	100%	99,65%	99,65
9	Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/Kejuruan	85%	88.46%	104.07
	RATA – RATA			93.29

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 21 adalah 93.29 %. Dari kesembilan indikator yang mencapai target ada lima indikator. Yaitu APK PAUD, APK SMP/MTs, APK

SMA,SMK,MA dan angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA,MA,SMK. Indikator yang lain belum dapat mencapai target. Indikator yang masih perlu usaha keras untuk mencapainya adalah indikator ketujuh yaitu Penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C hanya mencapai 35,10%. Kondisi tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Penduduk usia sekolah ada yang bersekolah di pondok pesantren diniyah pagi hari. Hal itu menyebabkan tidak terdata di sekolah formal dan nonformal.
2. Siswa lulusan SMP/MTs ada yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA maupun paket C disebabkan kondisi berkebutuhan khusus dan tidak mau sekolah inklusi atau ke SLB, atau kondisi lulusan SMP/MTTs tersebut sudah malas dan tidak mau melanjutkan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran keempat adalah :

1. Penyediaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB Negeri SMP/SMPLB
2. Penyelenggaraan operasional Sekolah Gratis SMP/SMA/SMK Negeri dan swasta
3. Penyelenggaraan operasional SKB Negeri
4. Penyelenggaraan paket B Setara SMP
5. Penyelenggaraan paket C Setara SMA
6. Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan

Sasaran 19 : Tersedianya beasiswa bagi penduduk

Capaian sasaran Tersedianya beasiswa bagi penduduk dapat dilihat indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.21

Capaian indikator kinerja sasaran tersedianya beasiswa bagi penduduk

NO	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Capaian % 2015
1	Angka Putus Sekolah SD	0,01%	0.02%	-200
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.05%	0.19%	-180
3	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0.15%	0,38%	-53.33
4	Penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/kelompok belajar usaha/magang (%)	40%	37%	92.50
	RATA – RATA			-113.61

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 22 adalah-113 %. Ada tiga indikator pada sasaran ke 22 yang mengalami minus yaitu indikator angka putus sekolah di SD, SMP/MTs, dan SMA/SMK. Tidak tercapainya target pada ketiga indikator tersebut

disebabkan masih adanya siswa yang putus sekolah. Penyebab putus sekolah ternyata tidak disebabkan faktor ekonomi. Sebagian besar penyebab putus sekolah adalah, sakit permanen, meninggal, siswa berkebutuhan khusus tetapi tidak mau sekolah di SLB, dan pernikahan dini.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kelima adalah:

1. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
2. Bantuan beasiswa siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu

Sasaran 20 :Meningkatnya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

Capaian sasaran Meningkatkan kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.22

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET 2015	REALISASI 2015	Capaian % 2015
1	Lulusan SMK diterima didunia kerja sesuai dengan keahliannya	50%	30%	64,28
2	Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja	45%	37.95%	84.33
3	Lulusan program paket C dapat memasuki dunia kerja	50%	33,40%	73,78
	RATA – RATA			74.13

Rata-rata pencapaian target pada sasaran 23 adalah 73,96 %. Ketiga indikator pada sasaran ke 23 ini belum mencapai target. Belum tercapainya indikator-indikator ini disebabkan antara lain sedikitnya lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tertentu, sedangkan para lulusan SMK, paket C, ataupun kursus berprinsip yang penting mendapatkan pekerjaan walaupun tidak sesuai dengan keahliannya. Kalau dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya tahun ini sudah mengalami kenaikan. Tahun lalu pencapaian sasaran ini hanya 71%. Dengan demikian dapat dikatakan sasaran kinerja ke 23 pada tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2013.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kedua puluh tiga adalah:

1. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
3. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja SMK
4. Bantuan fasilitasi Carier Center SMK

5. Bantuan Fasilitas Bussines Center SMK
6. Bantuan fasilitasi pemasaran tamatan SMK
7. Bantuan kursus kewirausahaan desa
8. Bantuan kelembagaan kursus dan pelatihan

Sasaran 21 : Tersedianya tenaga Medis yang memadai

Capaian kinerja sasaran tersedianya tenaga kesehatan yang memadai dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.23
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya tenaga medis yang memadai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN (%) 2015	CAPAIAN (%) 2014
1	Rasio dokter Spesialis per 100.000 penduduk	6	2,59 per 100 rb pendd	43,2	45,83
2	Rasio dokter per 100.000 per penduduk	40	9,24 per 100 rb pendd	23,1	25,53
3	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	11	1,78 per 100 rb pendd	16,2	14,73
Rata – rata				27,5	28,70

Untuk mengetahui pencapaian sasaran tersedianya tenaga medis yang memadai dengan melihat rasio tenaga medis yang meliputi dokter spesialis, dokter dan dokter gigi terhadap jumlah penduduk dengan capaian rata – rata nya adalah 27,5 % (kurang berhasil). Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014 capaiannya tidak jauh berbeda yaitu 27,67 % pada tahun 2013, 28,70 % pada tahun 2014 dan 27,5 % pada tahun 2015. Apabila dilihat dari capaiannya yang masih kurang berhasil maka diperlukan upaya untuk penambahan dokter spesialis , dokter umum dan dokter gigi, hal ini akan sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang.

Sasaran 22 :Tersedianya obat-obatan yang memadai

Capaian kinerja sasaran tersedianya obat-obatan yang memadai dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.24

Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya obat-obatan yang memadai

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	CAPAIAN
		2015		2015		(%) 2015	(%) 2014
1	Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100	%	100	%	100	97,55
2	Pengadaan obat esensial	100	%	100	%	100	95
3	Ketersediaan obat sesuai standar	100	%	100	%	100	95
Rata – rata						100	95,85

Untuk pencapaian sasaran ketersediaan obat – obatan yang memadai dapat dilihat dari indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan, Pengadaan obat esensial dan ketersediaan obat sesuai standar bagi fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas Pembantu, Puskesmas, maupun Rumah Sakit, dimana capaian kerjanya telah mencapai 100 %. (berhasil) . Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014, pada tahun 2015 ada peningkatan dari 98 % (th 2013) , 95,85 % (th 2014) menjadi 100 % (th. 2015). Peningkatan capaian kinerja sasaran tersedianya obata – obatan yang memadai ini tidak terlepas dari peningkatan anggaran pengadaan obat dari Sumber DAK dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui dana Kapitasi dimana pengadaan obat – obatan di Puskesmas dapat dibiayai dari dana JKN tersebut.

Sasaran 23 :Tersedianya peralatan medis yang memadai

Capaian kinerja sasaran tersedianya peralatan medis yang memadai dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.25

Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya peralatan medis yang memadai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	CAPAIAN
		2015		2015		(%) 2015	(%) 2014
	Ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	100	%	63	%	63	62,28
Rata – rata						63	62,28

Dalam pencapaian sasaran ketersediaan peralatan medis yang memadai dapat dilihat dari indikator ketersediaan alat kesehatan sesuai standart, dimana capaian kerjanya baru mencapai 63 % (cukup berhasil). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 capaiannya masih sama yaitu 62,28 % (th. 2014) dan 63 % pada tahun 2015. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2015 tentang Puskesmas, dimana dalam permenkes tersebut dijelaskan adanya peralatan medis yang memadai . Dengan belum berhasilnya sasaran ketersediannya peralatan medis yang memadai tersebut diperlukan upaya pemenuhan ketersediaan alat kesehatan sesuai strandar adalah melalui Program Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya, melalui kegiatan Pengadaan peralatan medis dan non medis untuk Puskesmas dan Puskesmas pembantu baik anggaran DAK, maupun dana Kapitasi JKN

Sasaran 24 : Meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan

.Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.26
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya
pengelolaan penyelenggara pelayanan kesehatan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	CAPAIAN
		2015		2015		(%) 2015	(%) 2014
1	Kasus Kematian Bayi (AKB)	105	ks	134	ks	72,38	91,3
2	Kasus Kematian Ibu (AKI)	7	ks	8	ks	85,7	44
3	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	100	%	100,00	100
4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	%	100	%	100	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :						

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015		REALISASI 2015		CAPAIAN (%) 2015	CAPAIAN (%) 2014
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) per 100.000 penduduk < 15 th	2	per 100 rb pendd < 15 th	1,86	per 100 rb pendd < 15 th	93,1	31
	b. Cakupan balita dengan penderita Pneumonia yang ditangani	100	%	100	%	100	100
	c. Penemuan TB BTA positif (CDR)	> 70	%	66,26	%	94,7	94,86
	d. Angka Kesembuhan TB Paru	85	%	82,67	%	97,3	95,29
	e. Penderita DBD yang ditangani	100	%	100	%	100,00	100
6	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	95	%	88,97	%	93,6	94,02
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	%	100	%	100	125
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	%	99,96	%	100	94,31
9	Cakupan pelayanan nifas	90	%	98,37	%	109,3	90,87
10	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	%	100	%	125	125
11	Cakupan Kunjungan Bayi	90	%	93,85	%	104,3	105,1
12	Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	%	100	%	100	100
13	Cakupan peserta KB aktif	80	%	82,75	%	103,4	104,6
14	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	85	%	64	%	75,3	100
15	Cakupan pelayanan anak balita	85	%	90,3	%	106,2	112,45
Rata – rata						88,58	89,95

.Secara umum pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sudah berhasil yang dapat dilihat dari 19 indikator yang pencapaian indikator kinerja sebesar 88,58 % (berhasil). Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, capaian sasaran pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada tahun 2015 sedikit menurun dari 89,92 % pada tahun 2014 menjadi 88,58 % pada tahun 2015. Hal ini disebabkan masih ada indikator yang belum menunjukkan keberhasilan yaitu indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dimana capaiannya baru 72,38 % (cukup berhasil) dan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang capaiannya 75,3 %.

Apabila dilihat dari masih tingginya kematian bayi tersebut, tidak terlepas dari penyebab kematian bayi yaitu 30,15 % adalah BBLR, 49,26 % adalah penyakit lainnya / penyerta, 14,71 % adalah asfeksia dan 1,47 % adalah pneumonia. Dilihat dari penyebab tersebut Kasus kematian bayi sangat berkaitan dengan kesehatan ibu selama kehamilannya .

. Sedangkan untuk indikator cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 – 24 bulan keluarga miskin , berkaitan dengan pedoman pemberian PMT ASI yaitu tidak boleh pemberian makanan pabrikan, sehingga masih diperlukan upaya untuk penyuluhan dan peningkatan konseling pada ibu balita dalam PMT lokal .

Untuk meningkatkan kinerja meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rembang , beberapa upaya telah dilakukan diantaranya :

1. Peningkatan Program kesehatan ibu dan anak dengan beberapa intervensi kegiatan yaitu : mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil , peningkatan konseling pada ibu hamil dalam memebrikan ASI Eksklusif,
2. Peningkatan Promosi kesehatan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyebar luasan informasi kesehatan baik melalui penyuluhan maupun media elektronik maupun cetak.
3. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Penerapan PPK-BLUD di Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sasaran 25 : Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut

Tabel III.27

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	CAPAIAN
		2015		2015		(%) 2015	(%) 2014
1	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	2	RSU	2	RSU	100,00	100
2	Cakupan kunjungan rawat jalan	15	%	28,19	%	187,93	153,81
3	Cakupan kunjungan rawat inap	1,5	%	2,47	%	164,66	114,49
Rata – rata						150,28	122,77

Untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan, dapat dilihat dari 3 indikator kinerja dimana capaiannya adalah 150,28 % (sangat berhasil), Tercapainya indikator meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas dimana capaian kerjanya adalah 187,93 % dan 164,66 %, yang artinya masyarakat telah memanfaatkan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dengan jumlah kunjungan baru untuk rawat jalan sebanyak 173.935 kunjungan. Dan Kunjungan baru untuk rawat inap adalah 15.248 kunjungan. Hal ini tidak terlepas dari Program Pemerintah yaitu adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS).

Keberhasilan sasaran meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan ini tidak terlepas komitmen bersama stake holder dalam pembangunan kesehatan, diantaranya peningkatan Puskesmas Kaliori dari Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Rawat Inap. Dan Peningkatan Puskesmas PONEK untuk fasilitas persalinan. Selain hal tersebut juga adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamkesda. yang merupakan salah satu Program Empat Pilar Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau.

Sasaran 26 : Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Capaian kinerja sasaran Tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.28
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya
Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015		REALISASI 2015		CAPAIAN (%) 2015	CAPAIAN (%) 2014
1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	%	100	%	100	100
2	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	%	100	%	100	100
3	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	100	%	80,27	%	80,27	100
4	Cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan.	100	%	100	%	100	100
5	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	%	100	%	100	97,47
6	Cakupan Desa Siaga	74,49	%	100	%	134,25	134,25
Rata – rata						102,42	105,29

Untuk melihat pencapaian sasaran tersedianya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat miskin dapat dilihat dari indikator cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan dan cakupan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan rentan, dimana capaiannya adalah 102,42 % (sangat berhasil). Keberhasilan ini berhubungan dengan Program Pemerintah yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat yang berlaku bagi Masyarakat miskin yang tidak masuk JKN .

Sasaran 27 : Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat. dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.29

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	100 %	100%
Rata-rata			100 %	100%

Sasaran meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat dapat tercapai 100 %. Jumlah teknologi tepat guna yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat meliputi pemanfaatan SDA dan posyantek aktif dan hasilnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 28: Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama

Tugas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang salah satunya diwujudkan melalui fasilitasi peningkatan sarana peribadatan dan pendidikan agama dengan selalu tunduk pada aturan terkait yaitu permendagri nomor 32 Tahun 2011. Jenis sarana peribadatan dan pendidikan agama yang selama ini disupport oleh pemerintah meliputi Masjid, mushola, Gereja, TPQ, Madin, Madrasah Ibtidaiyah, MTs, dan Pondok Pesantren. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya sarana peribadatan dan pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

Tabel III.30

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Sarana Peribadatan dan Pendidikan Agama

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
Jumlah sarana peribadatan dan pendidikan agama yang dibantu	267 unit	-	0%	96,45%

Dari target hibah kepada sarana peribadatan dan pendidikan agama sejumlah 267 unit, tidak ada yang terealisasi atau 0% (kategori sangat buruk). Hal ini disebabkan pada bantuan sarana peribadatan dan pendidikan agama, proposal yang ada tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan bahkan ada yang tidak berstatus badan hukum. Sehingga anggaran yang ada tidak dapat direalisasikan.

Sasaran 29 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.31
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) pegawai.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
Jumlah peserta diklat struktural	42 org	42 org	100%	5%
Jumlah PNS yang ikut diklat fungsional	154 org	112 org	72,72%	410%
Jumlah PNS yang ikut diklat bendaharawan	40	40	100%	100%
Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	154 org	112 org	72,72%	410%
Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	3	3	100%	80%
Rata-rata			89,09%	132,5%

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai dapat tercapai sebesar 89,09%. Rata-rata ini didukung oleh 3 indikator yang telah tercapai sebesar 100%, 2 indikator 72,72% . Jika dibandingkan dengan rata – rata capaian pada tahun lalu, mengalami penurunan, yaitu dari 132,5% menurun menjadi 89,09%. Penyelenggaraan diklat struktural dilaksanakan dengan mengirim peserta ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Adapun Jumlah peserta diklat structural yang ditargetkan 42 orang terealisasi sebesar 42 orang atau 100%.Adapun diklat teknis/fungsional, pada tahun 2015 target yang ditetapkan 154 orang ternyata yang diberangkatkan 112 orang atau kurang dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan Jumlah PNS yang mendapat bantuan biaya tugas belajar terealisasi 100%.

Sasaran 30 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ ketrampilan bagi masyarakat

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.32
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja/ketrampilan bagi masyarakat

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015
Jumlah dokumen parahita yang tersusun	1 paket	1 paket	100 %
Jumlah posyandu unggulan yang terbentuk	6 kelompok	6 kelompok	100 %
Jumlah kader posyandu yang terlatih	112 kader	112 kader	100%
Jumlah data posyandu yang tersusun	1 buku	1 buku	100 %
Jumlah sarana posyandu yang tersedia	30 unit	30 unit	100%
Jumlah orang tua yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus	100 orang	100 orang	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat (per tahun)	1	1	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar (per tahun/orang)	1 keg/55 org	1	100 %
Pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit sosial (per tahun)	1 keg	1	100 %
Pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi keluarga fakir miskin dan wanita rawan sosial ekonomi (kegiatan/tahun)	1 keg	1	100 %
Jumlah desa lokasi penerima program P2M-BG	2 desa	2 desa	100%
Jumlah Produk TTG Lokal unggulan yang dipamerkan pada event tingkat nasional	1 paket	1 paket	1 paket
Jumlah pelaku usaha industri yang dibina atau dilatih	525 orang	526 orang	100%
Rata-rata			100

Untuk melihat capaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja / ketrampilan bagi masyarakat dapat dilihat dari 13 indikator yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 100 % (berhasil). Pencapaian ini sangat berkaitan dengan beberapa program yang dilaksanakan Pemkab Rembang, diantaranya :

1. Program Pemerintah dalam Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Kegiatan yang mendukung adalah :
 - a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
 - b. Penguatan Pokjnal Posyandu
 - c. Pelatihan Peningkatan anak berkebutuhan khusus (ABK)
 - d. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
2. Program peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, yang diwujudkan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan masyarakat berprespektif gender (P2MBG)
 - b. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - a. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam usaha industri
 - b. Penumbuhan industri di Desa P2MBG
 - c. Penganekaragaman dan peningkatan kualitas produk IKM
 - d. Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal
 - b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 - c. Pelayanan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi PMKS

Sasaran 31: Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan

Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh menjadi prasyarat utama dalam mendorong pengembangan wilayah sebagaimana telah menjadi titik berat pilar pertama prioritas pembangunan daerah yaitu melalui program penyediaan dan peningkatan infrastruktur ke-PU-an. Perwujudan Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan serta Terbangunnya jalan poros desa dan kecamatan dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum yang meliputi antara lain pembangunan kebinamargaan atau jalan jembatan. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran melalui indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebagaimana tertuang dalam tabel III.33.

Tabel III.33

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas prasarana jalan dan jembatan

No.	Indikator Sasaran	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%) 2015	Capaian (%) 2014
1.	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85%	49.82%	58.61%	56.68%
2	prosentase jembatan dalam kondisi baik	50%	72.22%	144.44%	150.00%
	RATA – RATA			101.53%	

Secara akumulatif Prosentase infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi baik dimana dari target 85% terealisasi 48,92% atau mencapai sebesar 320,23km dari seluruh jalan Kabupaten 642,75 km sehingga capaian sasaran sebesar 58,61%, termasuk dalam kategori cukup berhasil.

Sasaran 32: Meningkatnya kualitas saluran irigasi

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas saluran irigasi melalui program optimalisasi sumber daya air, yang diarahkan untuk peningkatan ketersediaan air baku dan mengoperasikan prasarana dan sarana jaringan sumber daya air untuk keperluan irigasi pertanian dan untuk fungsi pengairan lainnya.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas saluran irigasi untuk tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel III.34

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas saluran irigasi

No.	Indikator Sasaran	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian (%) 2015
1	prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis	20 %	0,00%	0,00%
Rata-rata				0,00%

Capaian sasaran prosentase peningkatan sawah dengan irigasi teknis nol persen karena program kegiatan tidak dijalankan mengingat jadwal waktu pekerjaan tidak mencukupi dan permasalahan hukum yang membelit SKPD terkait.

Sasaran 33 : Meningkatnya kualitas saluran drainase

Perbaikan kualitas saluran drainase perkotaan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur pedesaan dan wilayah cepat tumbuh. Perbaikan kualitas saluran drainase yang dikelola meliputi proses pembangunan saluran drainase akibat perkembangan wilayah kota dan pemeliharannya.

Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas saluran drainase melalui indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III.35

Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas saluran Drainase

No.	Indikator Sasaran	Target	Realisasi 2015	Realisasi % 2015	Capaian (%) 2014
1	Prosentase wilayah yang memiliki drainase	50 %	70 %	141.00 %	45.54%
2.	Prosentase RTH Kawasan Perkotaan	30 %	0 %	0 %	20 %
Rata-rata			70 %		

Indikator persentase wilayah yang memiliki drainase menunjukkan capaian kinerja berhasil yaitu mencapai 141.00 %. Hampir seluruh wilayah perkotaan di Kabupaten Rembang telah terfasilitasi sarana drainase, beberapa wilayah yang belum pada umumnya adalah wilayah pemukiman baru/pengembangan.

Target untuk sasaran prosentase RTH kawasan perkotaan tidak tercapai karena belum ada wilayah yang memungkinkan untuk penambahan RTH di wilayah Rembang kota sehingga hanya melakukan pemeliharaan rutin saja. Capaian kinerja sasaran secara akumulatif mencapai 70%.

Sasaran 34 :Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front city

Sea front city dibangun melalui upaya Pengembangan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasis ekosistem dan kelestarian daya dukung lingkungan. Pada tahun 2015 upaya mewujudkan konsepsi ini dikonsentrasikan melalui peningkatan pengelolaan potensi perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

Capaian kinerja Sasaran yaitu Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya sea front city yang di nilai dari pengukuran beberapa indikator yaitu Jumlah hasil tangkapan ikandan meningkatnya Omset Produksi Hasil Olahan Perikanan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel III.36

Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya *sea front city*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015
1	Jumlah hasil tangkapan ikan	kg	64.419.005	60.894.207	94,49%
2	Prosentase meningkatnya Omset Produksi Hasil Olahan Perikanan	kg	225.525.000.	212.035.000	94,02%
Rata-rata					94,26 %

Darihasil pengukuran kinerja sasaran ini yaitu meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan, berkaitan dengan salah satu misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, yaitu untuk meningkatkan pengelolaan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Guna mencapai target di tahun 2015 telah diadakan kegiatan

berupa bantuan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap berupa bantuan alat tangkap dan modernisasi kapal penangkap ikan. Namun demikian ternyata untuk jumlah hasil produksi perikanan laut hanya tercapai 94,26% dari target. Ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor penyebabnya, di antaranya adanya fluktuasi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan beberapa waktu lalu. Di samping itu juga diberlakukannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang larangan penggunaan alat tangkap tertentu. Hal ini menyebabkan selama beberapa waktu para nelayan tidak melakukan aktivitasnya untuk menangkap ikan di laut. Hal ini tentu mempengaruhi produksi perikanan laut yang dihasilkan.

Dengan sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat diperoleh produksi penangkapan perikanan laut yang dihasilkan dari hasil pelelangan di 10 unit TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang terdapat di Kabupaten Rembang. Produksi perikanan laut berdasarkan hasil pelelangan di TPI tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.37
Produksi dan Raman TPI di Kabupaten Rembang
Tahun 2014 – 2015

No.	TPI/PPI	Produksi (Kg)		Raman (Rp.)	
		2014	2015	2014	2015
1.	TPI Tunggulsari	3.765	2.756	105.260.000,-	110.380.000,-
2.	TPI Tanjungsari	2.067.437	1.720.664	6.553.235.000,-	5.244.754.000,-
3.	PPI Tasikagung I	13.084.544	11.410.633	113.984.014.111,-	110.138.663.000,-
4.	TPI Tasikagung II	20.086.425	23.453.191	52.026.380.000,-	59.498.500.000,-
5.	TPI Pasar Banggi	7.857	7.685	78.570.000,-	76.850.000,-
6.	TPI Pangkalan	6.120	4.340	61.200.000,-	43.400.000,-
7.	TPI Pandangan	17.752	4.012.341	224.350.444,-	33.686.638.000,-
8.	TPI Karang Lincak	2.578	3.194	26.943.000,-	28.824.000,-
9.	PPI Karang Anyar	9.105.208	6.094.708	113.169.365.000,-	90.526.620.000,-
10.	PPI Sarang	16.390.960	14.033.895	109.997.149.000,-	104.543.022.000,-
11.	<i>Pengepul</i>	-	7.196	-	323.820.000,-
	J u m l a h	60.772.646	60.894.207	396.226.466.555,-	412.033.831.000,-

Hasil produksi perikanan laut tersebut di samping diperoleh dari hasil lelang di TPI juga diperoleh dari pengepul ikan. Saat ini juga mulai dioperasikan TPI Binangun, sehingga untuk ke depannya jumlah TPI yang beroperasi di Kabupaten Rembang adalah

11 unit. Sebagian besar hasil produksi perikanan laut tersebut diperoleh dari jenis ikan pelagis yang bernilai ekonomis tinggi, di antaranya ikan Layang, Kembung, Tembang, Tongkol, Bawal, Tenggiri, Teri, dan juga Kakap. Dari hasil tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan produksi yang juga berdampak pada penurunan nilai produksi yang dihasilkan. Ini merupakan dampak dari berlakunya aturan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengenai larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya.

Produksi perikanan laut tersebut selain dikonsumsi langsung oleh masyarakat Kabupaten Rembang juga diolah menjadi produk olahan hasil perikanan untuk komoditi ekspor baik untuk lingkup daerah, antar pulau maupun antar negara.

Sasaran 35 :Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.38

Capaian kinerja Sasaran Terwujudnya pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015
1	Jumlah kelompok Pokwasmas	Kelompok	4	4	100
2	Jumlah Pelatihan Peningkatkan SDM masyarakat di daerah pesisir dan sekitarnya	Orang	60	60	100
Capaian Kinerja Sasaran					100

Terkait dengan sasaran terwujudnya pemberdayaan masyarakat pesisir tercapai 100 %, Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan dana dari APBD dan APBN dengan memberikan banyak kegiatan yang bersifat dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di daerah pesisir sehingga dapat mencapai visi yaitu terwujudnya kelautan dan perikanan Rembang yang unggul dan maju untuk kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Pengelolaan perikanan, pesisir dan kelautan secara berkelanjutan dengan dukungan dana APBD dan APBN memberikan banyak kegiatan yang bersifat langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah pesisir seperti kegiatan usaha garam. Disamping itu juga terpantaunya kerusakan ekosistem pantai, masalah yang berkaitan dengan perijinan kapal serta hukum terkait dengan pendayagunaan sumberdaya laut. Dimana ketelibatan masyarakat terutama yang tergabung dalam

(POKMASWAS) sumberdaya kelautan dan perikanan sangat berperan dalam kegiatan tersebut.

Sasaran 36 : Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan

Tingginya potensi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang tidak serta merta mengurangi perhatian pemerintah kabupaten Rembang terhadap pengembangan budidaya perikanan kelautan. Pemanfaatan sumberdaya melalui kosepsi ramah lingkungan yang mampu menjamin keberlangsungan kehidupan. Salah satunya adalah melalui perikanan budidaya dengan menggunakan bibit ikan unggul. Namun hal akan semakin lengkap jika dibarengi dengan kapasitas pengolahan hasil ikan tangkap maupun budidaya untuk meningkatkan nilai guna maupun ekonomi komoditas.

Hasil pengukuran kinerja sasaran Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

Tabel III.39

Capaian Kinerja Sasaran Terbangunnya kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015
1	Peningkatan Produksi Garam	Ton	192.437.000	219.477.500	114,05
2	Jumlah Produksi Benih ikan	Ekor	53.550.000	387.457.146	723,54
3	Jumlah hasil produksi olahan	Ton	220.525.	212.035.	94,02
Capaian Kinerja Sasaran					310,53

Sasaran kawasan pengembangan budidaya perikanan kelautan di dekati dari tiga indikator yaitu Peningkatan Produksi Garam, jumlah bibit ikan unggul dan omset produksi hasil olahan perikanan. Capaian kinerja sasaran ini mencapai 310,53 atau dalam kategori sangat berhasil. Berkaitan dengan misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu untuk meningkatkan pengelolaan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan meningkatkan produksi garam. Guna mencapai target di tahun 2015 telah diadakan

kegiatan berupa batuan sarana dan prasarana untuk perikanan tangkap berupa bantuan alat tangkap dan modernisasi kapal penangkap ikan

Tabel III.40
Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan di Kabupaten Rembang
Tahun 2013 – 2015

No	Jenis Pengolahan	Tahun / Jumlah					
		2013		2014		2015	
		Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp. Juta)
1.	Teri Nasi	2.376,0	35.640,-	2.015	30.225,-	2.020	34.340,-
2.	Pemindangan	57.360,0	564.960,-	58.102	572.268,-	58.000	696.000,-
3.	Pengeringan/ Pengasinan	83.122,8	332.491,-	81.568	326.275,-	85.560	427.800,-
4.	Pedo	1.320,0	5.280,-	1.454	6.810,-	1.350	6.750,-
5.	Jambal	403,2	2.016,-	420	2.426,-	430	3.010,-
6.	Pengasapan	4.688,4	28.130,-	4.725	30.592,-	4.535	32.652,-
7.	Terasi	112,2	1.122,-	115	1.830,-	125	213,-
8.	Kerupuk	946,8	9.468,-	952	10.950,-	1.000	1.300,-
9.	Petis	117,6	588,-	101	498,-	120	624,-
10.	Presto	31,2	936,-	32	998,-	40	1.300,-
11.	Tepung Ikan	8.292	41.400,-	8.018	40.800,-	8.000	44.000,-
12.	Pengalengan	50,4	4.536,-	-	-	-	-
13.	Pembekuan	38.616,0	347.554,-	39.585	380.960,-	42.030	42.030,-
14.	Suri Mie	7.811,6	136.289,-	7.947	156.430,-	8.250	18.563,-
15.	Lain-lain (Aneka Produk)	4.932,0	14.769,-	4.990	16.483,-	575	20.125,-
	J u m l a h	210.180,2	1.525.266,-	210.024	1.557.545,-	212.035	1.874.044,-

Sasaran 37 :Terwujudnya kawasan wisata bahari

Sejalan dengan konsep *sea front city*, wisata bahari juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Rembang. Sasaran Terwujudnya Kawasan Wisata Bahari didekati dari beberapa indikator yaitu Jumlah wisatawan bahari dan Rata-rata Kunjungan wisatawan. Hasil pengukuran indikator-indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel III.41
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya kawasan wisata bahari

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015
1	Meningkatnya jml kunjungan wisata (org) 5% per thn)	403,078	1,321,411	327.83%
2	Meningkatnya jml pendapat-an daerah dari obyek wisata (10% per thn)	1,289,771,100	1,325,738,920	102.79%
3	Meningkatnya jml obyek wisata yg memiliki kelengkapan bahan promosi (bh)	5	5	100%
4	Meningkatnya jumlah event pariwisata daerah dalam setahun (kali).	4	4	100%
5	Meningkatnya jml obyek pari wisata & daya tarik wisata yg memiliki sarana prasarana penunjang lengkap (unit)	5	5	100%
6	Meningkatnya rata2 lama tinggal wisatawan (hr) 5%/th	2.12	2.12	100%
Rata-rata				138,44%

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya kawasan wisata bahari mencapai 138,44% masuk kategori sangat berhasil. Tingginya capaian kinerja sasaran ini disumbang oleh indikator jumlah wisatawan yang mencapai 1.321.411 orang, jauh melampaui target 403.078 orang dan penerimaan pendapatan dari obyek wisata yang mencapai Rp. 1.325.738.920 (102,79%) dari target Rp. 1.289.771.100.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan wisata Taman Kartini/Dampo Awang Beach yang semakin profesional. Hal ini juga didukung dengan tercapainya semua target pariwisata (100%) seperti jumlah obyek wisata yang memiliki telah kelengkapan bahan promosi sebanyak 5 obyek (100%), event pariwisata daerah dalam setahun sebanyak 4 kali (100%), rata2 lama tinggal wisatawan 2 hari dalam setahun serta semakin banyaknya pilihan tempat penginapan (hotel) di Kabupaten Rembang.

Sasaran 38 : Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.

Capaian kinerja sasaran terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance* dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

Tabel III.42

Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
Opini penilaian BPK	WTP	WDP	82 %	82 %
Prosentase SKPD yang menyusun Penetapan kinerja	100%	100.00%	100.00%	100.00%
Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%	100.00%	100.00%	100.00%
Rata-rata			94 %	94%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran terselenggaranya pemerintahan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi serta *good and clean governance*, dapat diketahui bahwa dari 3 indikator kinerja yang diukur terdapat 2 indikator yang sudah terpenuhi targetnya yaitu prosentase SKPD yang menyusun penetapan kinerja dan LAKIP.

Sedangkan Target WTP ditahun 2015 belum dapat terpenuhi. Dalam hal ini Opini BPK RI terhadap pemeriksaan LKPD 2014 masih dalam status WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Belum dapat tercapai target WTP dikarenakan masih banyak catatan-catatan pengelolaan keuangan daerah yang perlu dibenahi terutama masalah Aset Daerah.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan Pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi BPK RI secara terus menerus dan Desk pembinaan SKPD atas hasil pemeriksaan BPK RI.
- 2) Menetapkan *action plan* atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan melaksanakannya sebagai langkah perbaikan kualitas laporan keuangan daerah.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan komitmen dan integritas dalam proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pengawasan dan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 2) Menggunakan skala prioritas dalam pengadaan prasarana dan sarana penunjang pengawasan serta pengadaan pelayanan administrasi perkantoran

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun ini masih sama seperti tahun lalu. Yaitu sebesar 94%.

Sasaran 39: Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel III.43
Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
Nilai IKM	83	73,58%	89,73%	92%
Jumlah sertifikasi ISO	10 unit	7 unit	70%	70 %
Cakupan penerbitan KTP/KK	100%	100 %	100%	100,00%
Cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil	100%	100 %	100%	100,00 %
Jumlah Arsiparis	2 orang	2 orang	100%	100,00%
		Rata-rata	91,95%	88%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran tersedianya sistem dan kelembagaan layanan publik yang efektif dan efisien mencapai 91.95 %. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari beberapa indikator, diantaranya Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian di 9 (sembilan) unit pelayanan publik mendapat nilai 73,58 dari target 83. Sedangkan indikator UPP yang mempunyai sertifikat ISO sebanyak 7 unit dari 10 UPP. Adapun UPP adalah :

1. RSUD Dr Soetrasno
2. SMKN1 Rembang
3. SMKN 2 Rembang
4. SMKN Sedan
5. SMAN 1 Rembang
6. SMPN 1 Lasem
7. SMPN 2 Rembang

Cakupan penerbitan KTP dan KK, serta penerbitan Akta Catatan Sipil masing-masing mencapai 100 % dan 100% dari target yang direncanakan. Kondisi ini terkait dengan kebijakan pembuatan E-KTP secara nasional.

Sementara di bidang perpustakaan jumlah arsiparis mencapai 100% dari yang ditargetkan 2 orang.

Kedepan yang perlu ditingkatkan dalam perbaikan sistem dan kelembagaan layanan publik perlu menyusun adanya standar pelayanan publik di masing-masing UPP serta melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara kontinyu.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun ini mengalami peningkatan, dari tahun 2014 yang tercapai 88%, di tahun 2015 ini tercapai 91,95%.

Sasaran 40 : Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.

Capaian kinerja sasaran Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan dapat diketahui dari indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.44

Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
Jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan keg pemerintahan dan pembangunan daerah	7000 exp	7000 exp	100.00%	100%
Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers	100%	100%	100.00%	80%
Jumlah website milik Pemda yang dapat diakses oleh masyarakat	14	14	100.00%	100%
		Rata-rata	100 %	97,5%

Dari pencapaian target sasaran tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan, diketahui bahwa jumlah media massa baik cetak & elektronik yg mempublikasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah tercapai 100% dari 7.000 eksemplar (kategori berhasil). Tingkat penyebaran informasi publik dan fasilitasi pers dari target 100% terealisasi sebesar 100% .

Secara kuantitatif jumlah website milik pemda yang dapat diakses oleh masyarakat dari target 14 domain terrealisasi 14 domain dengan capaian 100% (kategori berhasil).

Keberadaan website milik pemda tersebut diharapkan dapat berdaya guna untuk mencapai tujuan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kebijakan dan pro aktif dalam mengantisipasi perkembangan global, ditopang oleh teknologi yang memadai.

Penyampaian informasi melalui media massa seperti majalah bangkit, radio Citra Bahari FM dan televisi serta melalui media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho juga telah sesuai target yang direncanakan dengan capaian 100% (kategori berhasil). Informasi melalui media lainnya (sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya juga dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Secara akumulatif pencapaian target sasaran tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan mencapai 100% (kategori berhasil).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu capaian sasaran tersedianya sistem informasi pembangunan yang memadai dan peka terhadap perubahan ini mengalami peningkatan yaitu dari 97,5% menjadi 100%.

Sasaran 41 : Responsif terhadap perkembangan situasi.

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perkembangan situasi dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

Tabel III.45

Capaian Kinerja Sasaran Responsif terhadap perkembangan situasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2014
Prosentase terbentuknya masyarakat sadar bencana	100 %	99,69 %	96,23 %
Prosentase pelatihan penanggulangan Bencana	100 %	97,24 %	97,51 %
Prosentase Tim Penanggulangan Bencana yang terdidik	100 %	97,53 %	93,04 %
Prosentase jumlah korban yang mendapat bantuan	100 %	82,28 %	76,16 %
Prosentase jumlah sasaran dan prosentase penanggulangan bencana	100 %	94,70 %	98,55 %
Rata Rata		94,29 %	92,29%

Sasaran Responsif terhadap perkembangan situasi capaian kerjanya adalah 94,29 % (berhasil). Kondisi ini didasarkan dari pada tertanganinya kejadian bencana di 14 kecamatan sesuai target dan terlaksananya pelatihan teknis tim penanggulangan bencana. Adapun untuk lebih meningkatkan capaian sasaran responsif terhadap perkembangan situasi telah dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Pembentukan Tim Penyusun Draf Peraturan / peraturan yang terkait dalam pemberian bantuan korban bencana yang berupa Peraturan Daerah , Peraturan Bupati , SOP.
2. Pengkajian kejadian bencana yang melibatkan berbagai pihak (Dinas / Instansi terkait dan stake holder).
3. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan penanggulangan bencana .

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian sasaran responsif terhadap perkembangan situasi pada tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu capaiannya sebesar 94,29% sedangkan tahun lalu sebesar 92,29%.

Sasaran 42 : Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.46

Capaian Kinerja Sasaran Responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015	Capaian % 2014
Jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi	14 kec	14 kec	100 %	100%
Rata-rata			100 %	100%

Capaian kinerja sasaran responsif terhadap perubahan dinamika kebijakan nasional. Tingkat kepuasan layanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan melalui indikator jumlah penyelenggaraan Dialog / Audensi dari target 14 kecamatan terealisasi 14 kecamatan adalah sebesar 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun ini tetap bertahan sebesar 100%.

Sasaran 43: Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis

Capaian kinerja sasaran proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis dapat dikategorikan **berhasil** dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel III.47

Capaian Kinerja Sasaran Proaktif dalam mengantisipasi perkembangan/ perubahan lingkungan strategis

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian % 2015
Jm dokumen kajian penelitian dan pengembangan	2 dokumen	19 dokumen	950%
Jumlah BTS	138 buah	138 buah	100%
Jumlah pemegang ijin usaha penyiaran	14 buah	14 buah	100%
RATA – RATA			191.67%

Untuk capaian sasaran 46 dari semua indikator kinerja sudah mencapai 100% yang termasuk kategori berhasil, yang ditandai dengan beberapa indikator yaitu jumlah dokumen kajian penelitian dan pengembangan dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen sehingga dinyatakan dalam kategori berhasil.

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu isu utama perubahan paradigma global karena dapat meningkatkan efisiensi, penghematan waktu dan rantai pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu teknologi informasi dan komunikasi mengisyaratkan peran penting pemerintah dalam pembinaan akses informasi yang diterima masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rembang mengantisipasi hal tersebut ada beberapa cara yaitu kerjasama bidang informasi dan komunikasi, pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa.

Ketersediaan BTS sebagai pendukung coverage telekomunikasi seluler yang ditargetkan 138 BTS seluruhnya juga tersedia di tahun 2015. Di bidang penyiaran radio broadcasting, jumlah radio penyiaran ditargetkan tersedia 9 stasiun dan semua memiliki ijin usaha penyiaran, sedangkan capaian realisasinya berhasil dengan tersedianya 9 stasiun radio dan jumlah ijin usaha penyiaran yang terdaftar sebesar 14 ijin usaha penyiaran.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2015 dapat terlihat dari laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 unaudited. Secara garis besar kinerja keuangan daerah akan dikaji melalui sisi pendapatan dan sisi belanja sebagai berikut :

1. PENDAPATAN

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut :

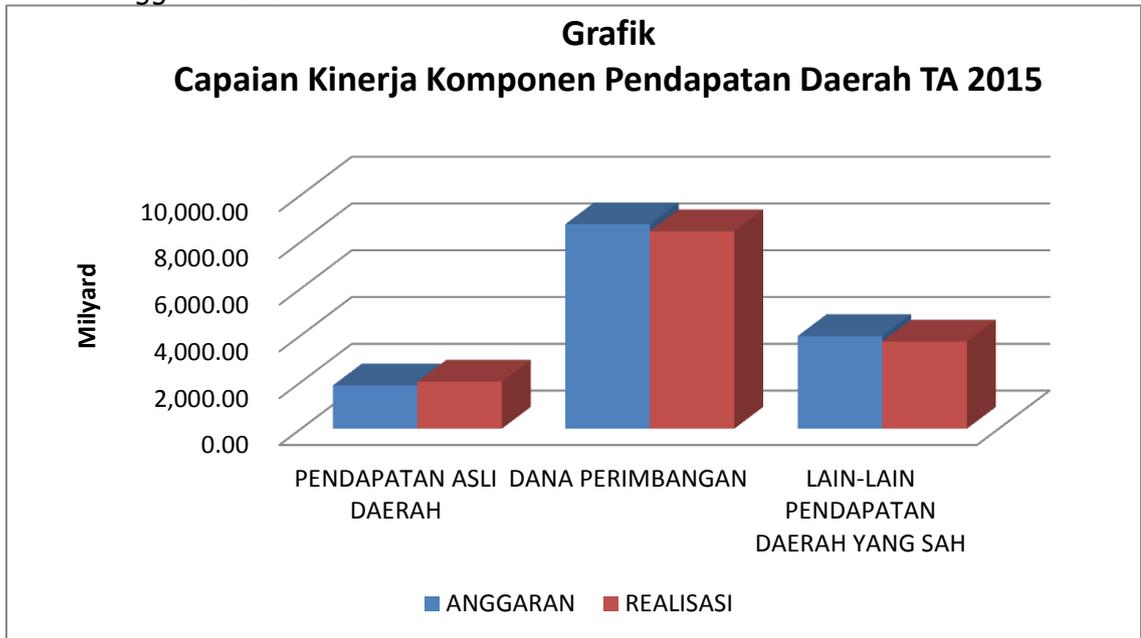
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	184.956.739.329,00	200.953.096.299,80	15.996.356.970,80	108,65
Pendapatan Pajak Daerah	37.023.000.000,00	42.306.265.606,00	5.283.265.606,00	114,27
Hasil Retribusi Daerah	29.756.100.500,00	32.273.570.803,00	2.517.470.303,00	108,46
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.429.911.000,00	4.447.117.385,00	17.206.385,00	100,39
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.747.727.829,00	121.926.142.505,80	8.178.414.676,80	107,19
DANA PERIMBANGAN	874.167.707.000,00	843.789.609.235,00	(30.378.097.765,00)	96,52
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.052.000.000,00	22.278.754.235,00	(5.773.245.765,00)	79,42
Dana Alokasi Umum	723.091.447.000,00	723.091.447.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	123.024.260.000,00	98.419.408.000,00	(24.604.852.000,00)	80,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	396.006.471.000,00	372.038.165.394,00	(23.968.305.606,00)	93,95
Pendapatan Hibah	1.492.290.000,00	138.351.272,00	(1.353.938.728,00)	9,27
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.549.967.000,00	93.284.137.342,00	17.734.170.342,00	123,47
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	268.637.095.000,00	268.241.945.000,00	(395.150.000,00)	99,85
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.327.119.000,00	10.373.731.780,00	(39.953.387.220,00)	20,61
JUMLAH	1.455.130.917.329,00	1.416.780.870.928,80	(38.350.046.400,20)	97,36

Pada tahun anggaran 2015 jumlah anggaran Pendapatan adalah sebesar Rp1.455.130.917.329,00 terealisasi sebesar Rp1.416.780.870.928,80 atau 97,36% dari target yang dianggarkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp200.953.096.299,80 atau 108,65% .Dana Perimbangan sebesar Rp843.789.609.235,00 atau sebesar 96,52%.

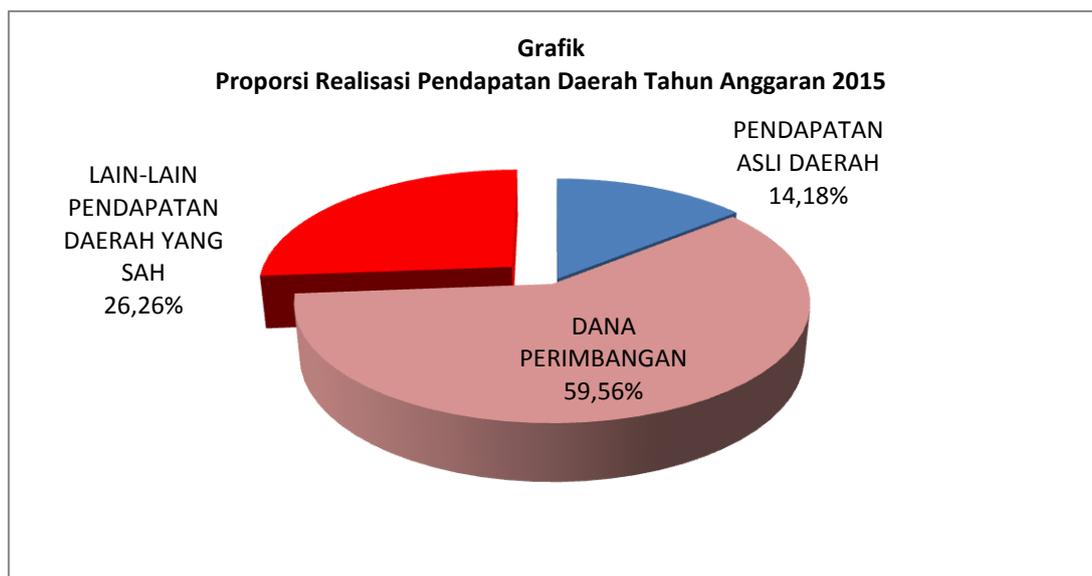
Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai sebesar Rp372.038.165.394,00 atau 93,95%.

Hal tersebut ditunjukkan dalam capaian kinerja komponen Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 berikut:



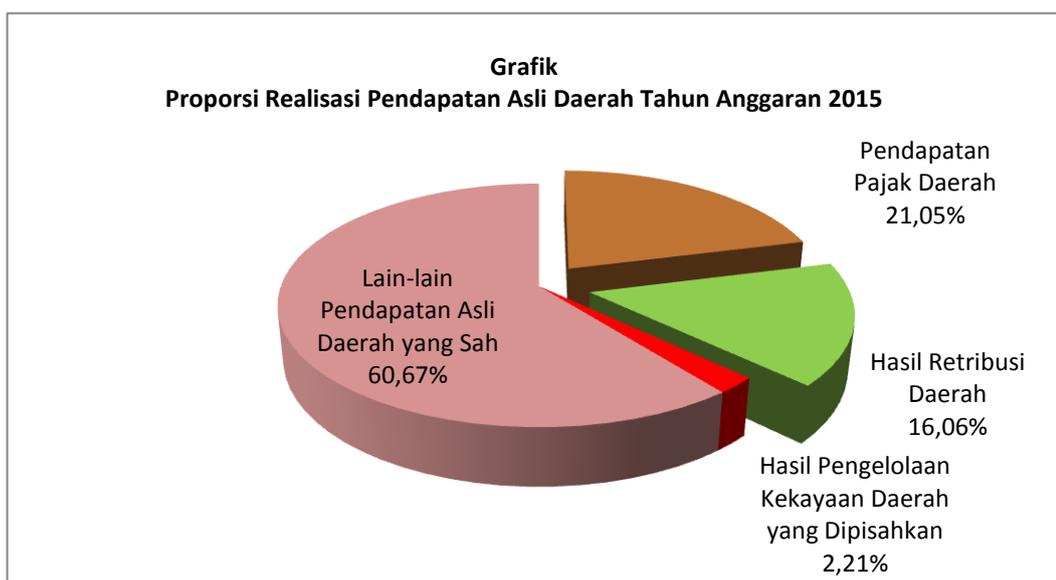
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 (unaudited)

Sementara dari proporsi realisasi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang masih berada pada prosentase yang terbawah dibandingkan pendapatan transfer dan Lain – lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 14,18%



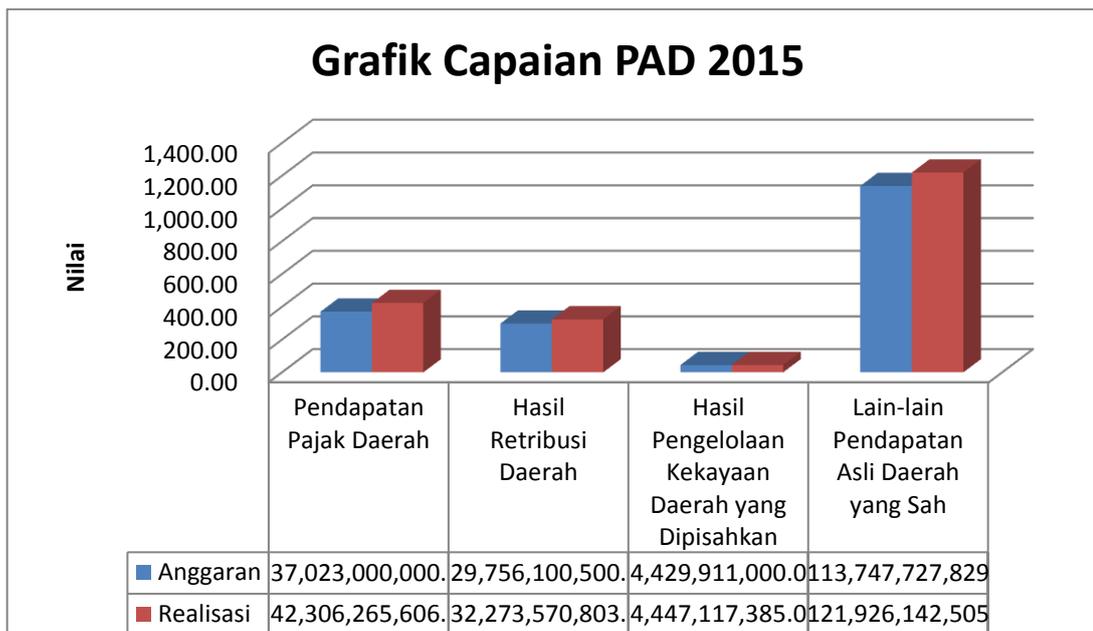
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 (unaudited)

Pada tahun anggaran 2015 anggaran Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp184.956.739.329,00 sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp200.953.096.299,80 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 108,65% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian Pajak Daerah menyumbang Rp42.306.265.606,00 atau (21,05%), Retribusi Daerah menyumbangkan Rp32.273.570.803,00 atau (16,06%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbangkan Rp4.447.117.385,00 atau (2,21%), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbangkan Rp121.926.142.505,80 atau (60,67%),



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 (unaudited)

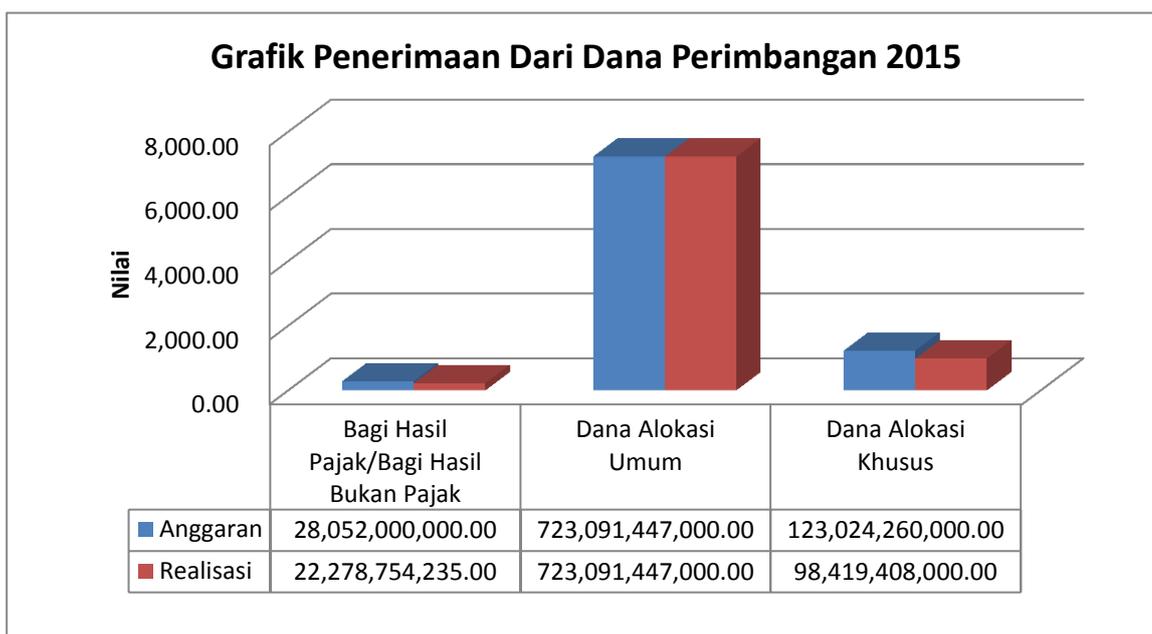
Secara keseluruhan pencapaian kinerja Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang selama Tahun anggaran 2015 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut :



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 (unaudited)

Dari grafik di atas tampak bahwa anggaran pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp37.023.000.000 tercapai realisasi sebesar Rp42.306.265.606,00 atau mencapai kinerja 114,27%. Anggaran pendapatan retribusi daerah adalah sebesar Rp29.756.100.500,00 tercapai realisasi Rp32.273.570.803,00 atau mencapai kinerja 108,46%. Anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp4.429.911.000,00 dengan realisasi Rp4.447.117.385,00 atau mencapai kinerja 100,39%. Sedangkan anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebesar Rp113.747.727,82 dengan realisasi Rp121.926.142,50 atau mencapai kinerja 107,19%.

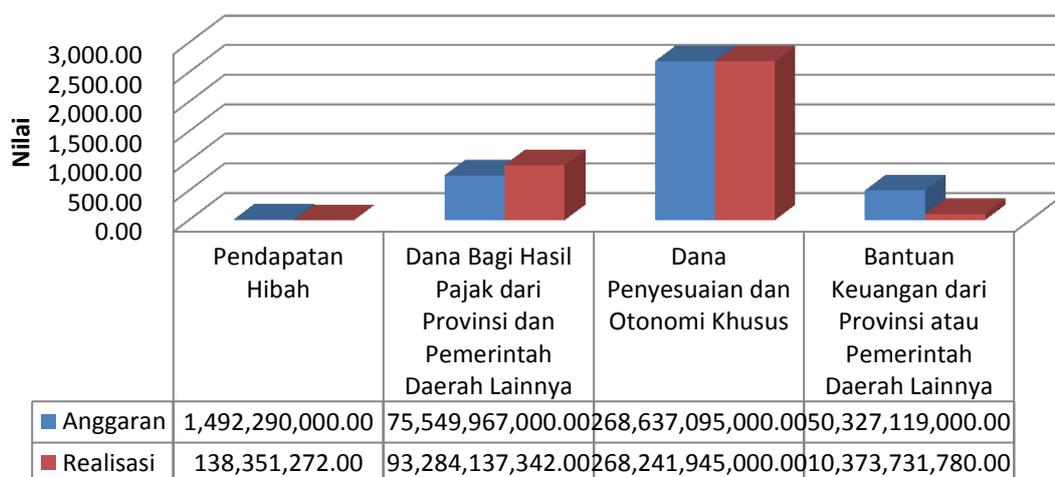
Penerimaan dari Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2015 tercapai realisasi sebesar Rp843.789.609.235,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 96,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp874.167.707.000,00. Dana Perimbangan mencakup atas Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp22.278.754.235,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp723.091.447.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp98.419.408.000,00



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 (unaudited)

Sementara untuk penerimaan dari kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah tercapai realisasinya sebesar Rp372.038.165.394,00 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 93.95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp396.006.471.000,00. Struktur dari Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut

**Grafik
Capaian Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah**



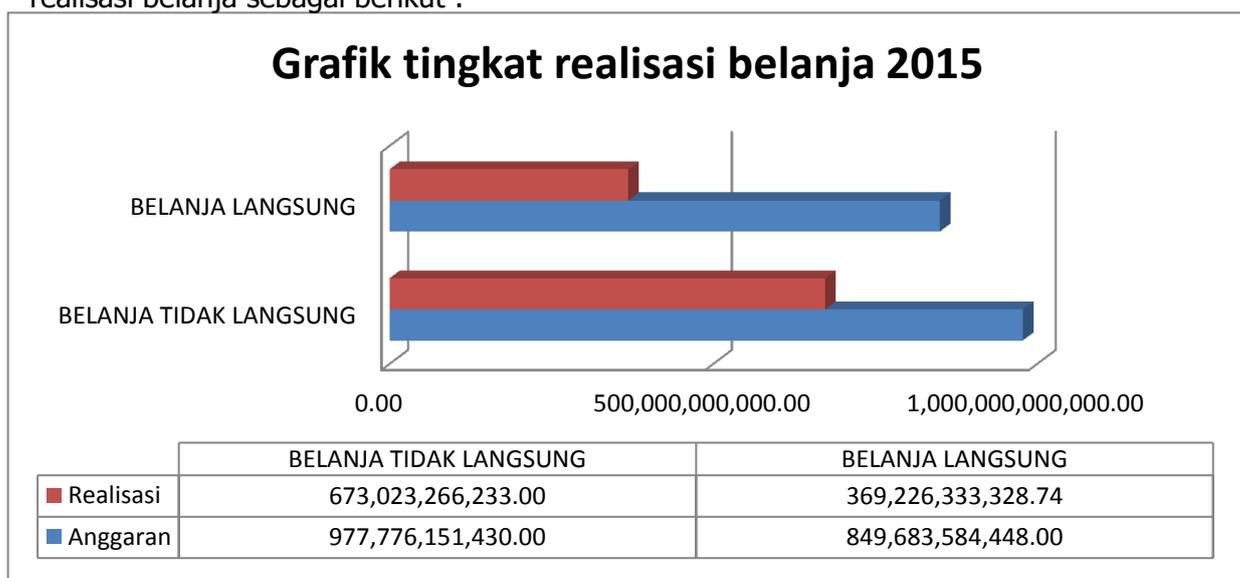
Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 (unaudited)

2. BELANJA

Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun anggaran 2015 menganggarkan belanja daerah sebesar Rp1.650.799.417.663,00, dan kemudian direalisasikan sebesar Rp1.218.909.917.776.74 atau 73,84%. seperti ditunjukkan dalam table realisasi belanja per 31 Desember 2015 sesuai Permendagri no 13 tahun 2006 sebagai berikut berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	977.776.151.430,00	849.683.584.448,00	(128.092.566.982,00)	86,90
Belanja Pegawai	760.052.202.159,00	661.427.901.861,00	(98.624.300.298,00)	87,02
Belanja Bunga	37.000.000,00	7.985.987,00	(29.014.013,00)	21,58
Belanja Hibah	43.331.165.800,00	23.873.745.800,00	(19.457.420.000,00)	55,10
Belanja Bantuan Sosial	5.295.670.000,00	2.714.000.000,00	(2.581.670.000,00)	51,25
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.157.224.400,00	6.157.224.400,00	0,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	161.902.889.071,00	155.502.726.400,00	(6.400.162.671,00)	96,05
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
BELANJA LANGSUNG	673.023.266.233,00	369.226.333.328,74	(303.796.932.904,26)	54,86
Belanja Pegawai	119.432.865.425,00	113.995.499.657,00	(5.437.365.768,00)	95,45
Belanja Barang dan Jasa	319.374.118.028,00	203.150.241.652,74	(116.223.876.375,26)	63,61
Belanja Modal	234.216.282.780,00	52.080.592.019,00	(182.135.690.761,00)	22,24
Jumlah	1.650.799.417.663,00	1.218.909.917.776,74	(431.889.499.886,26)	73,84

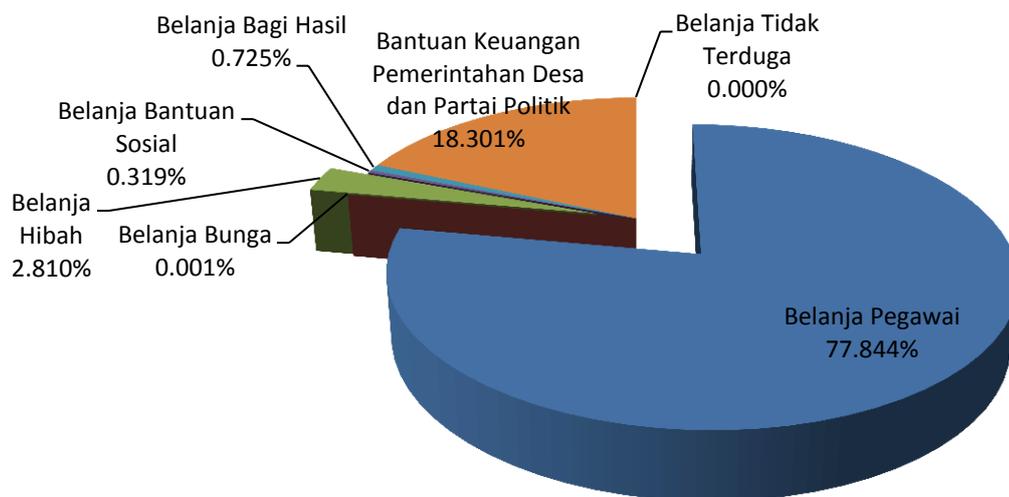
Proporsi realisasi belanja per 31 Desember 2015, dapat dilihat dari tingkat realisasi belanja sebagai berikut :



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015(unaudited)

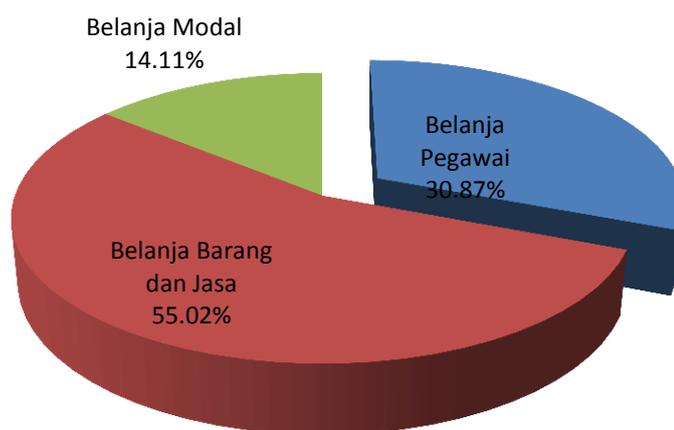
Perbandingan kinerja pos-pos belanja daerah tahun anggaran tahun 2015 yang ditunjukkan dalam grafik di atas mencakup realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.673.023.266.233,00 atau 86,90% dari pagu anggaran sebesar Rp.977.776.151.430,00. Dan realisasi belanja langsung sebesar Rp.369.226.333.328,74 atau 54,86% dari pagu anggaran sebesar Rp.849.683.584.488,00

Dari tingkat realisasi belanja di atas dapat kita proporsikan realisasi belanja tidak langsung sebagai berikut :



Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 (unaudited)

Sementara untuk belanja langsung adalah sebagai berikut :



Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015(unaudited)

3. PEMBIAYAAN

Pada tahun anggaran 2015 jumlah anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada pos penggunaan (SiLPA) adalah sebesar Rp206.340.500.334,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp.209.583.528.065,55 atau menunjukkan kinerja sebesar 92,20% dari yang dianggarkan.

Pengeluaran Pembiayaan daerah pada pos penyertaan modal pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp10.617.000.000,00 dengan realisasi Rp10.617.000.000,00 atau 100%, sedangkan pembayaran pokok utang dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00 dengan realisasi Rp53.450.843,00 atau 97,18% .

Secara umum Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebelum dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
PENDAPATAN	1.455.130.917.329,00	1.416.780.870.928,80	(38.350.046.400,20)	97,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH	184.956.739.329,00	200.953.096.299,80	15.996.356.970,80	108,65
Pendapatan Pajak Daerah	37.023.000.000,00	42.306.265.606,00	5.283.265.606,00	114,27
Hasil Retribusi Daerah	29.756.100.500,00	32.273.570.803,00	2.517.470.303,00	108,46
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.429.911.000,00	4.447.117.385,00	17.206.385,00	100,39
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113.747.727.829,00	121.926.142.505,80	8.178.414.676,80	107,19
DANA PERIMBANGAN	874.167.707.000,00	843.789.609.235,00	(30.378.097.765,00)	96,52
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.052.000.000,00	22.278.754.235,00	(5.773.245.765,00)	79,42
Dana Alokasi Umum	723.091.447.000,00	723.091.447.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	123.024.260.000,00	98.419.408.000,00	(24.604.852.000,00)	80,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	396.006.471.000,00	372.038.165.394,00	(23.968.305.606,00)	93,95
Pendapatan Hibah	1.492.290.000,00	138.351.272,00	(1.353.938.728,00)	9,27
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.549.967.000,00	93.284.137.342,00	17.734.170.342,00	123,47
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	268.637.095.000,00	268.241.945.000,00	(395.150.000,00)	99,85
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.327.119.000,00	10.373.731.780,00	(39.953.387.220,00)	20,61
BELANJA	1.650.799.417.663,00	1.218.909.917.776,74	(431.889.499.886,26)	73,84
BELANJA TIDAK LANGSUNG	977.776.151.430,00	849.683.584.448,00	(128.092.566.982,00)	86,90
Belanja Pegawai	760.052.202.159,00	661.427.901.861,00	(98.624.300.298,00)	87,02
Belanja Bunga	37.000.000,00	7.985.987,00	(29.014.013,00)	21,58
Belanja Hibah	43.331.165.800,00	23.873.745.800,00	(19.457.420.000,00)	55,10
Belanja Bantuan Sosial	5.295.670.000,00	2.714.000.000,00	(2.581.670.000,00)	51,25
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.157.224.400,00	6.157.224.400,00	0,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan	161.902.889.071,00	155.502.726.400,00	(6.400.162.671,00)	96,05

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
Desa dan Partai Politik				
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00
BELANJA LANGSUNG	673.023.266.233,00	369.226.333.328,74	(303.796.932.904,26)	54,86
Belanja Pegawai	119.432.865.425,00	113.995.499.657,00	(5.437.365.768,00)	95,45
Belanja Barang dan Jasa	319.374.118.028,00	203.150.241.652,74	(116.223.876.375,26)	63,61
Belanja Modal	234.216.282.780,00	52.080.592.019,00	(182.135.690.761,00)	22,24
SURPLUS / (DEFISIT)	(195.668.500.334,00)	197.870.953.152,06	393.539.453.486,06	(101,13)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	206.340.500.334,00	209.583.528.065,55	(16.096.634.302,00)	92,20
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	206.340.500.334,00	209.583.528.065,55	(16.096.634.302,00)	92,20
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.672.000.000,00	10.670.450.843,00	(1.549.157,00)	99,99
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.617.000.000,00	10.617.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	53.450.843,00	(1.549.157,00)	97,18
PEMBIAYAAN NETTO	195.668.500.334,00	198.913.077.222,55	(16.095.085.145,00)	91,77
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	396.784.030.374,61	377.444.368.341,06	0,00

BAB IV P E N U T U P

Pada Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015. Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis untuk mencapai **Visi Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran didapatkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 108,73 %. Pencapaian sasaran ini meningkat tipis dibanding pencapaian Tahun 2014 sebesar 108,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran telah sangat berhasil. Dari 43 (empat puluh tiga) sasaran strategis yang mempunyai kinerja sangat baik sebesar 31 sasaran, berkinerja tinggi sebanyak 4 sasaran, berkinerja sedang sejumlah 3 sasaran berkinerja rendah sebanyak 1 sasaran, dan berkinerja sangat rendah sebanyak 4 sasaran.

Sasaran yang tidak tercapai atau berkinerja sangat rendah secara umum disebabkan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan peraturan perundangan yang mewajibkan penerima bantuan hibah dan bantuan sosial harus berbadan hukum. Akibatnya bantuan terhadap kegiatan bantuan terhadap sarana peribadatan tidak tersalurkan.
2. Beberapa pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang terjerat proses hukum sehingga proses pembangunan infrastruktur tidak optimal.
3. Adanya pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015, mengakibatkan kegiatan pembangunan tidak berjalan optimal karena keterbatasan kewenangan pejabat.
4. Banyaknya jabatan yang kosong dan diampu oleh pelaksana tugas, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif.
5. Adanya pergeseran kewenangan sebagai akibat berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak segera diikuti peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya mengakibatkan daerah mengalami kegamangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Perlu kami informasikan bahwa untuk perbaikan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun berikutnya, sanga bergantung dar ikualitas RPJMD periode berikutnya, Bappeda bersama seluruh SKPD perlu merumuskan indikator kinerja daerah yang bersifat *outcome* pada skala program, sedangkan indikator kinerja SKPD yang bersifat *output* dijabarkan dalam Renstra SKPD.
2. Dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya, perlu dilakukan penyeselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD agar program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan program RPJMD dan mengarah pada pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah.
3. Dalam rangka pengukuran dan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang perlu didukung dengan elektronik Performance (*e-Performance*) yaitu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Rembang, Maret 2016

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ

